

AGREGAT

JURNAL EKONOMI & BISNIS

- Dinamika Kualitas Audit: Auditor Characteristics dan PCAOB Inspections** Hal 146-163
Sepky Mardian
- Green Marketing Terhadap Brand Image Produk Lampu LED Philips di Kota Bandung** Hal 164-182
Ayu Setyaningrum, Putu Nina Madiawati
- Analisa Kebijakan Dividen Berdasarkan Teori Lintner** Hal 183-194
Saifudin Saifudin, Septiani Putri
- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perdagangan Indonesia di Kawasan Amerika Latin** Hal 195-210
Sulthon Sjahril Sabaruddin
- Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Aceh** Hal 211-220
Sri Mulyati, Yusriadi Yusriadi
- Struktur Modal dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan** Hal 221-230
Lara Monica, Muchdie Muchdie, Uzair Achmadi
- Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh** Hal 231-246
Dewi Pudji Rahayu
- Kajian Perkembangan Penelitian Pemasaran Film** Hal 247-271
Nuryadi Wijiharjono

AGREGAT

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Jurnal berkala Ilmiah ini fokus dalam kajian ekonomi dan bisnis terbit dua kali dalam satu tahun (Maret dan September)

Editor In Chief

Edi Setiawan (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Managing Editor

Emaridial Ulza (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Associate Editors

Faizal Ridwan Zamzany (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Dewi Pudji Rahayu (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Novita Kusuma Maharani (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Hera Khairunnisa (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Meita Larasati (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Editorial Advisory Board

Sofia.L. Eremina (National Research Tomsk Polytechnic University, Rusia)

Selevich T.S. (National Research Tomsk Polytechnic University, Rusia)

Eko Suyono (Universitas Jendral Soedirman Purwokerto)

Erna Setiany (Universitas Mercu Buana)

Zuhairan Y. Yunan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

M Nurianto Al Arif (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Hikmah Endraswati (IAIN Salatiga)

Muchdie (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Sunarta (Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA)

Assistant to Editor

Prayoga Agasi

Elmy Nur Azizah

Alamat Redaksi

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Jl. Raya Bogor KM 23. No. 99. Flyover. Pasar Rebo. Jakarta Timur 13830

Telp: 021-87796977, Fax: 021-87796977

Email: agregat@uhamka.ac.id

<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat/index>

DAFTAR ISI

DINAMIKA KUALITAS AUDIT: AUDITOR CHARACTERISTICS DAN PCAOB INSPECTIONS

Sepky Mardian

Hal 146-163

GREEN MARKETING TERHADAP BRAND IMAGE PRODUK LAMPU LED PHILIPS DI KOTA BANDUNG

Ayu Setyaningrum, Putu Nina Madiawati

Hal 164-182

ANALISA KEBIJAKAN DIVIDEN BERDASARKAN TEORI LINTNER

Ratna Damayanti, Fithri Setya Marwati, Rochmi Widayanti

Hal 183-194

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERDAGANGAN INDONESIA DI KAWASAN AMERIKA LATIN

Sulthon Sjahril Sabaruddin

Hal 195-210

DANA BAGI HASIL DAN DANAALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PROVINSI ACEH

Sri Mulyati, Yusriadi Yusriadi

Hal 211-220

STRUKTUR MODAL DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Lara Monica, Muchdie Muchdie, Uzair Achmadi

Hal 221-230

PENYEBAB WAJIB PAJAK TIDAK PATUH

Dewi Pudji Rahayu

Hal 231-246

KAJIAN PERKEMBANGAN PENELITIAN PEMASARAN FILM

Nuryadi Wijiharjono

Hal 247-271

AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 1, No. 2, September 2017
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat>
p-ISSN: 2549-5658 e-ISSN: 2549-7243
DOI: 10.22236/agregat_vol1/is2pp145-163
Hal 146-163

DINAMIKA KUALITAS AUDIT: *AUDITOR CHARACTERISTICS* DAN PCAOB *INSPECTIONS*

Sepky Mardian

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI)

Email: sepky.mardian@gmail.com

Diterima: 17 Juli 2017; Direvisi: 24 Juli 2017; Disetujui: 7 Agustus 2017

Abstract

This study aimed to find the effects of auditor characteristics on audit quality. Audit characteristic measured by auditor licences, gender, age and audit firm affiliation. While the audit quality proxied by auditor violations conducted by auditor and identified by PCAOB. The data collected from PCAOB Settled Disciplinary listed by PCAOB in its website. Logistic regression is used to test the hypothesis. The study found that all variables did not effect the auditor characteristics on audit quality.

Keywords: Auditor characteristic, audit quality, PCAOB inspections.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak karakteristik auditor terhadap kualitas audit. Karakteristik audit diindikasikan dengan lisensi auditor, jenis kelamin, usia dan afiliasi Kantor Akuntan Publik. Sedangkan kualitas audit diproksikan dengan pelanggaran yang dilakukan auditor dan diidentifikasi oleh PCAOB. Data dikumpulkan dari daftar PCAOB *Settled Disciplinary* yang dipublikasikan di website PCAOB. Logistic regression digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa semua variable tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kata Kunci: Karakteristik auditor, kualitas audit, inspeksi PCAOB.

PENDAHULUAN

Gelombang skandal akuntansi dan keuangan tersebar dengan cepat dan masif; “menggulung” banyak hal termasuk kehilangan reputasi atas profesi audit, hukuman atas lebih dari 1.000 eksekutif, meruntuhkan kebanggaan kantor akuntan publik dan memaksa regulator untuk memperketat aturan seperti lahirnya Sarbane Oxley Act (SOX) 2002 dan melahirkan institusi pengawasan baru seperti Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (Ball, 2009; Barlaup, Dronen, & Stuart, 2009; Defond & Francis, 2005; Yu-Shu, Yi-Pei, & Chu-Yang, 2009).

Dalam perspektif berbeda, skandal ini bisa dimaknai sebagai berita “baik” atau berita “buruk” (Defond & Francis, 2005). Ini menjadi berita baik karena mampu menunjukkan bahwa pasar memiliki mekanisme sendiri dalam memberikan penalti dan menghambat segala bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku (Ball, 2009) dan meningkatkan *awareness* dari *stakeholder* baik regulator, asosiasi, praktisi, investor, dan pembaca laporan keuangan lainnya atas proses audit (Defond & Francis, 2005). Berita buruknya, kegagalan audit ini memberikan tantangan baru bagi

auditor karena *stakeholder* sudah semakin kritis atas proses audit, independensi dan kompetensi dari auditor (Barlaup et al., 2009; Defond & Francis, 2005).

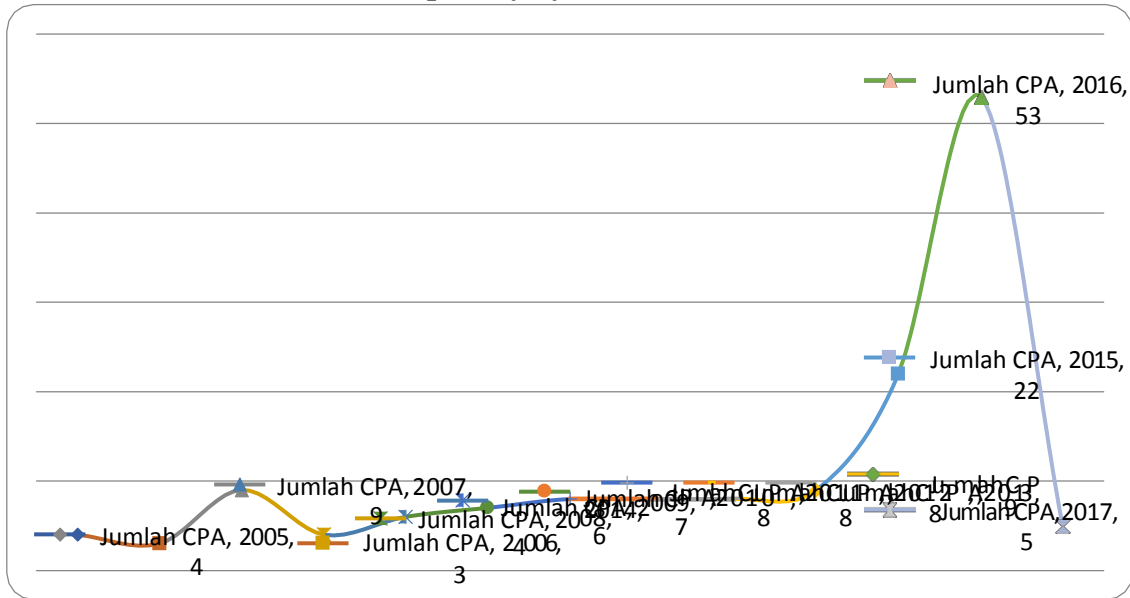
Di Amerika Serikat (USA), PCAOB semakin memberikan perhatian lebih atas proses audit dalam menjaga kepentingan publik atas laporan keuangan. Secara spesifik, PCAOB melakukan pengawasan atas proses audit yang dilakukan kantor akuntan publik, menjaga kepentingan investor dan publik dengan memastikan laporan audit yang informatif, akurat dan independen (Carcello, Hollingsworth, & Mastroliia, 2011). Lebih teknis, PCAOB melakukan penilaian atas kualitas audit yang berhubungan kompetensi professional partner, kompensasi, penugasan tanggung jawab, program pelatihan tim audit, kepatuhan atas standar independensi, penerimaan dan penolakan klien dan ketersediaan system pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) (Yu-Shu et al., 2009).

Berdasarkan data yang dirilis PCAOB tentang sanksi yang diberikan kepada auditor dan KAP yang melakukan perikatan atas perusahaan yang listing di New York Stock Exchange (NYSE), ada peningkatan dan pengetatan penegakan aturan oleh PCAOB. Hal ini terlihat dari

peningkatan jumlah sanksi yang diberikan di grafik di bawah ini.

dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat

Grafik 1. PCAOB Settled Disciplinary by Year



Sumber: PCAOB, 2017

Pelanggaran yang dilakukan auditor dan KAP yang menjadi dasar pemberian sanksi oleh PCAOB dapat diringkas dalam bentuk (1) keterlambatan penyampain laporan audit dan iuran registrasi; (2) prosedur audit yang tidak memadai; (3) bukti audit yang tidak cukup dan kompeten; (4) tidak memenuhi prinsip due care dan professional sceptism; (5) review partner atas pekerjaan tim tidak memadai; (6) tidak kooperatif dengan pemeriksa; (7) merubah kertas kerja; (8) komunikasi dan review informasi KAP lain tidak memadai; (9) Standar Pengendalian Mutu (SPM) KAP tidak

efektif; dan (10) memberikan jasa NAS/ tidak independen. Sedangkan, sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan adalah (1) teguran; (2) moratorium pemberian jasa; (3) pelarangan pemberian jasa; (4) sanksi denda; dan (5) pencabutan izin registrasi.

Belum ada konsensus terkait defenisi dari kualitas audit (Hay, Knechel, & Willekens, 2014). Tetapi, secara umum, kualitas audit diasosiasikan dengan resiko audit yang terkait potensi kegagalan auditor dalam memodifikasi opininya terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Watkins,

Hillison, & Morecroft, 2004). Defenisi kualitas audit yang sering dirujuk adalah seperti yang dijelaskan oleh DeAngelo (1981) sebagai, *the market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) report the breach*. Dalam substansi yang relatif sama, berikut adalah pengertian dari kualitas audit.

Palmrose (1988), mendefenisikan kualitas audit sebagai tingkat assurans – keyakinan auditor- atas potensi laporan keuangan mengandung salah saji material.

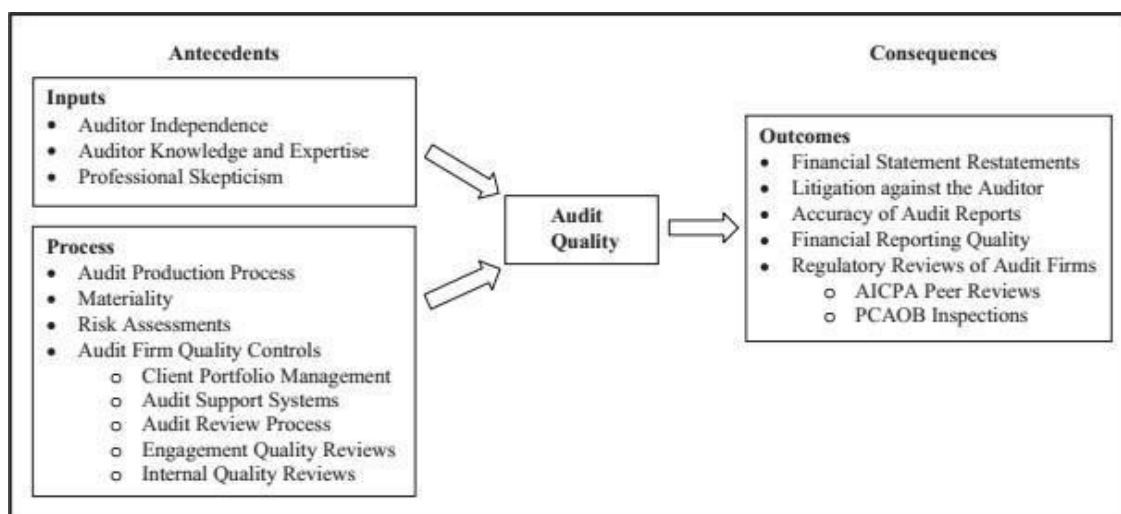
Soltani (2007), mendefenisikannya sebagai potensi atau kemungkinan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan penyimpangan material dalam system akuntansi. Eilifsen and Willekens (Messier, 2009) menjelaskan bahwa dalam literature audit, kualitas audit biasanya dikaitkan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan (kompetensi) dan keinginannya untuk mengeluarkan opini yang tepat dan sesuai dengan temuan tersebut (independensi)

Lebih detil Hayes, et.al. (2005) menjelaskan bahwa kualitas audit ada

yang bersifat teknis dan fungsional. Kualitas audit teknis berhubungan dengan audit yang dapat memenuhi ekspektasi pemakai laporan terhadap pendeteksian dan Pelaporan salah saji dan penyimpangan dalam laporan keuangan. Sedangkan kualitas audit fungsional berkaitan dengan proses dalam mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pemakai laporan.

Dalam perspektif kerangka kualitas audit yang lebih komprehensif, Knechel & Shefchik (2002) menyebutkan bahwa kualitas audit akan dipersepsikan berbeda sesuai dengan perbedaan sudut pandang stakeholder terhadap proses pelaporan keuangan. Pembaca laporan keuangan mempersepsikan kualitas audit sebagai laporan keuangan yang bebas salah saji maerial, auditor mendefenisikan kualitas audit tercapai jika proses audit dilakukan sesuai dengan metodologi audit yang tepat, dan regulator mengasosiasikannya sebagai audit yang dilakukan sesuai dan memenuhi standar professional audit. Perspektif ini melihat kualitas audit dalam sudut pandang input, proses, output dan outcome seperti dalam kerangka kualitas audit dibawah ini.

Gambar 1. Kerangka Kualitas Audit



Sumber: Knechel & Shefchik (2002)

Tinggi rendahnya kualitas audit akan ditentukan oleh factor anteseden yang terdiri dari factor input (independen, pengetahuan dan pengalaman, serta sikap skeptisme profesional dari auditor) dan factor proses (proses audit, tingkat materialitas, penilaian risiko, system penjaminan mutu kantor akuntan public). Sebagai hasilnya, kualitas audit dapat dilihat dari factor outcome berupa tidak adanya penyajian kembali laporan keuangan, tidak adanya litigasi hukum terhadap auditor, laporan keuangan yang akurat, kualitas pelaporan keuangan dan hasil review mutu regulator terhadap kantor akuntan public (Knechel & Shefchik, 2002). Maka berdasarkan beragam defenisi diatas, dapat diketahui

bahwa secara substansi, kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk mengumpulkan dan memberikan judgement terhadap bukti audit (kompetensi) secara tepat (sesuai dengan standar audit berterima umum-GAAS), mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam sistem akuntansi (independen). Komponen kompetensi dan independensi secara bersamaan akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas bagi pemakai laporan keuangan auditan atau *stakeholder*. Auditor diharapkan memiliki kemampuan dalam memperoleh bukti yang memadai dan memberikan penilaian secara professional. (Arens, Elder, & Beasley, 2012).

Kompetensi dan independensi auditor merupakan dimensi dari kualitas audit yang akan dihasilkan. Secara lebih detail, FRC's Audit Quality Framework menyebutkan 5 kunci utama dari wujudnya kualitas audit yaitu budaya KAP, skill dan kualitas personal partner dan staf, efektivitas proses audit, keandalan laporan auditan yang dihasilkan dan factor luar yang mempegaruhi auditor memberikan audit yang berkualitas (Johnstone, Gramling, & Rittenberg, 2014). Dalam bahasa berbeda, Warming-Rasmussen & Jensen (1998) kualitas audit ditentukan oleh aspek moral dan etis dari auditor. Lebih lanjut, dirincikan 6 dimensi dari kualitas audit yaitu kredibilitas personal, independensi auditor, keterbukaan pelaporan audit terkait tujuan manajemen dan stakeholder, pemahaman bisnis klien, loyalitas terhadap kepentingan minoritas dan sikap skeptic terhadap klien. Catanach (1999) juga menjelaskan bahwa dimensi kualitas audit dapat dilihat dari kemampuan deteksi (kompetensi) dan tindakan professional. Kemampuan deteksi tersebut berkaitan dengan kompetensi teknis, pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan, pengalaman terkait industry dan klien secara professional, kemampuan

adaptasi dan literasi terhadap teknologi. Sedangkan tindakan professional berhubungan dengan independensi, objektivitas, integritas, profesionalisme, bebas konflik kepentingan dan kemampuan memberikan keputusan. Sedangkan Duff (2004) mengklasifikan kualitas audit menjadi kualitas teknis dan kualitas layanan.

Kualitas teknis terkait dengan reputasi KAP, independensi, jasa non-audit, kepakaran dan pengalaman. Dan kualitas layanan berhubungan sikap responsif, empati dan melayani terhadap klien. Maka secara substansi, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh 3 dimensi utama yaitu kompetensi, independensi dan hubungan dengan klien. Kompetensi meliputi budaya KAP, skill, reputasi, kapabilitas, keahlian, pengalaman, kredibilitas, efektivitas proses audit. Independensi berhubungan dengan independensi, jasa non audit, keterbukaan pelaporan kepada para pihak, sikap skeptis terhadap klien. Sedangkan hubungan dengan klien meliputi responsiveness, empathy, client service, pengetahuan terhadap klien, dan loyalitas terhadap pemegang saham minoritas.

PCAOB Inspection adalah salah satu mekanisme dan proses penjagaan kualitas audit yang telah dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan yang listing di NYSE. PCAOB memiliki 4 program terkait yaitu *registration, inspections, standard setting and enforcement* (Carcello et al., 2011). Berdasarkan data yang dikutip Gunny (2013), per 2005, PCAOB telah melakukan inspeksi terhadap 895 inspeksi untuk 365 perikatan audit yang dilakukan oleh 9 KAP besar dan 623 audit yang dilakukan oleh 272 KAP kecil. Data terbaru 2011-2015, menunjukkan bahwa inspeksi atas 399 audit menemukan 79 atau 20% temuan terkait independensi, 336 audit atau 84% terkait pelanggaran aturan PCAOB (PCAOB, 2016). Inspeksi yang dilakukan berbasis risiko (*risk-based approach*) ini dilakukan atas perikatan yang ditenggarai risiko kegagalan audit yang tinggi (Carcello et al., 2011; DeFond, 2010; Gunny & Zhang, 2013). Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka dikatakan audit yang dilakukan telah berkualitas. Kualitas audit yang dimaksud menyangkut review atas kualitas proses pekerjaan audit yang dilakukan dan kualitas system

pengendalian mutu KAP (Gunny & Zhang, 2013).

Beberapa penelitian menemukan bahwa inspeksi yang dilakukan PCAOB mampu berkontribusi meningkatkan kualitas audit Big Four (Carcello et al., 2011; DeFond, 2010; DEFOND & LENNOX, 2015). Namun, penelitian lain juga menemukan hasil sebaliknya, inspeksi tidak berpengaruh pada peningkatan kualitas audit. Hal ini disebabkan inspeksi yang dilakukan secara global dan tidak disebutkan secara detil pelanggaran kualitas mutu yang dilakukan. Bahkan sebuah penelitian deskriptif atas KAP besar yang mengaudit lebih dari 100 klien dengan temuan 14 pelanggaran setiap tahunnya, tetap mendapat kritikan atas kualitas pengendalian mutu mereka setiap tahunnya (Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik, & Velury, 2013). Kualitas audit ditentukan oleh 2 (dua) factor utama yaitu kompetensi dan independensi (Arens et al., 2012). Salah satu indikator kompetensi auditor tersebut adalah skill (Johnstone et al., 2014), yang bisa dilihat dari lisensi atau sertifikasi profesi yang dimiliki (Yu-Shu et al., 2009). Afiliasi auditor dengan KAP seperti Big Four juga

akan menentukan kualitas audit yang dilakukan (Francis, J. R. and Yu, 2009). Pengendalian mutu dan infrastruktur Big Four dianggap mampu menjaga kualitas dan meningkatkan kompetensi auditor. Akhirnya akan juga mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan.

Umur auditor menggambarkan pengalaman yang dimiliki auditor tersebut. Indikator pengalaman auditor juga dianggap mampu meningkatkan kualitas audit (Aldhizer III, Miller, & Moraglio, 1995). Sedangkan gender adalah atribut yang mampu menentukan kualitas auditor, dimana wanita dianggap memiliki ketelitian, lebih konservatif, lebih mampu menjaga etika dan sangat perhitungan dengan risiko (*risk averse*). Ini akan menentukan kualitas audit yang dilakukan (Sultana, Singh, der Zahn, & Mitchell, 2015).

Maka berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah auditor characteristics akan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Karena kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan proksi jenis pelanggaran yang dilakukan auditor, maka hipotesis yang dibangun berdasarkan tujuan penelitiannya adalah auditor

characteristics memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan auditor.

H_1 = Jumlah lisensi auditor memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran

H_2 = Jenis kelamin auditor memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran

H_3 = Usia auditor memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran

H_4 = Afiliasi auditor memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji secara deskriptif dan asosiatif atas dinamika kualitas audit yang dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan dan dideteksi dalam inspeksi PCAOB.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari database PCAOB Settled Disciplinary yang ada di website PCAOB. Data penelitian menggunakan semua laporan rilis sanksi yang dikeluarkan PCAOB sejak tahun 2005 sampai Maret 2017. Batasan data dilakukan hanya dengan pertimbangan

ketersediaan data yang ada saat penelitian ini mulai dilakukan.

Jumlah laporan yang dikeluarkan sampai Maret 2017 berjumlah 205 dokumen laporan. Laporan yang dikeluarkan ada yang memuat sanksi untuk KAP dan auditor yang terlibat dan ada juga sanksi hanya untuk KAP saja, tanpa auditornya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sanksi yang diterima oleh auditor. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, jumlah auditor yang dikenakan sanksi mencapai 144 orang.

Sedangkan jumlah pelanggaran yang diidentifikasi dari auditor tersebut mencapai 252 pelanggaran. Ini disebabkan, seorang auditor bisa diidentifikasi melakukan lebih dari 1 pelanggaran. Variabel independen yang digunakan adalah auditor characteristics yang diukur dengan jumlah lisensi yang dimiliki, jenis kelamin, umur dan afiliasi KAP. Variabel dependen yang digunakan adalah kategori pelanggaran yang diidentifikasi oleh PCAOB terhadap auditor terkait.

Tabel 1. Mapping Pelanggaran oleh Auditor

Violations			
	1	Terlambat laporan dan iuran	Competence
	2	Prosedur audit tidak memadai	Competence
	3	Bukti audit tidak cukup dan memadai	Competence
	4	Tidak memenuhi prinsip due care dan professional sceptism	Competence
	5	Review partner atas pekerjaan tim tidak memadai	Competence
	6	Tidak kooperatif dengan pemeriksa	Competence
	7	Merubah kertas kerja	Competence
	8	Komunikasi dan review informasi KAP lain tidak memadai	Competence
	9	SPM KAP tidak efektif	Competence
	10	NAS/Independence	Independence

Tabel 2. Kategori Variabel Dependen

Kategori	Deskripsi Kategori
1	Salah satu pelanggaran dari aspek kompetensi dan independen
2	Melakukan 2 aspek pelanggaran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji asosiasi *auditor characteristics* terhadap kualitas audit. *Auditor characteristics* diukur dengan jumlah lisensi yang dimiliki, jenis umur, kelamin, dan afiliasi KAP yang dimodifikasi dari Sultana (2015). Sedangkan kualitas audit diukur menggunakan jenis pelanggaran yang dilakukan dan diidentifikasi oleh PCAOB *inspection* (Gunny & Zhang, 2013).

Variabel dependen yang digunakan memiliki skala data kategorik yang lebih dari dua. Maka, alat analisis yang digunakan untuk menyesuaikan karakteristik data variable dependen tersebut adalah *logistic regression*. *Logistik regression* tidak membutuhkan uji asumsi klasik (Hair, Anderson, Babin, & Black, 2010). Persamaan regresi yang

dibangun adalah $ToV = \beta_0 + \beta_1 Licences + \beta_2 Gender + \beta_3 Age + \beta_4 Affiliation + \epsilon$

Keterangan:

β_0 = intercept
 β_{1-4} = koefisien dari variable independen

Type of violations. Jenis pelanggaran yang dilakukan auditor dan diidentifikasi oleh

PCAOB sebagai dasar dalam pengenaan sanksi. Diukur dengan skala kategorik seperti dalam table sebelumnya.

= jumlah lisensi yang dimiliki oleh auditor yang bersangkutan. Diukur dengan jumlah lisensi yang dimiliki

= jenis kelamin dari auditor. Diukur dengan skala kategorik. 0 untuk notasi auditor wanita dan 1 untuk notasi auditor laki-laki.

= umur dari auditor yang bersangkutan. Diukur dengan skala kategorik 1 untuk notasi umur auditor dibawah 40 tahun; 2 untuk notasi umur auditor antara 40 sampai 60 tahun; dan 3 untuk notasi umur diatas 60 tahun.

= afiliasi auditor yang bersangkutan kepada KAP Big Four dan non Big Four. Diukur

ϵ = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara deksriptif, diketahui bahwa jumlah auditor yang dikenakan sanksi oleh PCAOB sejak 2005 terdiri dari 137 orang laki-laki (95%) dan 7 orang wanita (5%). Sedangkan dari aspek

umur auditor, mayoritas telah berusia 40-60 tahun, sebanyak 94 orang (65%), 15 orang berusia dibawah 40 tahun (10%) dan 35 orang auditor berusia lebih dari 60 tahun (24%).

Dilihat dari jumlah lisensi yang dimiliki oleh auditor, rata-rata memiliki 1 (satu) lisensi, mencerminkan 125 orang

(91%), sedangkan yang memiliki 2, 3, 4 dan 5 lisensi, masing-masing berjumlah 9 orang (7%), 3 orang (2%), 1 orang (1%) dan 1 orang (1%). Berdasarkan afiliasi KAP dari auditornya, mayoritas berasal dari non Big Four, sebanyak 125 orang (87%) dan sisanya 13% berasal dari auditor yang tergabung dalam Big Four.

Tabel 3. Deskriptif Data

Gender	0	Female	7	5%
	1	Male	137	95%
			144	

Age	1	<40years	15	10%
	2	40 - 60 years	94	65%
	3	>60 years	35	24%
			144	

Licenses	0	0 lisensi	5	3%
	1	1 lisensi	125	87%
	2	2 lisensi	9	6%
	3	3 lisensi	3	2%
	4	4 lisensi	1	1%
	5	5 lisensi	1	1%
			144	

Affiliation	0	Non-Big4	125	87%
	1	Big4	19	13%
			144	

Sedangkan deskripsi atas jenis pelanggaran yang dilakukan dan diidentifikasi oleh PCAOB adalah sebagai berikut. Tiga pelanggaran terbanyak yang dilakukan terkait dengan prosedur audit tidak memadai, bukti audit tidak cukup dan memadai, dan tidak memenuhi prinsip due care dan professional sceptism, masing-masing sebanyak

51 pelanggaran (20%), 46 pelanggaran (18%) dan 46 pelanggaran (18%).

Jenis pelanggaran lain yang juga banyak dilakukan adalah review partner atas pekerjaan tim tidak memadai, tidak kooperatif dengan pemeriksa, dan merubah kertas kerja. Pelanggaran tersebut terkait dengan elemen kompetensi dan penegakan etika oleh auditor

Tabel4. Kategori Pelanggaran yang Dilakukan

Violations	1	Terlambat laporan dan iuran	0	0%
	2	Prosedur audit tidak memadai	51	20%
	3	Bukti audit tidak cukup dan memadai	46	18%
	4	Tidak memenuhi prinsip due care dan professional sceptism	46	18%
	5	Review partner atas pekerjaan tim tidak memadai	30	12%
	6	Tidak kooperatif dengan pemeriksa	32	13%
	7	Merubah kertas kerja	24	10%
	8	Komunikasi dan review informasi KAP lain tidak memadai	0	0%
	9	SPM KAP tidak efektif	0	0%
	10	NAS/Independence	23	9%

Pelanggaran yang dilakukan oleh seperti yang terlihat dalam table berikut masing-masing auditor berbeda satu sama lain. Seorang auditor bisa saja dianggap telah melakukan pelanggaran dari 1 pelanggaran. Untuk sanksi yang diberikan oleh PCAOB atas pelanggaran tersebut, 16%.

Tabel 5. Sanksi yang diberikan PCAOB

Sanctions	1	Teguran	15	9%
	2	Moratorium pemberian jasa	20	12%
	3	Melarang pemberian jasa	103	62%
	4	Sanksi denda	27	16%
	5	Cabut izin registrasi	0	0%

Berdasarkan hasil uji logistic regression, mencerminkan masing-masing tingkat diketahui bahwa tidak ada 1 variabel yang kompetensi profesi yang dimiliki dan mampu menjelaskan tipe pelanggaran pengalaman auditor memiliki pengaruh yang dilakukan oleh auditor. Dengan batas signifikan secara negative atas tipe tingkat signifikansi 0.05, tidak ada pelanggaran yang dilakukan auditor. satupun variable yang memiliki nilai Artinya semakin banyak lisensi yang signifikansi lebih kecil dari 0.05. Namun, dimiliki dan panjang pengalaman auditor jika menggunakan batas signifikansi 0.1, cenderung melakukan pelanggaran yang maka variable licences dan umur yang lebih sedikit.

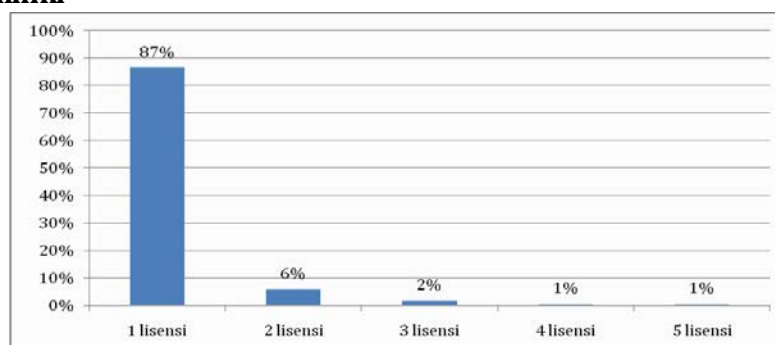
Tabel 6. Variable in Equation

Variable	β	Sig.
Dependen variable: violation in one from 2 aspect/violation in both aspect		
Independent variable		
Licences	-2.518	0.62
Gender	17.127	0.999
Age	1.535	0.092
Affiliation	-17.670	0.998
Constanta	-20.981	

Relatif berpengaruhnya jumlah diketahui bahwa pelanggaran yang lisensi atas jumlah pelanggaran yang dilakukan lebih banyak dilakukan oleh dilakukan dapat menjelaskan bahwa auditor yang memiliki 1 lisensi dan tingkat kompetensi yang diukur dengan semakin banyak lisensi, data jumlah lisensi professional mampu menunjukkan pelanggaran yang lebih meningkatkan kualitas audit dan menekan sedikit. Hal ini dapat dilihat dari grafik tingkat pelanggaran yang dilakukan. dibawahini.

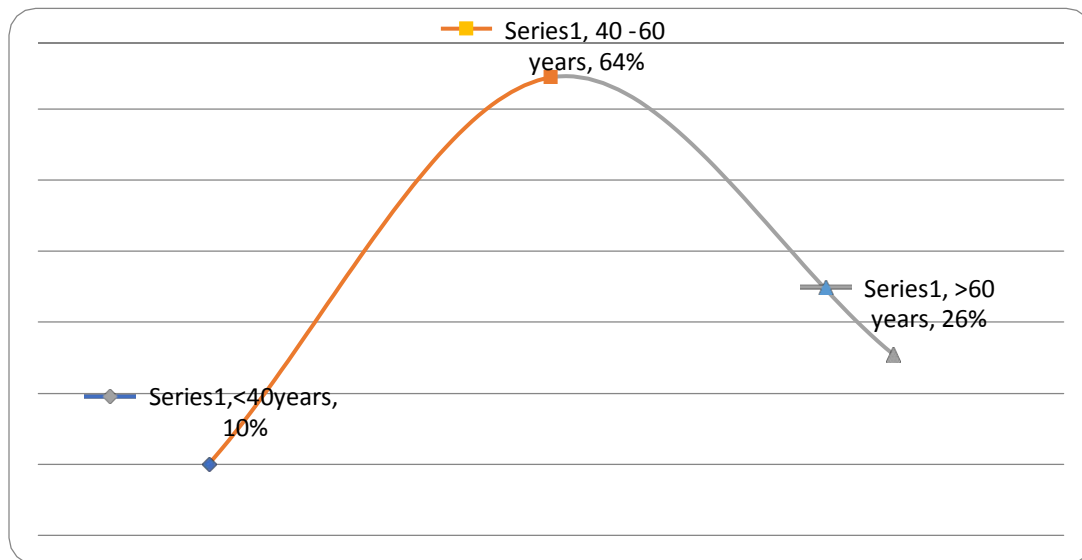
Berdasarkan data sampel yang dipilih,

Grafik 2. Pelanggaran yang dilakukan oleh auditor berdasarkan jumlah lisensi yang dimiliki



Umur auditor yang digunakan sebagai indicator lamanya pengalaman audit yang dimiliki auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang ditandai dengan sedikitnya pelanggaran yang dilakukan. Data yang ada menunjukkan bahwa pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh auditor yang memiliki umur 40-60 tahun seperti terlihat dalam grafik dibawah ini. Umur auditor tidak linier dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan auditor.

Grafik 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh auditor berdasarkan umur auditor



Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian(Carcello, Hermanson, & McGrath(1992) yang menemukan bahwa pengalaman auditor menjadi salah satu factor yang menentukan kualitas audit.

Terakhir, afiliasi auditor dengan KAP Big Four juga tidak memiliki pengaruh atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dijelaskan bahwa auditor Big Four juga melakukan pelanggaran banyak. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa 19 auditor Big Four telah

melakukan 32 pelanggaran yang diidentifikasi oleh PCAOB. Artinya, seorang auditor melakukan lebih dari 1 pelanggaran.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Francis, J. R. and Yu(2009) yang menemukan bahwa auditor Big Four memberikan kualitas audit yang lebih baik. Sebuah penelitian deskriptif atas KAP besar yang mengaudit lebih dari 100 klien dengan temuan 14 pelanggaran setiap tahunnya, tetap mendapat kritikan

atas kualitas pengendalian mutu mereka

setiap tahunnya (Knechel et al., 2013).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini tidak mampu menunjukkan bahwa auditor characteristic yang diukur dengan menggunakan jumlah lisensi, gender, umur dan afiliasi KAP memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang ditunjukkan dengan semakin sedikitnya pelanggaran yang dilakukan. Keterbatasan data penelitian ditengarai ikut berkontribusi dalam hasil penelitian ini. Penelitian berikutnya diharapkan bisa mempertajam indicator variable auditor characteristic yang ada dan dengan jumlah data yang lebih banyak.

REFERENSI

- Aldhizer III, G. R., Miller, J. R., & Moraglio, J. F. (1995). Common attributes of quality audits. *Journal of Accountancy*, 179(1), 61. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/206770113?accountid=26357>
- Arens, A. a, Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Service An Integrated Approach* (14th Editi). New Jersey: Prentice Hall.
- Ball, R. A. Y. (2009). Market and Political

/ Regulatory on the Recent Perspectives Accounting Scandals. *Journal of Accounting Research*, 47(2), 277–323. <http://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2009.00325.x>

- Barlaup, K., Dronen, I. H., & Stuart, I. (2009). Restoring Trust in Auditing: Ethical Discernment and The Adelphia Scandal. *Managerial Auditing Journal*, 24(2), 183–203. <http://doi.org/10.1108/02686900910924572>
- Breesch, D., & Branson, J. (2009). The effects of auditor gender on audit quality. *IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices*, 8(3/4), 78.
- Carcello, J. V, Hermanson, R. H., & McGrath, N. T. (1992). Audit quality attributes: The perceptions of audit partners, preparers, and financial statement users. *Auditing*, 11(1), 1.
- Carcello, J. V, Hollingsworth, C., & Mastroliia, S. A. (2011). The effect of PCAOB inspections on Big 4 audit quality. *Research in Accounting Regulation*, 23(2), 85–96.

- Catanach, A. H., & Walker, P. L. (1999). The international debate over mandatory auditor rotation: A conceptual research framework. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 8(1), 43–66. [http://doi.org/10.1016/S1061-9518\(99\)00004-X](http://doi.org/10.1016/S1061-9518(99)00004-X)
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [http://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](http://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- DeFond, M. L. (2010). How should the auditors be audited? Comparing the PCAOB inspections with the AICPA peer reviews. *Journal of Accounting and Economics*, 49(1), 104–108.
- Defond, M. L., & Francis, J. R. (2005). Audit Research after Sarbanes-Oxley. *AUDITING: A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY*, 24(Supplement 2005), 5–30.
- Defond, M. L., & Lennox, C. S. (2015). Do PCAOB Inspections Improve the Quality of Internal Control Audits? *Journal of Accounting Research*.
- <http://doi.org/10.1111/1475-679X.12151>
- Duff, A. (2004). *Auditqual: Dimensions of Audit Quality*. Edinburgh.
- Francis, J. R. and Yu, M. D. (2009). Big4 Office size and Audit Quality. *Accounting Review*, 84(5), 1521–1552. <http://doi.org/10.2308/accr.2009.84.5.1521>
- Gunny, K. A., & Zhang, T. C. (2013). PCAOB inspection reports and audit quality. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(2), 136–160.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., & Black, W. C. (2010). *Multivariate data analysis: A global perspective* (Vol. 7). Pearson Upper Saddle River, NJ.
- Hay, D., Knechel, R., & Willekens, M. (2014). *The Routledge Companion to Auditing*. Oxon & New York: Routledge. <http://doi.org/10.4324/9780203096512.ch21>
- Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A., & Wallage, P. (2005). *Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*(Second Edi). England:

- Prentice Hall.
- Johnstone, K. M., Gramling, A. A., & Rittenberg, L. E. (2014). *A Risk based Approach to Conducting a Quality Audit* (Ninth Edit). South-Western: Cengage Learning.
- Knechel, W. R., Krishnan, G. V., Pevzner, M., Shefchik, L. B., & Velury, U. K. (2013). Audit Quality: Insights from the Academic Literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 32(April 2012), 385–421. <http://doi.org/10.2308/ajpt-50350>
- Knechel, W. R., & Shefchik, L. B. (2002). Audit quality. In *The Routledge Companion to Auditing* (pp. 130–146). Routledge.
- Messier, W. F. (2009). *Auditing, Trust and Governance: Developing Regulation in Europe*. *European Accounting Review* (Vol. 18). <http://doi.org/10.1080/09638180902924548>
- Palmrose, Z.-V. (1988). An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality. *The Accounting Review*, 63(1), 55–73. <http://doi.org/10.2307/247679>
- PCAOB. (2016). *Annual Report On The Interim Inspection Program Related To Audits Of Brokers And Dealers Pcaob Release No. 2016-004 August 18, 2016*. Washington.
- Reichelt, K. J., & Wang, D. (2010). National and office-specific measures of auditor industry expertise and effects on audit quality. *Journal of Accounting Research*, 48(3), 647–686.
- Soltani, B. (2007). *Auditing An International Approach*. England: Pearson Education Limited.
- Sultana, N., Singh, H., der Zahn, V., & Mitchell, J.-L. (2015). Audit committee characteristics and audit report lag. *International Journal of Auditing*, 19(2), 72–87.
- Warming-Rasmussen, B., & Jensen, L. (1998). Quality dimensions in external audit services -- an external user perspective. *European Accounting Review*, 7(1), 65–82. <http://doi.org/10.1080/096381898336583>
- Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit Quality: a Synthesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature*, 23, 153.

Retrieved from auditor quality and human capital.
[http://proquest.umi.com/pqdlink?di
d=820921231&Fmt=7&clientId=1
6532&RQT=309&VName=PQD](http://proquest.umi.com/pqdlink?did=820921231&Fmt=7&clientId=16532&RQT=309&VName=PQD) *Managerial Auditing Journal*,
24(6), 523–541.
[http://doi.org/10.1108/0268690091
0966512](http://doi.org/10.1108/02686900910966512)
Yu-Shu, C., Yi-Pei, L., & Chu-Yang, C.
(2009). The association between

164AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Vol. 1, No. 2, September 2017

<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat>

p-ISSN: 2549-5658 e-ISSN: 2549-7243

DOI: 10.22236/agregat_vol1/is2pp145-163

Hal 146-163

165AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 1, No. 2, September 2017
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/agregat_vol1/is2pp145-163
Hal 145-163

AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 1, No. 2, September 2017
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat>
p-ISSN: 2549-5658 e-ISSN: 2549-7243
DOI: 10.22236/agregat_vol1/is2pp145-163
Hal 146-163

DINAMIKA KUALITAS AUDIT: *AUDITOR CHARACTERISTICS* DAN PCAOB *INSPECTIONS*

Sepky Mardian

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI)

Email: sepky.mardian@gmail.com

Diterima: 17 Juli 2017; Direvisi: 24 Juli 2017; Disetujui: 7 Agustus 2017

Abstract

This study aimed to find the effects of auditor characteristics on audit quality. Audit characteristic measured by auditor licences, gender, age and audit firm affiliation. While the audit quality proxied by auditor violations conducted by auditor and identified by PCAOB. The data collected from PCAOB Settled Disciplinary listed by PCAOB in its website. Logistic regression is used to test the hypothesis. The study found that all variables did not effect the auditor characteristics on audit quality.

Keywords: Auditor characteristic, audit quality, PCAOB inspections.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak karakteristik auditor terhadap kualitas audit. Karakteristik audit diindikasikan dengan lisensi auditor, jenis kelamin, usia dan afiliasi Kantor Akuntan Publik. Sedangkan kualitas audit diproksikan dengan pelanggaran yang dilakukan auditor dan diidentifikasi oleh PCAOB. Data dikumpulkan dari daftar PCAOB *Settled Disciplinary* yang dipublikasikan di website PCAOB. Logistic regression digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa semua variable tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kata Kunci: Karakteristik auditor, kualitas audit, inspeksi PCAOB.

PENDAHULUAN

Gelombang skandal akuntansi dan keuangan tersebar dengan cepat dan masif; “menggulung” banyak hal termasuk kehilangan reputasi atas profesi audit, hukuman atas lebih dari 1.000 eksekutif, meruntuhkan kebanggaan kantor akuntan publik dan memaksa regulator untuk memperketat aturan seperti lahirnya Sarbane Oxley Act (SOX) 2002 dan melahirkan institusi pengawasan baru seperti Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (Ball, 2009; Barlaup, Dronen, & Stuart, 2009; Defond & Francis, 2005; Yu-Shu, Yi-Pei, & Chu-Yang, 2009).

Dalam perspektif berbeda, skandal ini bisa dimaknai sebagai berita “baik” atau berita “buruk” (Defond & Francis, 2005). Ini menjadi berita baik karena mampu menunjukkan bahwa pasar memiliki mekanisme sendiri dalam memberikan penalti dan menghambat segala bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku (Ball, 2009) dan meningkatkan *awareness* dari *stakeholder* baik regulator, asosiasi, praktisi, investor, dan pembaca laporan keuangan lainnya atas proses audit (Defond & Francis, 2005). Berita buruknya, kegagalan audit ini memberikan tantangan baru bagi

auditor karena *stakeholder* sudah semakin kritis atas proses audit, independensi dan kompetensi dari auditor (Barlaup et al., 2009; Defond & Francis, 2005).

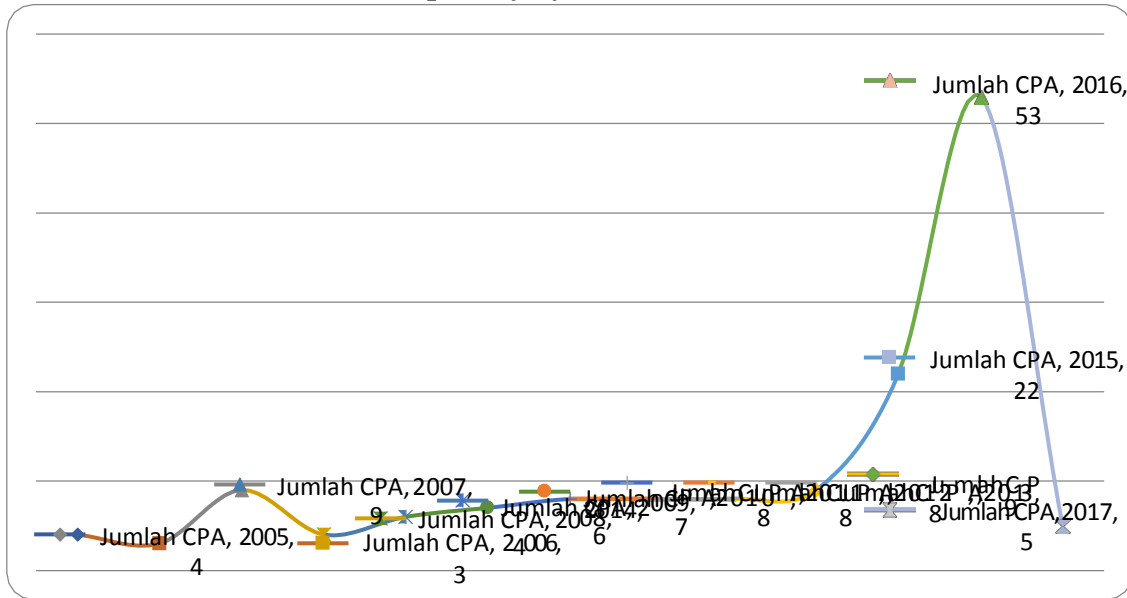
Di Amerika Serikat (USA), PCAOB semakin memberikan perhatian lebih atas proses audit dalam menjaga kepentingan publik atas laporan keuangan. Secara spesifik, PCAOB melakukan pengawasan atas proses audit yang dilakukan kantor akuntan publik, menjaga kepentingan investor dan publik dengan memastikan laporan audit yang informatif, akurat dan independen (Carcello, Hollingsworth, & Mastroliia, 2011). Lebih teknis, PCAOB melakukan penilaian atas kualitas audit yang berhubungan kompetensi professional partner, kompensasi, penugasan tanggung jawab, program pelatihan tim audit, kepatuhan atas standar independensi, penerimaan dan penolakan klien dan ketersediaan system pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) (Yu-Shu et al., 2009).

Berdasarkan data yang dirilis PCAOB tentang sanksi yang diberikan kepada auditor dan KAP yang melakukan perikatan atas perusahaan yang listing di New York Stock Exchange (NYSE), ada peningkatan dan pengetatan penegakan aturan oleh PCAOB. Hal ini terlihat dari

peningkatan jumlah sanksi yang diberikan di grafik di bawah ini.

dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat

Grafik 1. PCAOB Settled Disciplinary by Year



Sumber: PCAOB, 2017

Pelanggaran yang dilakukan auditor dan KAP yang menjadi dasar pemberian sanksi oleh PCAOB dapat diringkas dalam bentuk (1) keterlambatan penyampain laporan audit dan iuran registrasi; (2) prosedur audit yang tidak memadai; (3) bukti audit yang tidak cukup dan kompeten; (4) tidak memenuhi prinsip due care dan professional sceptism; (5) review partner atas pekerjaan tim tidak memadai; (6) tidak kooperatif dengan pemeriksa; (7) merubah kertas kerja; (8) komunikasi dan review informasi KAP lain tidak memadai; (9) Standar Pengendalian Mutu (SPM) KAP tidak

efektif; dan (10) memberikan jasa NAS/ tidak independen. Sedangkan, sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan adalah (1) teguran; (2) moratorium pemberian jasa; (3) pelarangan pemberian jasa; (4) sanksi denda; dan (5) pencabutan izin registrasi.

Belum ada konsensus terkait defenisi dari kualitas audit (Hay, Knechel, & Willekens, 2014). Tetapi, secara umum, kualitas audit diasosiasikan dengan resiko audit yang terkait potensi kegagalan auditor dalam memodifikasi opininya terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Watkins,

Hillison, & Morecroft, 2004). Defenisi kualitas audit yang sering dirujuk adalah seperti yang dijelaskan oleh DeAngelo (1981) sebagai, *the market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) report the breach*. Dalam substansi yang relatif sama, berikut adalah pengertian dari kualitas audit.

Palmrose (1988), mendefenisikan kualitas audit sebagai tingkat assurans – keyakinan auditor- atas potensi laporan keuangan mengandung salah saji material.

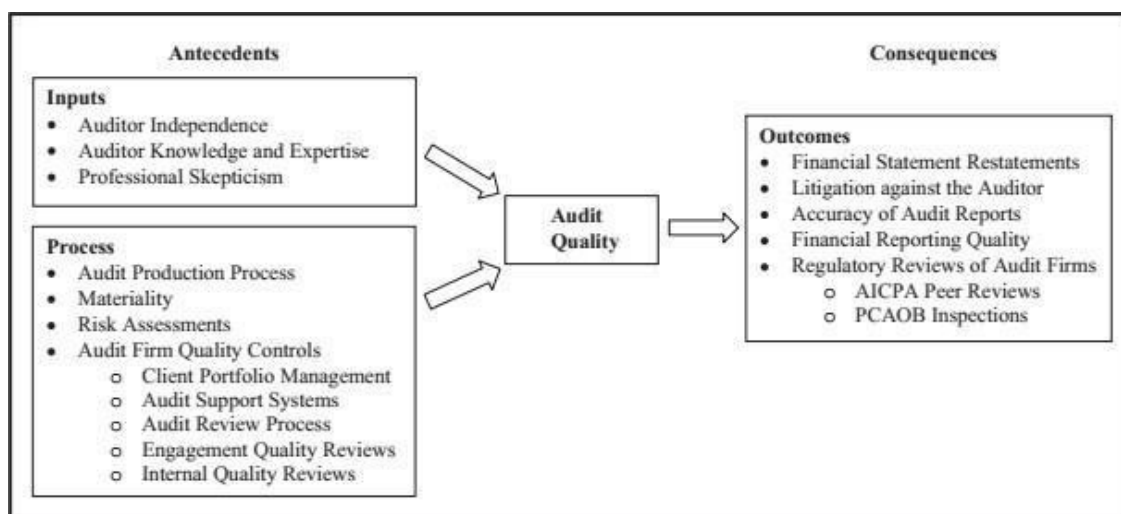
Soltani (2007), mendefenisikannya sebagai potensi atau kemungkinan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan penyimpangan material dalam system akuntansi. Eilifsen and Willekens (Messier, 2009) menjelaskan bahwa dalam literature audit, kualitas audit biasanya dikaitkan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan (kompetensi) dan keinginannya untuk mengeluarkan opini yang tepat dan sesuai dengan temuan tersebut (independensi)

Lebih detil Hayes, et.al. (2005) menjelaskan bahwa kualitas audit ada

yang bersifat teknikal dan fungsional. Kualitas audit teknis berhubungan dengan audit yang dapat memenuhi ekspektasi pemakai laporan terhadap pendeteksian dan Pelaporan salah saji dan penyimpangan dalam laporan keuangan. Sedangkan kualitas audit fungsional berkaitan dengan proses dalam mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pemakai laporan.

Dalam perspektif kerangka kualitas audit yang lebih komprehensif, Knechel & Shefchik (2002) menyebutkan bahwa kualitas audit akan dipersepsikan berbeda sesuai dengan perbedaan sudut pandang stakeholder terhadap proses pelaporan keuangan. Pembaca laporan keuangan mempersepsikan kualitas audit sebagai laporan keuangan yang bebas salah saji maerial, auditor mendefenisikan kualitas audit tercapai jika proses audit dilakukan sesuai dengan metodologi audit yang tepat, dan regulator mengasosiasikannya sebagai audit yang dilakukan sesuai dan memenuhi standar professional audit. Perspektif ini melihat kualitas audit dalam sudut pandang input, proses, output dan outcome seperti dalam kerangka kualitas audit dibawah ini.

Gambar 1. Kerangka Kualitas Audit



Sumber: Knechel & Shefchik (2002)

Tinggi rendahnya kualitas audit akan ditentukan oleh factor anteseden yang terdiri dari factor input (independen, pengetahuan dan pengalaman, serta sikap skeptisme profesional dari auditor) dan factor proses (proses audit, tingkat materialitas, penilaian risiko, system penjaminan mutu kantor akuntan public). Sebagai hasilnya, kualitas audit dapat dilihat dari factor outcome berupa tidak adanya penyajian kembali laporan keuangan, tidak adanya litigasi hukum terhadap auditor, laporan keuangan yang akurat, kualitas pelaporan keuangan dan hasil review mutu regulator terhadap kantor akuntan public (Knechel & Shefchik, 2002). Maka berdasarkan beragam defenisi diatas, dapat diketahui

bahwa secara substansi, kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk mengumpulkan dan memberikan judgement terhadap bukti audit (kompetensi) secara tepat (sesuai dengan standar audit berterima umum-GAAS), mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam sistem akuntansi (independen). Komponen kompetensi dan independensi secara bersamaan akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas bagi pemakai laporan keuangan auditan atau *stakeholder*. Auditor diharapkan memiliki kemampuan dalam memperoleh bukti yang memadai dan memberikan penilaian secara professional. (Arens, Elder, & Beasley, 2012).

Kompetensi dan independensi auditor merupakan dimensi dari kualitas audit yang akan dihasilkan. Secara lebih detail, FRC's Audit Quality Framework menyebutkan 5 kunci utama dari wujudnya kualitas audit yaitu budaya KAP, skill dan kualitas personal partner dan staf, efektivitas proses audit, keandalan laporan auditan yang dihasilkan dan factor luar yang mempegaruhi auditor memberikan audit yang berkualitas (Johnstone, Gramling, & Rittenberg, 2014). Dalam bahasa berbeda, Warming-Rasmussen & Jensen (1998) kualitas audit ditentukan oleh aspek moral dan etis dari auditor. Lebih lanjut, dirincikan 6 dimensi dari kualitas audit yaitu kredibilitas personal, independensi auditor, keterbukaan pelaporan audit terkait tujuan manajemen dan stakeholder, pemahaman bisnis klien, loyalitas terhadap kepentingan minoritas dan sikap skeptic terhadap klien. Catanach (1999) juga menjelaskan bahwa dimensi kualitas audit dapat dilihat dari kemampuan deteksi (kompetensi) dan tindakan professional. Kemampuan deteksi tersebut berkaitan dengan kompetensi teknis, pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan, pengalaman terkait industry dan klien secara professional, kemampuan

adaptasi dan literasi terhadap teknologi. Sedangkan tindakan professional berhubungan dengan independensi, objektivitas, integritas, profesionalisme, bebas konflik kepentingan dan kemampuan memberikan keputusan. Sedangkan Duff (2004) mengklasifikasikan kualitas audit menjadi kualitas teknis dan kualitas layanan.

Kualitas teknis terkait dengan reputasi KAP, independensi, jasa non-audit, kepakaran dan pengalaman. Dan kualitas layanan berhubungan sikap responsif, empati dan melayani terhadap klien. Maka secara substansi, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh 3 dimensi utama yaitu kompetensi, independensi dan hubungan dengan klien. Kompetensi meliputi budaya KAP, skill, reputasi, kapabilitas, keahlian, pengalaman, kredibilitas, efektivitas proses audit. Independensi berhubungan dengan independensi, jasa non audit, keterbukaan pelaporan kepada para pihak, sikap skeptis terhadap klien. Sedangkan hubungan dengan klien meliputi responsiveness, empathy, client service, pengetahuan terhadap klien, dan loyalitas terhadap pemegang saham minoritas.

PCAOB Inspection adalah salah satu mekanisme dan proses penjagaan kualitas audit yang telah dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan yang listing di NYSE. PCAOB memiliki 4 program terkait yaitu *registration, inspections, standard setting and enforcement* (Carcello et al., 2011). Berdasarkan data yang dikutip Gunny (2013), per 2005, PCAOB telah melakukan inspeksi terhadap 895 inspeksi untuk 365 perikatan audit yang dilakukan oleh 9 KAP besar dan 623 audit yang dilakukan oleh 272 KAP kecil. Data terbaru 2011-2015, menunjukkan bahwa inspeksi atas 399 audit menemukan 79 atau 20% temuan terkait independensi, 336 audit atau 84% terkait pelanggaran aturan PCAOB (PCAOB, 2016). Inspeksi yang dilakukan berbasis risiko (*risk-based approach*) ini dilakukan atas perikatan yang ditenggarai risiko kegagalan audit yang tinggi (Carcello et al., 2011; DeFond, 2010; Gunny & Zhang, 2013). Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka dikatakan audit yang dilakukan telah berkualitas. Kualitas audit yang dimaksud menyangkut review atas kualitas proses pekerjaan audit yang dilakukan dan kualitas system

pengendalian mutu KAP (Gunny & Zhang, 2013).

Beberapa penelitian menemukan bahwa inspeksi yang dilakukan PCAOB mampu berkontribusi meningkatkan kualitas audit Big Four (Carcello et al., 2011; DeFond, 2010; DEFOND & LENNOX, 2015). Namun, penelitian lain juga menemukan hasil sebaliknya, inspeksi tidak berpengaruh pada peningkatan kualitas audit. Hal ini disebabkan inspeksi yang dilakukan secara global dan tidak disebutkan secara detil pelanggaran kualitas mutu yang dilakukan. Bahkan sebuah penelitian deskriptif atas KAP besar yang mengaudit lebih dari 100 klien dengan temuan 14 pelanggaran setiap tahunnya, tetap mendapat kritikan atas kualitas pengendalian mutu mereka setiap tahunnya (Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik, & Velury, 2013). Kualitas audit ditentukan oleh 2 (dua) factor utama yaitu kompetensi dan independensi (Arens et al., 2012). Salah satu indikator kompetensi auditor tersebut adalah skill (Johnstone et al., 2014), yang bisa dilihat dari lisensi atau sertifikasi profesi yang dimiliki (Yu-Shu et al., 2009). Afiliasi auditor dengan KAP seperti Big Four juga

akan menentukan kualitas audit yang dilakukan (Francis, J. R. and Yu, 2009). Pengendalian mutu dan infrastruktur Big Four dianggap mampu menjaga kualitas dan meningkatkan kompetensi auditor. Akhirnya akan juga mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan.

Umur auditor menggambarkan pengalaman yang dimiliki auditor tersebut. Indikator pengalaman auditor juga dianggap mampu meningkatkan kualitas audit (Aldhizer III, Miller, & Moraglio, 1995). Sedangkan gender adalah atribut yang mampu menentukan kualitas auditor, dimana wanita dianggap memiliki ketelitian, lebih konservatif, lebih mampu menjaga etika dan sangat perhitungan dengan risiko (*risk averse*). Ini akan menentukan kualitas audit yang dilakukan (Sultana, Singh, der Zahn, & Mitchell, 2015).

Maka berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah auditor characteristics akan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Karena kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan proksi jenis pelanggaran yang dilakukan auditor, maka hipotesis yang dibangun berdasarkan tujuan penelitiannya adalah auditor

characteristics memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan auditor.

H_1 = Jumlah lisensi auditor memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran

H_2 = Jenis kelamin auditor memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran

H_3 = Usia auditor memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran

H_4 = Afiliasi auditor memiliki pengaruh negative terhadap jenis pelanggaran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji secara deskriptif dan asosiatif atas dinamika kualitas audit yang dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan dan dideteksi dalam inspeksi PCAOB.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari database PCAOB Settled Disciplinary yang ada di website PCAOB. Data penelitian menggunakan semua laporan rilis sanksi yang dikeluarkan PCAOB sejak tahun 2005 sampai Maret 2017. Batasan data dilakukan hanya dengan pertimbangan

ketersediaan data yang ada saat penelitian ini mulai dilakukan.

Jumlah laporan yang dikeluarkan sampai Maret 2017 berjumlah 205 dokumen laporan. Laporan yang dikeluarkan ada yang memuat sanksi untuk KAP dan auditor yang terlibat dan ada juga sanksi hanya untuk KAP saja, tanpa auditornya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sanksi yang diterima oleh auditor. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, jumlah auditor yang dikenakan sanksi mencapai 144 orang.

Sedangkan jumlah pelanggaran yang diidentifikasi dari auditor tersebut mencapai 252 pelanggaran. Ini disebabkan, seorang auditor bisa diidentifikasi melakukan lebih dari 1 pelanggaran. Variabel independen yang digunakan adalah auditor characteristics yang diukur dengan jumlah lisensi yang dimiliki, jenis kelamin, umur dan afiliasi KAP. Variabel dependen yang digunakan adalah kategori pelanggaran yang diidentifikasi oleh PCAOB terhadap auditor terkait.

Tabel 1. Mapping Pelanggaran oleh Auditor

Violations			
	1	Terlambat laporan dan iuran	Competence
	2	Prosedur audit tidak memadai	Competence
	3	Bukti audit tidak cukup dan memadai	Competence
	4	Tidak memenuhi prinsip due care dan professional sceptism	Competence
	5	Review partner atas pekerjaan tim tidak memadai	Competence
	6	Tidak kooperatif dengan pemeriksa	Competence
	7	Merubah kertas kerja	Competence
	8	Komunikasi dan review informasi KAP lain tidak memadai	Competence
	9	SPM KAP tidak efektif	Competence
	10	NAS/Independence	Independence

Tabel 2. Kategori Variabel Dependen

Kategori	Deskripsi Kategori
1	Salah satu pelanggaran dari aspek kompetensi dan independen
2	Melakukan 2 aspek pelanggaran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji asosiasi *auditor characteristics* terhadap kualitas audit. *Auditor characteristics* diukur dengan jumlah lisensi yang dimiliki, jenis umur, kelamin, dan afiliasi KAP yang dimodifikasi dari Sultana (2015). Sedangkan kualitas audit diukur menggunakan jenis pelanggaran yang dilakukan dan diidentifikasi oleh *PCAOB inspection* (Gunny & Zhang, 2013).

Variabel dependen yang digunakan memiliki skala data kategorik yang lebih dari dua. Maka, alat analisis yang digunakan untuk menyesuaikan karakteristik data variable dependen tersebut adalah *logistic regression*. *Logistik regression* tidak membutuhkan uji asumsi klasik (Hair, Anderson, Babin, & Black, 2010). Persamaan regresi yang

dibangun adalah $ToV = \beta_0 + \beta_1 Licences + \beta_2 Gender + \beta_3 Age + \beta_4 Affiliation + \epsilon$

Keterangan:

dengan skala kategorik. 0 untuk notasi afiliasi dengan KAP non Big Four dan 1 untuk notasi afiliasi dengan KAP Big Four.

β_0 = intercept

β_{1-4} = koefisien dari variable independen

= Type of violations. Jenis pelanggaran yang dilakukan auditor dan diidentifikasi oleh

PCAOB sebagai dasar dalam pengenaan sanksi. Diukur dengan skala kategorik seperti dalam table sebelumnya.

= jumlah lisensi yang dimiliki oleh auditor yang bersangkutan. Diukur dengan jumlah lisensi yang dimiliki

= jenis kelamin dari auditor. Diukur dengan skala kategorik. 0 untuk notasi auditor wanita dan 1 untuk notasi auditor laki-laki.

= umur dari auditor yang bersangkutan. Diukur dengan skala kategorik 1 untuk notasi umur auditor dibawah 40 tahun; 2 untuk notasi umur auditor antara 40 sampai 60 tahun; dan 3 untuk notasi umur diatas 60 tahun.

= afiliasi auditor yang bersangkutan kepada KAP Big Four dan non Big Four. Diukur

ϵ = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara deksriptif, diketahui bahwa jumlah auditor yang dikenakan sanksi oleh *PCAOB* sejak 2005 terdiri dari 137 orang laki-laki (95%) dan 7 orang wanita (5%). Sedangkan dari aspek

umur auditor, mayoritas telah berusia 40-60 tahun, sebanyak 94 orang (65%), 15 orang berusia dibawah 40 tahun (10%) dan 35 orang auditor berusia lebih dari 60 tahun (24%).

Dilihat dari jumlah lisensi yang dimiliki oleh auditor, rata-rata memiliki 1 (satu) lisensi, mencerminkan 125 orang

(91%), sedangkan yang memiliki 2, 3, 4 dan 5 lisensi, masing-masing berjumlah 9 orang (7%), 3 orang (2%), 1 orang (1%) dan 1 orang (1%). Berdasarkan afiliasi KAP dari auditornya, mayoritas berasal dari non Big Four, sebanyak 125 orang (87%) dan sisanya 13% berasal dari auditor yang tergabung dalam Big Four.

Tabel 3. Deskriptif Data

Gender	0	Female	7	5%
	1	Male	137	95%
			144	

Age	1	<40years	15	10%
	2	40 - 60 years	94	65%
	3	>60 years	35	24%
			144	

Licenses	0	0 lisensi	5	3%
	1	1 lisensi	125	87%
	2	2 lisensi	9	6%
	3	3 lisensi	3	2%
	4	4 lisensi	1	1%
	5	5 lisensi	1	1%
			144	

Affiliation	0	Non-Big4	125	87%
	1	Big4	19	13%
			144	

Sedangkan deskripsi atas jenis pelanggaran yang dilakukan dan diidentifikasi oleh PCAOB adalah sebagai berikut. Tiga pelanggaran terbanyak yang dilakukan terkait dengan prosedur audit tidak memadai, bukti audit tidak cukup dan memadai, dan tidak memenuhi prinsip due care dan professional sceptism, masing-masing sebanyak

51 pelanggaran (20%), 46 pelanggaran (18%) dan 46 pelanggaran (18%).

Jenis pelanggaran lain yang juga banyak dilakukan adalah review partner atas pekerjaan tim tidak memadai, tidak kooperatif dengan pemeriksa, dan merubah kertas kerja. Pelanggaran tersebut terkait dengan elemen kompetensi dan penegakan etika oleh auditor

Tabel4. Kategori Pelanggaran yang Dilakukan

Violations	1	Terlambat laporan dan iuran	0	0%
	2	Prosedur audit tidak memadai	51	20%
	3	Bukti audit tidak cukup dan memadai	46	18%
	4	Tidak memenuhi prinsip due care dan professional sceptism	46	18%
	5	Review partner atas pekerjaan tim tidak memadai	30	12%
	6	Tidak kooperatif dengan pemeriksa	32	13%
	7	Merubah kertas kerja	24	10%
	8	Komunikasi dan review informasi KAP lain tidak memadai	0	0%
	9	SPM KAP tidak efektif	0	0%
	10	NAS/Independence	23	9%

Pelanggaran yang dilakukan oleh seperti yang terlihat dalam table berikut masing-masing auditor berbeda satu sama lain. Seorang auditor bisa saja dianggap telah melakukan pelanggaran dari 1 pelanggaran. Untuk sanksi yang diberikan oleh PCAOB atas pelanggaran tersebut, 16%.

Tabel 5. Sanksi yang diberikan PCAOB

Sanctions	1	Teguran	15	9%
	2	Moratorium pemberian jasa	20	12%
	3	Melarang pemberian jasa	103	62%
	4	Sanksi denda	27	16%
	5	Cabut izin registrasi	0	0%

Berdasarkan hasil uji logistic regression, mencerminkan masing-masing tingkat diketahui bahwa tidak ada 1 variabel yang kompetensi profesi yang dimiliki dan mampu menjelaskan tipe pelanggaran pengalaman auditor memiliki pengaruh yang dilakukan oleh auditor. Dengan batas signifikan secara negative atas tipe tingkat signifikansi 0.05, tidak ada pelanggaran yang dilakukan auditor. satupun variable yang memiliki nilai Artinya semakin banyak lisensi yang signifikansi lebih kecil dari 0.05. Namun, dimiliki dan panjang pengalaman auditor jika menggunakan batas signifikansi 0.1, cenderung melakukan pelanggaran yang maka variable licences dan umur yang lebih sedikit.

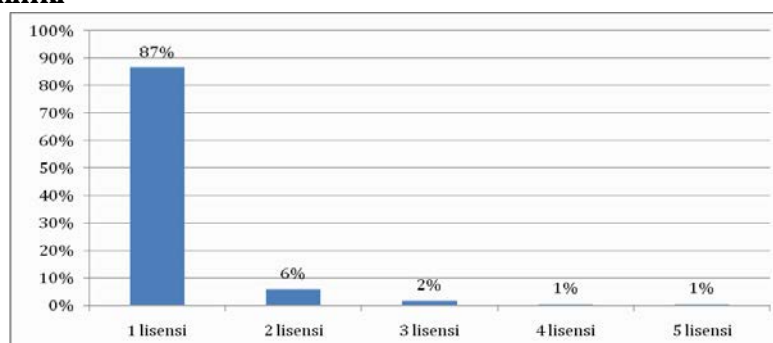
Tabel 6. Variable in Equation

Variable	β	Sig.
Dependen variable: violation in one from 2 aspect/violation in both aspect		
Independent variable		
Licences	-2.518	0.62
Gender	17.127	0.999
Age	1.535	0.092
Affiliation	-17.670	0.998
Constanta	-20.981	

Relatif berpengaruhnya jumlah diketahui bahwa pelanggaran yang lisensi atas jumlah pelanggaran yang dilakukan lebih banyak dilakukan oleh dilakukan dapat menjelaskan bahwa auditor yang memiliki 1 lisensi dan tingkat kompetensi yang diukur dengan semakin banyak lisensi, data jumlah lisensi professional mampu menunjukkan pelanggaran yang lebih meningkatkan kualitas audit dan menekan sedikit. Hal ini dapat dilihat dari grafik tingkat pelanggaran yang dilakukan. dibawahini.

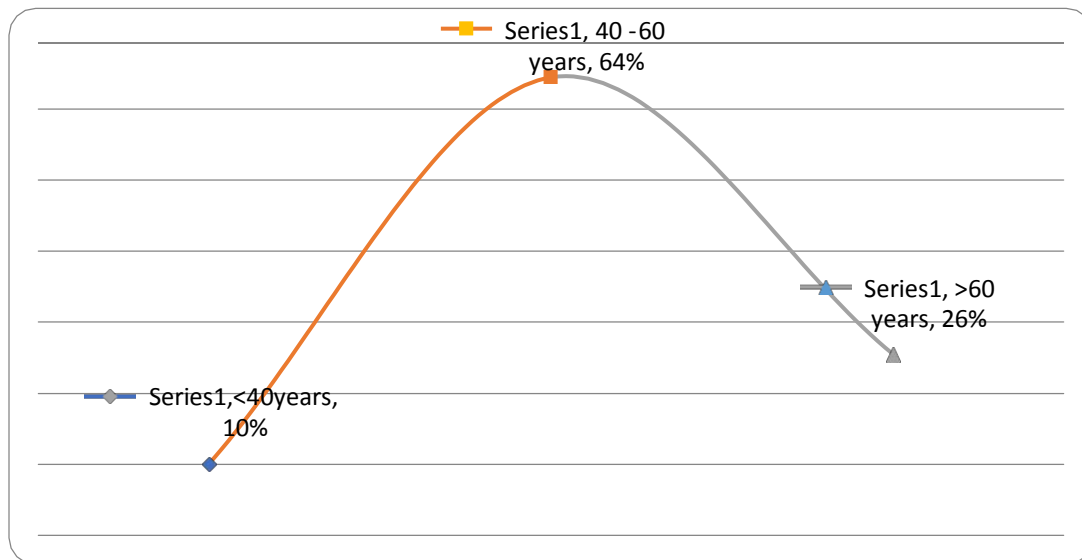
Berdasarkan data sampel yang dipilih,

Grafik 2. Pelanggaran yang dilakukan oleh auditor berdasarkan jumlah lisensi yang dimiliki



Umur auditor yang digunakan sebagai indicator lamanya pengalaman audit yang dimiliki auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang ditandai dengan sedikitnya pelanggaran yang dilakukan. Data yang ada menunjukkan bahwa pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh auditor yang memiliki umur 40-60 tahun seperti terlihat dalam grafik dibawah ini. Umur auditor tidak linier dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan auditor.

Grafik 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh auditor berdasarkan umur auditor



Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian(Carcello, Hermanson, & McGrath(1992) yang menemukan bahwa pengalaman auditor menjadi salah satu factor yang menentukan kualitas audit.

Terakhir, afiliasi auditor dengan KAP Big Four juga tidak memiliki pengaruh atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini dijelaskan bahwa auditor Big Four juga melakukan pelanggaran banyak. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa 19 auditor Big Four telah

melakukan 32 pelanggaran yang diidentifikasi oleh PCAOB. Artinya, seorang auditor melakukan lebih dari 1 pelanggaran.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Francis, J. R. and Yu(2009) yang menemukan bahwa auditor Big Four memberikan kualitas audit yang lebih baik. Sebuah penelitian deskriptif atas KAP besar yang mengaudit lebih dari 100 klien dengan temuan 14 pelanggaran setiap tahunnya, tetap mendapat kritikan

atas kualitas pengendalian mutu mereka

setiap tahunnya (Knechel et al., 2013).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini tidak mampu menunjukkan bahwa auditor characteristic yang diukur dengan menggunakan jumlah lisensi, gender, umur dan afiliasi KAP memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang ditunjukkan dengan semakin sedikitnya pelanggaran yang dilakukan. Keterbatasan data penelitian ditengarai ikut berkontribusi dalam hasil penelitian ini. Penelitian berikutnya diharapkan bisa mempertajam indicator variable auditor characteristic yang ada dan dengan jumlah data yang lebih banyak.

REFERENSI

- Aldhizer III, G. R., Miller, J. R., & Moraglio, J. F. (1995). Common attributes of quality audits. *Journal of Accountancy*, 179(1), 61. Retrieved from <http://search.proquest.com/docview/206770113?accountid=26357>
- Arens, A. a, Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2012). *Auditing and Assurance Service An Integrated Approach* (14th Editi). New Jersey: Prentice Hall.
- Ball, R. A. Y. (2009). Market and Political

/ Regulatory on the Recent Perspectives Accounting Scandals.

Journal of Accounting Research, 47(2), 277–323. <http://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2009.00325.x>

- Barlaup, K., Dronen, I. H., & Stuart, I. (2009). Restoring Trust in Auditing: Ethical Discernment and The Adelpphia Scandal. *Managerial Auditing Journal*, 24(2), 183–203. <http://doi.org/10.1108/02686900910924572>
- Breesch, D., & Branson, J. (2009). The effects of auditor gender on audit quality. *IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices*, 8(3/4), 78.
- Carcello, J. V, Hermanson, R. H., & McGrath, N. T. (1992). Audit quality attributes: The perceptions of audit partners, preparers, and financial statement users. *Auditing*, 11(1), 1.
- Carcello, J. V, Hollingsworth, C., & Mastroliia, S. A. (2011). The effect of PCAOB inspections on Big 4 audit quality. *Research in Accounting Regulation*, 23(2), 85–96.

- Catanach, A. H., & Walker, P. L. (1999). The international debate over mandatory auditor rotation: A conceptual research framework. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 8(1), 43–66. [http://doi.org/10.1016/S1061-9518\(99\)00004-X](http://doi.org/10.1016/S1061-9518(99)00004-X)
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [http://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](http://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- DeFond, M. L. (2010). How should the auditors be audited? Comparing the PCAOB inspections with the AICPA peer reviews. *Journal of Accounting and Economics*, 49(1), 104–108.
- Defond, M. L., & Francis, J. R. (2005). Audit Research after Sarbanes-Oxley. *AUDITING: A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY*, 24(Supplement 2005), 5–30.
- Defond, M. L., & Lennox, C. S. (2015). Do PCAOB Inspections Improve the Quality of Internal Control Audits? *Journal of Accounting Research*.
- <http://doi.org/10.1111/1475-679X.12151>
- Duff, A. (2004). *Auditqual: Dimensions of Audit Quality*. Edinburgh.
- Francis, J. R. and Yu, M. D. (2009). Big4 Office size and Audit Quality. *Accounting Review*, 84(5), 1521–1552. <http://doi.org/10.2308/accr.2009.84.5.1521>
- Gunny, K. A., & Zhang, T. C. (2013). PCAOB inspection reports and audit quality. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(2), 136–160.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., & Black, W. C. (2010). *Multivariate data analysis: A global perspective* (Vol. 7). Pearson Upper Saddle River, NJ.
- Hay, D., Knechel, R., & Willekens, M. (2014). *The Routledge Companion to Auditing*. Oxon & New York: Routledge. <http://doi.org/10.4324/9780203096512.ch21>
- Hayes, R., Dassen, R., Schilder, A., & Wallage, P. (2005). *Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*(Second Edi). England:

- Prentice Hall.
- Johnstone, K. M., Gramling, A. A., & Rittenberg, L. E. (2014). *A Risk based Approach to Conducting a Quality Audit* (Ninth Edit). South-Western: Cengage Learning.
- Knechel, W. R., Krishnan, G. V., Pevzner, M., Shefchik, L. B., & Velury, U. K. (2013). Audit Quality: Insights from the Academic Literature. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 32(April 2012), 385–421. <http://doi.org/10.2308/ajpt-50350>
- Knechel, W. R., & Shefchik, L. B. (2002). Audit quality. In *The Routledge Companion to Auditing* (pp. 130–146). Routledge.
- Messier, W. F. (2009). *Auditing, Trust and Governance: Developing Regulation in Europe*. *European Accounting Review* (Vol. 18). <http://doi.org/10.1080/09638180902924548>
- Palmrose, Z.-V. (1988). An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality. *The Accounting Review*, 63(1), 55–73. <http://doi.org/10.2307/247679>
- PCAOB. (2016). *Annual Report On The Interim Inspection Program Related To Audits Of Brokers And Dealers Pcaob Release No. 2016-004 August 18, 2016*. Washington.
- Reichelt, K. J., & Wang, D. (2010). National and office-specific measures of auditor industry expertise and effects on audit quality. *Journal of Accounting Research*, 48(3), 647–686.
- Soltani, B. (2007). *Auditing An International Approach*. England: Pearson Education Limited.
- Sultana, N., Singh, H., der Zahn, V., & Mitchell, J.-L. (2015). Audit committee characteristics and audit report lag. *International Journal of Auditing*, 19(2), 72–87.
- Warming-Rasmussen, B., & Jensen, L. (1998). Quality dimensions in external audit services -- an external user perspective. *European Accounting Review*, 7(1), 65–82. <http://doi.org/10.1080/096381898336583>
- Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit Quality: a Synthesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature*, 23, 153.

Retrieved from auditor quality and human capital.
[http://proquest.umi.com/pqdlink?di
d=820921231&Fmt=7&clientId=1
6532&RQT=309&VName=PQD](http://proquest.umi.com/pqdlink?did=820921231&Fmt=7&clientId=16532&RQT=309&VName=PQD) *Managerial Auditing Journal*,
24(6), 523–541.
[http://doi.org/10.1108/0268690091
0966512](http://doi.org/10.1108/02686900910966512)
Yu-Shu, C., Yi-Pei, L., & Chu-Yang, C.
(2009). The association between

164AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Vol. 1, No. 2, September 2017

<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat>

p-ISSN: 2549-5658 e-ISSN: 2549-7243

DOI: 10.22236/agregat_vol1/is2pp145-163

Hal 146-163

165AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 1, No. 2, September 2017
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/agregat_vol1/is2pp145-163
Hal 145-163

ANALISA KEBIJAKAN DIVIDEN BERDASARKAN TEORI LINTNER

Ratna Damayanti, Fithri Setya Marwati, Rochmi Widayanti

Universitas Islam Batik Surakarta

Email : ratnadamaianti@gmail.com, fithri_marwati@yahoo.com,

rochmiwidayanti@gmail.com

Diterima: 24 Juli 2017; Direvisi: 31 Juli 2017; Disetujui: 14 Agustus 2017

Abstract

Dividends are important to the company as they relate to the allocation of revenues from corporate growth and wealth to shareholders. The purpose of this study is to analyze dividend policy proposed by Lintner stating that dividend policy is influenced by profitability and lagged dividend. The population of this study are companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2015. Samples taken as many as 133 companies. The sampling technique used purposive sampling technique. The analytical method used is multiple linear regression. The result of the research concludes that profitability and lagged dividend have significant positive influence to dividend policy.

Keyword : *Dividend Policy, Profit, Lagged Dividend*

Abstrak

Dividen merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena berkaitan dengan alokasi pendapatan dari pertumbuhan perusahaan dan kemakmuran bagi pemegang saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Lintner yang menyatakan bahwa kebijakan dividen dipengaruhi oleh profitabilitas dan lagged dividend. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Sampel yang diambil sebanyak 133 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa profitabilitas dan *lagged dividend* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen.

Kata Kunci : Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Lagged Dividend

PENDAHULUAN

Selama lebih dari lima dekade, kebijakan dividen merupakan topik yang senantiasa diperbincangkan dan diperdebatkandi dunia keuangan dan investasi. Banyak teori-teori yang bermunculan namun belum ada yang dapat menjelaskan perilaku dividen secara sempurna. Black (1976) menganalogikan bahwa kebijakan dividen merupakan sebuah *puzzle* yang berkelanjutan yaitu teka-teki yang sulit untuk dijelaskan dan menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak. Sampai sekarang *puzzle* mengenai kebijakan dividen belum terangkai sempurna dan menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat bagi banyak pihak.

Kebijakan dividen adalah penentuan berapakah jumlah laba yang harus diberikan kepada pemegang saham dan jumlah laba ditahan yang akan digunakan untuk investasi perusahaan (Brigham dan Davis, 2003). Kebijakan dividen merupakan faktor penting yang harus dipikirkan oleh perusahaan dalam mengelola perusahaan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan, pemegang saham, kreditur dan masyarakat (Thirtayatra dan Arlianto, 2013). Bagi perusahaan

pembagian dividen akan mengurangi kas perusahaan sehingga dana untuk kegiatan operasional dan investasi akan berkurang. Bagi pemegang saham, dividen merupakan bentuk pengembalian investasi yang mereka tanamkan. Perusahaan yang mampu membayar dividen tinggi akan menarik investor untuk menanamkan sahamnya sehingga nilai perusahaan meningkat. Bagi kreditur, dividen merupakan sinyal positif bahwa perusahaan mampu untuk membayar bunga dan pokok pinjaman. Masyarakat umum juga memandang bahwa perusahaan yang mampu membayar dividen adalah perusahaan yang memiliki kredibilitas baik. Para peneliti terdahulu telah mengembangkan beberapa model untuk menjelaskan perilaku dividen pada perusahaan. Beberapa model yang terkenal adalah model Lintner, Model Brittain, Model Pettit, Model Watt, Model Charest dan Model Aharony (Gupta dan Banga, 2010). Dari sekian banyak model dividen tersebut, model Lintner dinilai sebagai model terbaik yang menggambarkan proses dalam menyusun kebijakan dividen perusahaan (Adaoglu, 2000). Menurut Lintner, dividen merupakan fungsi dari profitabilitas dan dividen tahun

sebelumnya. Model Lintner lebih merujuk kepada perilaku perusahaan agar membagikan dividen secara stabil. Dari komponen model Lintner inilah maka variabel profitabilitas dan dividen tahun sebelumnya akan diangkat dalam penelitian dan diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan dividen di Indonesia.

Sutrisno (2001) mengungkapkan kebijakan dividen adalah kebijakan yang berhubungan dengan pembayaran dividen oleh pihak perusahaan, berupa penentuan besarnya dividen yang akan dibagikan dan besarnya saldo laba yang ditahan untuk kepentingan perusahaan. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba dalam bentuk dividen maka akan mengurangi sumber dana internal perusahaan. Sebaliknya apabila perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperolehnya maka kemampuan perusahaan untuk membentuk sumber dana internal perusahaan akan semakin besar. Terdapat 4 jenis alternatif pembayaran dividen (Sutrisno, 2001), yaitu,

Pembayaran dividen stabil yaitu perusahaan membayarkan dividen dalam jumlah yang relatif stabil untuk memiliki

payout ratio yang rendah pada saat profit tinggi dan memiliki *payout ratio* yang tinggi pada saat profit mengalami penurunan. Pembayaran dividen residual yaitu penentuan besarnya dividen dipengaruhi oleh ada tidaknya kesempatan investasi yang menguntungkan. Sejauh terdapat investasi yang menguntungkan maka dana yang diperoleh dari operasi perusahaan akan digunakan untuk investasi tersebut. Jika terdapat sisa barulah sisa tersebut dibagikan sebagai dividen. Jika diamati maka akan terlihat bahwa suatu perusahaan membagikan dividen sangat banyak karena tidak ada investasi yang menguntungkan, sedangkan ketika seluruh dana digunakan untuk investasi perusahaan tidak membagikan dividen sama sekali.

Pembayaran dividen dengan *payout ratio* yang konstan yaitu perusahaan memilih untuk mempertahankan persentase *payout* atas laba yang konstan. Dengan demikian apabila laba yang diperoleh berfluktuasi, maka dividen yang dibayarkan juga akan berfluktuasi. Pembayaran dividen reguler yang rendah disertai pembayaran ekstra yaitu pembayaran dividen dimana perusahaan menetapkan jumlah rupiah

minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik perusahaan akan membayar dividen ekstra diatas jumlah minimal tersebut. Dari ke 4 jenis alternatif pembayaran dividen tersebut, Pembayaran dividen yang stabil banyak dilakukan oleh perusahaan karena dapat memberikan kesan atau sinyal kepada investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dapat mengatasi ketidak pastian dalam pikiran pemegang saham karena dividen yang stabil memiliki risiko yang kecil. Membantu perusahaan dalam merencanakan alokasi anggaran perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Menarik investor institusional. Di beberapa negara, terdapat ketentuan bahwa perusahaan asuransi, bank tabungan dan dana pensiun hanya diijinkan menanamkan sahamnya pada perusahaan yang membayar dividennya secara stabil.

Profitabilitas telah digunakan didalam penelitian-penelitian sebelumnya sebagai indikator utama kemampuan perusahaan dalam membayar dividen (Lintner, 1956). Arilaha (2007) berpendapat bahwa profitabilitas adalah salah satu cara untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat

pengembalian yang diperoleh dari aktivitas investasi. Dengan kata lain bahwa profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas juga memiliki arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya karena semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut juga akan semakin terjamin. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan kemampuan dan sumber yang dimiliki. Rasio profitabilitas sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kontribusi keuntungan yang diperoleh dalam jangka pendek ataupun jangka panjang serta sebagai dasar dalam pembagian dividen kepada pemegang saham (Deitiana, 2011).

Pruitt dan Gitman (1991) mengungkapkan laba saat ini dan laba yang diperoleh perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pembayaran dividen.

Menurut Arilaha (2007), profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan yang stabil dapat menentukan tingkat pembayaran dividen dengan stabil sehingga memberikan sinyal bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik. Kebanyakan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen (Lintner, 1956; Fama dan Blahak, 1968; Arilaha, 2007; Al Kuwari, 2009; Martati, 2010; Haryetti dan Ekayanti, 2012). Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan keuntungan perusahaan. Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Semakin banyak keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan maka dividen yang dibayarkan juga semakin besar. Dengan demikian hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut : H_1 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen.

Lagged dividend adalah dividen yang dibayarkan 1 tahun sebelum tahun yang dipertimbangkan. *Lagged dividend* menunjukkan keinginan dari manajemen

perusahaan untuk mengikuti kebijakan dividen stabil. Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan disebabkan oleh asumsi bahwa investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek cerah. Hal ini membuat perusahaan cenderung untuk tidak menurunkan pembayaran dividen. Agar kebijakan dividen menjadi stabil maka perusahaan sebelum membagikan dividen tahun yang dipertimbangkan harus melihat *trend* kebijakan *dividend* tahun sebelumnya. Perusahaan yang enggan untuk merubah kebijakan *dividend*nya secara cepat, maka pembayaran dividen pada tahun sebelumnya dapat dipertimbangkan sebagai ukuran untuk menentukan kebijakan *dividend* tahun berjalan.

Hasil penelitian yang dilakukan Lintner (1956), Pandey (2003), Sura *et al* (2006), Martati (2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara *lagged dividend* dengan kebijakan dividen saat ini. *Lagged dividend* merupakan indikator stabil tidaknya kebijakan dividen perusahaan

karena mempertimbangkan *trend* kebijakan dividen tahun sebelumnya. Jika *lagged dividend* bernilai positif maka kebijakan dividen pada perusahaan tersebut stabil, begitu juga dengan sebaliknya. Dengan demikian hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_2 : *Lagged dividend* berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode tahun 2012-2015 yang berjumlah 539 perusahaan.

Tahun yang dipilih adalah tahun 2012-2015 karena berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka per tanggal 31 Desember 2012, tugas dan fungsi Bapepam LK akan berpindah ke OJK. Adanya perubahan struktur regulasi pada pasar modal di Indonesia akan mempengaruhi emiten dan investor ketika akan mengambil keputusan. Terlebih adanya wacana bahwa pada tahun 2013 BEI akan memberikan sanksi kepada emiten yang tidak membagikan laba bersihnya dalam bentuk dividen.

Desain pengambilan sampel yang digunakan adalah non probabilitas dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. *Purposive sampling* memiliki arti bahwa sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu dari peneliti. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut

:Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menyampaikan laporan keuangannya per 31 Desember pada tahun 2012, per 31 Desember pada tahun 2013, 31 Desember pada tahun 2014 dan 31 Desember pada tahun 2015. Perusahaan yang konsisten membagikan dividen tunai kepada pemegang saham berturut-turut mulai tahun 2012, 2013, 2014, 2015.

Perusahaan yang didalam laporan keuangannya menyajikan data secara lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini yaitu : Kebijakan dividen (DPS), profitabilitas (EPS) dan *lagged dividend* (DPS_{t-1}). Berdasarkan kriteria *purposive sampling*, maka jumlah sampel yang memenuhi syarat penelitian adalah sejumlah 133 perusahaan.

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

atau melalui media lain. Sumber data perusahaan yang terdaftar di BEI dan data laporan keuangan perusahaan tahun 2012- 2015 diperoleh dari *Indonesia Stocks Exchange* (IDX). Data perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen periode 2012-2015 diperoleh melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Variabel dependen adalah kebijakan dividen yang akan diukur dengan *Dividend Per Share* (DPS).

$$\text{Dividend Per Share} = \frac{\text{Total dividen yang dibagikan}}{\text{Jumlah lembar saham yang beredar}}$$

Variabel independen untuk penelitian ini adalah profitabilitas yang akan diukur dengan *Earning Per Share* dan *lagged dividend* yang akan diukur dengan *Dividen Per Share*_{t-1}. Pengujian hipotesis yang ada pada penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan model :

$$Y = f(X)$$

$$DPS_t = f(EPSt, DPSt-1)$$

$$DPS_t = b_0 + b_1EPSt + b_2DPSt-1 + e$$

Y = Variabel dependen, yaitu kebijakan dividen yang diukur dengan *Dividen Per Share* tahun berjalan (DPS_t)

X = Variabel independen yang terdiri dari profitabilitas yang diukur dengan *Earning*

Per Share tahun berjalan (EPS_t), *lagged dividend* yang diukur dengan *Dividen Per Share* tahun sebelumnya (DPS_{t-1})

- b₀ = Konstanta
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi
- e = *Error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Hasil Uji Model Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t hitung	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0.266	0.100			
LnEPS _t	0.272	0.27	0.260	9.912	0,000
LnDPS _{t-1}	0.710	0.25	0.738	28.097	0,000

Sehingga model persamaannya menjadi :

$$\text{Ln DPS}_t = 0.272\text{LnEPS}_t + 0.710\text{LnDPS}_{t-1} - 0.266$$

Tabel 1, menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Ln EPS adalah 0,272 signifikan pada 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai *alpha* sebesar 5% sehingga H₀ ditolak dan H₁ diterima, dan dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen.

Nilai koefisien regresi Ln DPS_{t-1} adalah 0,710 signifikan pada 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai *alpha* sebesar 5% sehingga H₀ ditolak dan H₂ diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa *lagged dividend* berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen.

Earning Per Share (EPS_t) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Dividend Per Share* (DPS_t). Hal ini menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintner (1956), Pandey (2003), Eriotis (2005), Bawa dan Kaur (2012) dan Martati (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar laba yang berhasil diraih perusahaan maka semakin besar pula porsi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Pengaruh positif profitabilitas terhadap kebijakan dividen perusahaan yang terdaftar di BEI 2012-2015 mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Aivazian (2003) yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara *emerging market* menunjukkan perilaku dividen yang sama dengan perusahaan-perusahaan di negara Amerika Serikat yang dapat dijelaskan melalui pengaruh rasio profitabilitas dan rasio *market to book*. Menurut Lintner

(1956), profitabilitas mutlak diperlukan oleh perusahaan ketika hendak membagikan dividen. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil dicapai perusahaan dalam menjalankan operasionalnya sedangkan dividen merupakan sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, dividen akan dibagikan kepada pemegang saham jika perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada para pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban tetapnya yaitu beban bunga dan pajak. Profitabilitas perusahaan juga merupakan faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan direksi, walaupun untuk membayar dividen perusahaan rugipun dapat melaksanakannya, karena adanya cadangan dalam bentuk laba ditahan. Namun demikian hubungan antara keuntungan perseroan dengan keputusan dividen masih merupakan suatu hubungan yang vital.

Perusahaan juga akan selalu berusaha meningkatkan citra perusahaan dengan cara setiap peningkatan laba akan diikuti dengan peningkatan porsi laba yang dibagi sebagai dividen. Hal ini akan mendorong terjadinya

peningkatan nilai saham perusahaan karena dengan mengumumkan adanya peningkatan dividen, maka investor ataupun calon investor akan menganggap kondisi perusahaan saat ini dan di masa mendatang memiliki prospek yang baik. Para investor berpikir karena tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin meningkat maka perusahaan dapat menetapkan pembayaran dividen yang meningkat pula.

Dividend Per Share tahun sebelumnya (DPS_{t-1}) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Dividend Per Share* (DPS_t). Hal ini menyimpulkan bahwa variabel *lagged dividend* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2015. Dengan kata lain bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2015 dalam membagikan dividennya menganut kebijakan dividen stabil. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintner (1956), Pandey (2003), Eriotis (2005), Bawa dan Kaur (2012) dan Martati (2010) yang menyatakan bahwa agar kebijakan dividen

menjadi stabil maka perusahaan sebelum membagikan dividen tahun yang dipertimbangkan harus melihat *trend* kebijakan dividen tahun sebelumnya. Nilai konstanta pada model regresi yang menunjukkan angka positif 0.710 mengartikan bahwa manager perusahaan enggan menurunkan pembayaran dividen karena mereka percaya bahwa penurunan dividen akan memberikan sinyal negatif perusahaan di pasar.

Pengumuman dividen mengandung informasi yang berguna bagi investor dalam memperkirakan prospek perusahaan di masa mendatang. Ketika investor tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai perusahaan (misalkan laporan keuangan yang kurang jelas), maka mereka akan mencari informasi lain mengenai aksi yang dilakukan oleh perusahaan yang salah satunya melalui kebijakan dividen. Investor dapat menganalisa perilaku manager untuk memberikan informasi mengenai keputusan apakah mereka akan membeli atau menjual saham, menawar dengan harga tinggi jika dividen bernilai positif atau menjual saham ketika ternyata dividen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal inilah yang

menyebabkan manager mengetahui bahwa pemegang saham ternyata memperhatikan pengumuman dividen sebagai berita yang bagus atau buruk. Oleh sebab itu manager cenderung menghindari sinyal negatif pasar mengenai prospek perusahaan di masa depan. Misalkan saja pada saat pendapatan perusahaan menurun dan perusahaan tidak menurunkan dividennya maka pasar akan lebih percaya pada saham perusahaan tersebut dibandingkan dengan saham perusahaan yang langsung menurunkan dividennya ketika pendapatan perusahaan juga menurun.

Dengan membagikan dividen secara stabil, manajemen perusahaan dapat menyampaikan pandangan bahwa dalam jangka panjang perusahaan akan menjadi lebih baik dari kondisi pada saat pendapatan menurun. Agar dividen yang dibagikan mengikuti kebijakan dividen stabil, maka dalam memutuskan kebijakan dividen perusahaan tahun berjalan harus mempertimbangkan besar dividen tahun sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah yang pertama

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen di Indonesia dan yang kedua adalah bahwa *lagged dividend* berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen di Indonesia.

Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen yaitu profitabilitas dan *lagged dividend* sehingga menyebabkan kemampuan variabel-variabel tersebut dalam menjelaskan kebijakan dividen dinilai masih kurang. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen selain profitabilitas dan *lagged dividend* yang diduga mempengaruhi kebijakan dividen.

Berkaitan dengan wacana akan diberlakukannya peraturan mengenai pembagian dividen oleh Bursa Efek Indonesia, sebaiknya emiten meninjau kembali kebijakan dividen yang telah dilakukan oleh perusahaan selama ini supaya terhindar dari sanksi.

REFERENSI

Adaoglu, C. (2000). Instability in the Dividend Policy of the Istanbul Stock Exchange (ISE) Corporations: Evidence from an

- Emerging Market. *Emerging Markets Review*. 1: 252-270.
- Al-Kuwari, D. (2009). Determinants of the Dividend Policy in Emerging Stock Exchanges: The Case of GCC Countries. *Global Economy & Finance Journal*. 2 (2): 38-63.
- Aivazian, V., dan L. Booth. (2002). Do Emerging Market Firms Follow Different Dividend Policies From US Firms?. *The Journal of Financial Research*. 26 (3) : 371-387.
- Arilaha, M.A. (2007). Pengaruh Free Cash Flow, Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 13 (1) :78-87.
- Bawa, S.K., dan P. Kaur.(2012). *Empirical Validity of Dividend Policy Model in The Indian Manufacturing MSMEs*. Internastional Journal of Multidisciplinary Management Studies. 2 (1) :18-39.
- Black, F. (1976). The Dividend Puzzle. *Journal of Portfolio Management*. 2:5-8.
- Brigham, E. F., dan P. R. Davis. (2003). *Intermediate Financial Management 8ed*. United States : South Western, Thomson
- Deitiana, T. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan dan Dividen Terhadap Harga Saham. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 13 (1) : 57-66.
- Eriotis, N. (2005). Dividend Policy : An Empirical Analysis og The Greek Market. *International Bussiness and Economics Research Journal*. 4 (1) : 67-74.
- Fama, E.F., dan Babiak, H. (1968). Dividend Policy: An Empirical Analysis. *Journal of the American Statistical Association*. 63 (324) :1132-1161.
- Gupta, A., dan C. Banga. (2010). The Determinants of Corporate Policy. *Decision*. 37 (2) : 63-77.
- Haryetti., dan R. L. Ekayanti. (2012). Pengaruh Profitabilitas, Investment Opportunity Set, dan Pertumbuhan

- Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi*. 20 (3): 1-18.
- Lintner, J. (1956). Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and taxes. *American Economic Review*. 46 (2) : 97-113.
- Martati, I. (2010). Faktor Penentu *Dividend Per Share* Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksis*. 6 (2) : 1440-1605.
- Pandey, I. M. (2003). Corporate Dividend Policy and Behaviour : The Malaysian Evidence. *Asian Academy of Management Journal*. 8 (1) : 17-32.
- Pruitt, S. W., dan L. J. Gitman. (1991). The Interaction Between Investment, Financing and Dividend Decisions of Major US Firms. *Financial Review*. 26 (3) :409-430.
- Sura, J.S; Karam. P; dan B.S. Bodla. (2012). Factors Influencing Dividend Policy Decision in Banking Sector : An Indian Evidence. *Amity Business Review*. 7 (2) : 64-76.
- Sutrisno. (2001). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio. *TEMA*. 2 (1) :11- 18.
- Thirtayatra, I.M.B., dan L. Arlianto. (2008). Kebijakan Dividen. *Warta Bapepam-LK, Edisi Juli 2008*.http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/warta/warta.html. Diakses : April, 1, (2016).

YANG MEMPENGARUHI PERDAGANGAN INDONESIA DI KAWASAN AMERIKA LATIN

Sulthon Sjahril Sabaruddin

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a

Email: sulthon.sjahril@kemlu.go.id

Diterima: 18 Juli 2017; Direvisi: 26 Juli 2017; Disetujui: 15 Agustus 2017

Abstract

This study tries to identify what factors influence the trade relations of Indonesia in Latin America with the approach of gravity model. The results of multiple regression analysis indicate that there are 4 (four) variables that affect the trade performance are: GDP Latin American countries, ex colonial countries of the Netherlands (ie Suriname), the existence of the Embassy and Latin American Embassy in Indonesia, as well as the number of MoU have positive effect on bilateral trade performance. From the results of the analysis can be concluded the initial expectation that the geographical distance into one of the obstacles in improving the trade relations of the Latin-American Republic to be less precise. In contrast, historical and emotional closeness factors appear to positively affect the trade relations between Indonesia and Latin America. This can be seen from Suriname, as a former colony of the Netherlands have a positive influence on trade relations between Indonesia and Suriname. In addition, the existence of the Embassy in Latin American countries and Latin American Embassy in Indonesia have a positive effect on the performance of RI-Latin America trade relations.

Keywords : Factors of Indonesia's trade relations in Latin America, trade performance,

Abstrak

Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Latin dengan pendekatan model gravitasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap kinerja perdagangan yaitu: GDP negara-negara Amerika Latin, negara eks jajahan Belanda (yaitu Suriname), keberadaan KBRI dan Kedubes Amerika Latin di Indonesia, serta jumlah MoU berpengaruh positif terhadap kinerja perdagangan bilateral. Dari hasil analisis dapat disimpulkan dugaan awal bahwa jarak geografis menjadi salah satu faktor hambatan dalam meningkatkan hubungan perdagangan RI-Amerika Latin menjadi kurang tepat. Sebaliknya, faktor kedekatan historis dan emosional tampak berpengaruh positif terhadap hubungan perdagangan RI-Amerika Latin. Hal ini dapat terlihat dari Suriname, sebagai negara eks jajahan Belanda berpengaruh positif terhadap hubungan perdagangan RI-Suriname. Selain itu, keberadaan KBRI di negara-negara Amerika Latin dan Kedubes Amerika Latin di Indonesia berpengaruh positif terhadap kinerja hubungan perdagangan RI-Amerika Latin.

Kata Kunci: Faktor hubungan perdagangan Indonesia di Amerika Latin, kinerja perdagangan

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin telah terjalin sejak lama. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menempatkan 11 Perwakilan RI (setingkat Kedutaan Besar Republik Indonesia) yang tersebar di berbagai negara di kawasan Amerika Latin dan telah memiliki hubungan diplomatik dengan 32 negara Amerika Latin dengan rincian: 8 negara di kawasan Amerika Tengah, 12 negara di kawasan Amerika Selatan, dan 13 negara di kawasan Karibia.

Beberapa negara Amerika Latin yang telah menjadi sahabat tua Indonesia adalah: Brasil dan Meksiko (sejak tahun 1956), Argentina (1956), Venezuela (1959), Kuba (1960), Bolivia (1963), Chile, dan Uruguay (1965). Bahkan Pemerintah Indonesia sejak era Demokrasi Terpimpin (1959-1966) telah membuka beberapa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Amerika Latin yaitu: Mexico City (Meksiko), Buenos Aires (Argentina), La Habana (Kuba), dan Rio de Janeiro (Brasil) (Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1971). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah membuka Kantor Perwakilan setingkat Konsul di Paramaribo,

Suriname. Pada masa Kepresidenan Soekarno, selama periode 1950an s/d 1960an, tercatat bahwa Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke negara-negara di kawasan Amerika Latin sebanyak 3 kali pada tahun 1959, 1960, dan 1961.

Kunjungan kenegaraan tersebut bertujuan untuk memperkuat rasa solidaritas antar negara-negara Selatan-Selatan pada masa dekolonisasi. Presiden Soekarno sendiri memiliki hubungan yang sangat dekat dengan beberapa tokoh terkemuka negara-negara Amerika Latin pada masa tersebut seperti Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Arturo Frondizi, dan Adolfo Lopez Mateos. Dapat dikatakan bahwa pada masa kepemimpinan Soekarno, hubungan diplomatik di bidang politik dengan negara-negara Amerika Latin merupakan masa-masa keemasan. Sayangnya hubungan erat dan sangat bersahabat di bidang politik ini tidak diikuti dengan pengembangan hubungan ekonomi RI-Amerika Latin. Memasuki era Kepresidenan Soeharto, pada awal masa rezim era akhir 1960an s/d akhir 1980an, kebijakan Pemerintahan Soeharto lebih terfokus pada pembenahan dan pembangunan ekonomi

dalam negeri dan kebijakan luar negeri pada era tersebut lebih pada pertimbangan dan kepentingan ekonomi bagi Indonesia. Dari segi kepentingan ekonomi, mengingat negara-negara Amerika Latin sendiri merupakan negara-negara berkembang dan pada saat bersamaan jugamereka justru menjadi pesaing dalam memperoleh bantuan luar negeri (*Official Development Assistance*) dari negara-negara maju, maka pada saat itu negara-negara di kawasan Amerika Latin tidak menjadi prioritas dalam politik luar negeri Indonesia.

Selain itu, hubungan RI-Amerika Latin lebih bersifat dingin dan formal mengingat era kepemimpinan Soeharto lebih condong ke arah Barat (terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat). Memasuki era akhir 1980an s/d 1998, agenda global mengenai diplomasi ekonomi semakin menjadi penting demi memajukan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di suatu negara (Bayne & Woolcock, 2011). Hal ini dapat terlihat semakin banyaknya kerjasama perdagangan (termasuk perjanjian perdagangan bebas) sehingga hubungan perdagangan semakin intens, besarnya arus investasi dan pariwisata antar negara, serta

meningkatnya arus tenaga kerja antar negara. Salah satu *event* besar pada era tersebut adalah berdirinya *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) pada tahun 1989 yang merupakan sebuah forum untuk mempererat hubungan ekonomi antar negara dan entitas di kawasan Samudera Pasifik yang meliputi kawasan Asia Timur dan kawasan Amerika. Pada masa tersebut, dari sisi kepentingan ekonomi semata, kedua pihak mulai saling melirik namun masih tetap menjadi prioritas kedua. Negara-negara Amerika Latin melirik kawasan Asia Timur, namun baru menganggap negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang menjadi prioritas dalam meningkatkan hubungan ekonomi di kawasan Asia Timur.

Kawasan Asia Tenggara masih dianggap *periphery* (sekunder) bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin. Sebaliknya, Indonesia sendiri juga mulai melirik kawasan Amerika Latin untuk kepentingan ekonomi semata yakni sebagai pasar alternatif (atau pasar non-tradisional) Indonesia demi tujuan diversifikasi tujuan portofolio ekspor dan pasar Indonesia. Namun memasuki era 1998-2004, pada

tahun 1998, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dan memasuki fase transisi beberapa tahun selanjutnya.

Demikian pula di beberapa negara Amerika Latin yang juga menghadapi fase krisis ekonomi dan politik antara lain: Meksiko (1994), Brasil (1999) dan Argentina (1998-2002). Alhasil kedua pihak masing-masing lebih terfokus pada pembenahan ekonomi dalam negeri, dan pada periode tersebut, secara umum hubungan ekonomi RI-Amerika Latin mengalami penurunan.

Memasuki era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama periode 2004-2014, hubungan ekonomi RI-Amerika Latin menjadi semakin intens. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan indikator ekonomi seperti nilai perdagangan dan besaran arus investasi belakangan ini. Lebih lanjut, tampaknya situasi ketidakpastian global akibat terjadinya resesi di Amerika Serikat dan di sejumlah negara-negara maju (terutama negara-negara di kawasan Eropa Barat) justru memicu inisiatif penguatan kerjasama ekonomi sesama negara-negara berkembang (negara-negara Selatan-Selatan) khususnya dengan tujuan mencari pasar potensial baru demi tujuan

diversifikasi ekspor dan portofolio pasar. Pada tahun 2004, nilai perdagangan RI-Amerika Latin sebesar US\$1.67 milyar dan pada tahun 2014 mencapai US\$7.12 milyar. Dari segi pangsa pasar, pangsa pasar perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Latin telah meningkat dari 1.77 persen (2004) menjadi 2.37 persen (2014). Pada tahun 2014, Brasil merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia yakni sebesar US\$4.05 milyar, diikuti Argentina (US\$1.7 milyar), Meksiko (US\$1.038 milyar), Chile (US\$419 juta), Peru (US\$277 juta), Kolombia (US\$154 juta), Panama (US\$148 juta), dan Ekuador (US\$132 juta). Lebih lanjut, belakangan ini terdapat setidaknya dua inisiatif perdagangan Indonesia dengan negara mitra dagang di kawasan Amerika Latin yaitu Chile (*Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dan Peru (*Indonesia-Peru Free Trade Agreement*).

Saat ini, dua inisiatif tersebut masih pada tahap peninjauan dan negosiasi. Bilamana peninjauan dan negosiasi perdagangan telah rampung, maka, diharapkan hubungan perdagangan dapat semakin meningkat di masa mendatang. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi,

salah satu prioritas politik luar negeri

Indonesia adalah diplomasi ekonomi.

Presiden Jokowi menargetkan surplus perdagangan dalam diplomasi ekonominya

serta memasarkan potensi Indonesia dan

mendukung usaha-usaha kecil menengah

Indonesia agar dapat menembus pasar

internasional, sehingga diharapkan ke

depanseluruh perwakilan RI di luar negeri

dapat menjadi *agent of economic promotion*

(*salesperson*) di luar negeri (Harruma, 2015).

Dalam mendukung kinerja diplomasi ekonomi Indonesia, studi ini mencoba mengidentifikasi dan menelaah faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi hubungan

perdagangan Indonesia di kawasan Amerika

Latin. Diharapkan dengan teridentifikasinya

faktor-faktor penentu hubungan

perdagangan RI-Amerika Latin ini, dapat

memperkaya sebagai catatan dan rujukan

awal dalam mengambil sikap, langkah dan

kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia

yang lebih tepat. Selain itu, studi ini

diharapkan dapat memperkaya studi

literatur ilmiah mengenai diplomasi

ekonomi khususnya diplomasi ekonomi

Indonesia dan studi kawasan khususnya

mengenai kawasan Amerika Latin.

METODE PENELITIAN

Belakangan ini hubungan ekonomi RI-

Amerika Latin semakin meningkat, salah

satunya dapat dilihat dari peningkatan nilai

perdagangan Indonesia dengan negara-

negara Amerika Latin selama periode 1989-

2014. Kawasan Amerika Latin memiliki

potensi yang sangat besar, salah satunya

yaitu kekayaan sumber daya alam. Negara-

negara di kawasan merupakan salah satu

produsen utama hasil pertanian dan

peternakan seperti kacang kedelai, susu,

daging ayam, sapi dan babi, dan produk

perikanan. Selain itu, kawasan ini juga

merupakan penghasil utama mineral seperti

tembaga, mineral molybdenum, zinc, dan

timah serta memiliki sumber dan cadangan

energi cukup besar seperti minyak bumi,

gas, dan bahan bakar biofuel. Sektor

industri dan manufaktur juga semakin

memiliki peranan yang cukup penting di

negara-negara kawasan Amerika Latin

dengan maksud untuk mendiversifikasi dan

memperkuat struktur dan daya saing

perekonomiannya.

Saat ini, semakin banyak negara-negara

Asia Timur melirik dalam melakukan

hubungan ekonomi dengan negara-negara di

kawasan Amerika Latin. Negara-negara besar di kawasan Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dan bahkan beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand cukup agresif dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Bahkan negara besar seperti Tiongkok tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi di kawasan Amerika Latin, namun juga memiliki kepentingan unsur politik seperti tujuan untuk mengisolasi Taiwan yang terus berupaya untuk memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat serta sebagai ajang untuk menunjukkan sebagai negara yang memiliki pengaruh kekuatan ekonomi dan politik dunia terhadap Amerika Serikat (Evan, 2009).

Indonesia pun sepatutnya tidak boleh ketinggalan kereta dengan negara-negara Asia Timur mengingat cukup besarnya potensi ekonomi yang bisa dicapai jika Indonesia dapat memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara sahabat di Amerika Latin. Walaupun sejumlah negara-negara besar Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, dan Venezuela belakangan ini sedang mengalami penurunan kinerja

perekonomian, namun di sisi lain terdapat banyak negara di kawasan yang membukukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada tahun 2014, Meksiko membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar (2.1%), Bolivia (5.4%), Chile (1.8%), Kolombia (4.6%), Peru (2.4%), Uruguay (3.3%), Paraguay (4.4%), Panama (6.2%), dan Kosta Rika (3.5%).

Alhasil walaupun terdapat beberapa negara kawasan Amerika Latin mengalami perlambatan ekonomi, namun disisi lain sejumlah negara Amerika Latin lainnya justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, sehingga secara umum kawasan Amerika Latin merupakan pasar yang cukup potensial yang sepatutnya digarap oleh Indonesia.

Dalam perkembangannya, hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Latin dapat menggambarkan bahwa negara-negara di kawasan Amerika Latin merupakan pasar yang belum optimal digarap oleh Indonesia, baik di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. Di bidang perdagangan, Kementerian Luar Negeri RI dalam beberapa kesempatan menyampaikan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menjalin

perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin antara lain adalah faktor jarak geografis, biaya transportasi, tidak ada penerbangan langsung, kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai potensi ekonomi dan pasar di kawasan Amerika Latin, minimnya hubungan kontak, terbatasnya jumlah diaspora Indonesia di negara-negara Amerika Latin, minimnya hubungan emosional dan historis, minimnya Pusat Kajian mengenai Amerika Latin, serta keterbatasan faktor perbedaan Bahasa menjadi catatan umum tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara Amerika Latin.

Lebih lanjut, tercatat bahwa Indonesia lebih banyak membukukan perdagangan defisit dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin. Pada tahun 2014, di bidang perdagangan, Indonesia membukukan perdagangan defisit negara-negara Amerika Latin sebesar US\$1.03 milyar. Indonesia mengalami perdagangan defisit besar dengan Argentina (-US\$1.22 milyar), Brasil (-US\$1.05 milyar), Chile (-US\$62.61 juta) dan Paraguay (-US\$36.61 juta). Hal ini sepatutnya perlu menjadi perhatian

mengingat Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi menargetkan surplus perdagangan dalam diplomasi ekonominya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia saat ini adalah meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi Indonesia. Dalam mendukung kinerja diplomasi ekonomi Indonesia, studi ini mencoba mengidentifikasi dan menelaah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Latin.

Dalam melakukan kajian, penulis memanfaatkan model perdagangan bilateral konvensional yaitu pendekatan modifikasi model gravitasi perdagangan internasional. Perumusan model merupakan langkah awal dalam mempelajari hubungan antar variabel-variabel. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka pendekatan yang digunakan untuk menduga model gravitasi yaitu pertama model harus linier dengan mengubah ke log-linier. Dengan demikian, model persamaan dasar gravitasi perdagangan yang telah dimodifikasi dan yang telah diubah dalam bentuk persamaan linier menjadi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln PX_{ij,t} = & \alpha_0 + \beta_1 (\ln Y_{i,t}) + \beta_2 (\ln Eks) + \\ & \beta_3 (Jarak) + \beta_4 (Embassy) + \\ & \beta_5 (ITPC) + \beta_5 (MoU) + \beta_5 (Kunjungan) \\ & + \varepsilon \quad (\text{Persamaan 1}) \end{aligned}$$

Dimana:

- $PX_{ij,t}$ menggambarkan volume perdagangan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin.
- $Y_{i,t}$ menggambarkan PDB negara-negara Amerika Latin, pada waktu t.
- Eks menggambarkan eks negara Amerika Latin yang merupakan jajahan Belanda.
- $Jarak$ menggambarkan jarak geografis antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin
- $Embassy$ menggambarkan Keberadaan KBRI di negara-negara Amerika Latin dan Kedutaan negara-negara Amerika Latin di Indonesia
- $ITPC$ menggambarkan keberadaan ITPC di negara-negara Amerika Latin.
- MoU jumlah perjanjian yang disepakati antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin

pada tahun berjalan.

$Kunjungan$ jumlah kunjungan Kepala Negara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin saling berkunjung.

Adapun definisi dari masing-masing variabel dalam persamaan model gravitasi perdagangan bilateral yakni PDB Negara Mitra Dagang Indonesia adalah nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dengan masing-masing negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia dan dinyatakan dalam satuan US\$ (Dolar AS).

Negara-negara eks jajahan Belanda adalah negara-negara Amerika Latin yang merupakan eks jajahan Belanda (Dummy).

Jarak geografis adalah jarak antara Indonesia ke negara-negara Amerika Latin yang merupakan jarak antara ibukota Indonesia dengan ibukota negara-negara di kawasan Amerika Latin (Km).

$Embassy$ adalah Keberadaan KBRI di negara-negara Amerika Latin dan Kedutaan negara-negara Amerika Latin di Indonesia.

$ITPC$ adalah keberadaan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) di negara-negara Amerika Latin.

MoU adalah jumlah perjanjian yang disepakati antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin pada tahun berjalan.

Kunjungan adalah jumlah kunjungan Kepala Negara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin saling berkunjung.

Dalam studi ini, model persamaan standar gravitasi dimodifikasi dengan menambahkan variabel independen

Embassy_{ij}, keberadaan perwakilan RI di negara-negara Amerika Latin dan Kedubes Amerika Latin di Indonesia (*foreign mission*), keberadaan ITPC di Amerika Latin, jumlah MoU yang disepakati Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin, jumlah kunjungan kepala negara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin melakukan saling kunjung.

Penambahan variabel independen *Embassy* berdasarkan studi Rose (2005). Menurut hasil studi Rose (2005), keberadaan perwakilan luar negeri di negara akreditasi berpengaruh positif terhadap kinerja perdagangan bilateral. Hal ini disebabkan peran perwakilan luar negeri sebagai *agent of export promotion* dan sebagai fasilitator dalam impor antar negara.

Variabel *dummy* akan digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas kualitatif dengan variabel terikat (Hanke et

al, 2003). Variabel *dummy* yang digunakan dalam persamaan model gravitasi ini adalah: Negara-negara Eks jajahan Belanda, keberadaan KBRI di negara-negara Amerika Latin dan Kedubes Amerika Latin di Indonesia, dan keberadaan ITPC di negara-negara Amerika Latin.

Persamaan model gravitasi diatas merupakan sebuah model statistik regresi berganda. Model regresi yang terdiri lebih dari satu variabel bebas disebut model regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda kadangkala perlu menentukan apakah variabel terikat berkaitan dengan suatu peubah bebas apabila faktor kualitatif mempengaruhi keadaan (Handayani, 2008). Hubungan ini dapat diselesaikan dengan pembentukan variabel *dummy* yang mengambil nilai 0 dan seluruh data diperoleh dari *World Bank* (Data: PDB), *World Integrated Trade Solution* (Data: Perdagangan Indonesia), *Google Map* (Data: Jarak Geografis), Kementerian Luar Negeri RI (Data: Negara-Negara eks Jajahan Belanda, Keberadaan KBRI, MoU, dan Kunjungan Kepala Negara Indonesia dan Amerika Latin), dan Kementerian Perdagangan RI (Data: ITPC).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian sebelumnya, model gravitas diperkirakan dalam bentuk log-linier. Maka, analisis kuantitatif yang dipergunakan dalam kajian ini adalah model ekonometrik dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) atau prinsip metode kuadrat terkecil biasa. Melalui metode OLS dibarengi dengan teknik analisa *time series* regresi berganda dengan data *cross section*. Pada analisis regresi berganda, perlunya dipenuhi beberapa asumsi-asumsi untuk diuji. Dengan terpenuhi asumsi-asumsi tersebut, maka penaksir kuadrat terkecil dalam kelas penaksir tak bias mempunyai varians minimum yaitu *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda dilakukan karena didasarkan pada beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

Selain itu, sebelum dilakukan pengujian asumsi, dilakukan pula evaluasi apakah model yang digunakan sudah baik atau belum (*Goodness of Fit*), dengan menggunakan kriteria pengujian statistik yaitu koefisien determinasi R^2 , dan uji-t.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda dalam persamaan tunggal menggunakan model gravitasi. Model ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin. Pengolahan data dimulai dari pengelompokan data, perhitungan dan ditabelkan sesuai yang dibutuhkan. Data kuantitatif diolah dengan menggunakan paket program komputer Excel dan SPSS yang kemudian hasil output komputer diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder, data deret waktu (*time series*) dan ruang (*cross section*). Data deret waktu meliputi data tahunan indikator diplomasi ekonomi selama periode 1997-2012 meliputi perdagangan bilateral RI dengan negara-negara Amerika Latin. Dalam studi ini negara-negara cakupan Amerika Latin hanya terbatas pada negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Data perdagangan diperoleh dari Kementerian Perdagangan RI.

Data GDP negara-negara Amerika Latin

diperoleh dari Bank Dunia. Keberadaan Negeri RI.
 KBRI dan ITPC di negara akreditasi, Uji Normalitas
 Kedubes negara-negara Amerika Latin di Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa
 Jakarta, jumlah MoU yang disepakati RI- nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov
 Amerika Latin, jumlah kunjungan Kepala adalah 0,136 atau dengan kata lain besar
 Negara Indonesia dan negara-negara dari 0,05. Karena nilai signifikansi besar
 Amerika Latin saling berkunjung, serta dari 0,05 maka H0 diterima dan dapat
 negara-negara eks jajahan Belanda disimpulkan bahwa residual model regresi
 seluruhnya diperoleh dari Kementerian Luar linear berdistribusi normal.

Hypothesis Test Summary

	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The distribution of Unstandardized Residual is normal with mean 0.00 and standard deviation 24,228.85	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	.136	Retain the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is .05.

Uji Multikolinearitas bahwa semua variabel bebas memiliki nilai
 Syarat suatu model terbebas dari *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Oleh
 Multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* > karena itu model sudah terbebas dari
 0,1 dan nilai VIF < 10. Berdasarkan tabel di multikolineari.
 atas pada kolom *tolerance* dan VIF terlihat **Analisis Regresi Linear Berganda**

Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 ^a	.993	.991	28788.16280

a. Predictors: (Constant), Kunjungan, Ex_jajah, Jarak, KBRI, ITPC, MoU, GDP

b. Dependent Variable: Trade

Uji Koefisien Determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi linear untuk mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan output SPSS di atas terlihat bahwa nilai R-square sebesar 0,993 atau dengan kata lain variabel bebas yang dimasukkan dalam model dapat mempengaruhi kinerja perdagangan sebesar 99,3 persen sedangkan sisanya 0,7 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2114517710115.037	7	302073958587.862	364.490	.000 ^b
Residual	14088891400.184	17	828758317.658		
Total	2128606601515.221	24			

a. Dependent Variable: Trade

b. Predictors: (Constant), Kunjungan, Ex_jajah, Jarak, KBRI, ITPC, MoU, GDP

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh semua variabel secara simultan (bersama-sama dalam mempengaruhi variabel kinerja Perdagangan. Berdasarkan tabel output SPSS didapatkan nilai signifikansi 0,000 (mendekati nol) yang berarti tolak H_0 dengan kata lain ada pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap kinerja perdagangan Indonesia dan negara Amselkar. **Uji t**

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel bebas terhadap Kinerja Perdagangan. Suatu variabel bebas dikatakan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dari tabel output SPSS di atas terlihat bahwa ada empat variabel bebas yang berpengaruh yaitu GDP, Ex_Jajah, KBRI, MoU, sedangkan variabel yang lain tidak berpengaruh.

MODEL REGRESI LINEAR BERGANDA TERBENTUK**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	134357.356	98583.793		1.363	.191		
GDP	.699	.037	1.067	19.036	.000	.124	8.062
Ex_jajah	85005.553	35114.655	.057	2.421	.027	.700	1.428
Jarak	-7.395	5.421	-.030	-1.364	.190	.785	1.274
KBRI	-41065.448	10559.456	-.135	-3.889	.001	.323	3.100
ITPC	55748.675	33553.810	.052	1.661	.115	.400	2.500
MoU	93592.504	34682.513	.138	2.699	.015	.148	6.735
Kunjungan	-76742.510	63863.704	-.071	-1.202	.246	.110	9.055

a. Dependent Variable: Trade

$$\text{Trade} = 134357 + 0,699\text{GDP} + 85005\text{Ex_Jajah} - 7,395\text{Jarak} - 41065\text{KBRI} + 55748\text{ITPC} + 93592\text{MoU} - 76742\text{Kunjungan}$$

Dari 7 variabel yang dimasukkan dalam model, terdapat 4 variabel yang berpengaruh terhadap kinerja perdagangan yaitu, GDP berpengaruh positif terhadap Kinerja perdagangan, dimana jika GDP suatu negara naik 1 juta Dolar akan meningkatkan nilai perdagangan dengan

Indonesia sebesar 0,699 juta Dolar. Suriname sebagai negara bekas jajahan berpengaruh positif terhadap nilai perdagangan Indonesia. Dimana terbukti negara bekas jajahan memiliki nilai perdagangan 85 juta Dolar (85055 ribu

Dolar) dibandingkan negara lain pada kelompok Amselkar.

KBRI berpengaruh negatif terhadap kinerja Perdagangan. Dimana negara yang memiliki KBRI di negaranya memiliki nilai perdagangan yang lebih kecil dibandingkan negara yang tidak memiliki KBRI.

MoU berpengaruh positif terhadap kinerja Perdagangan. Dimana jika terdapat satu kali MoU pada tahun tersebut akan meningkatkan kinerja Perdagangan sebesar 93 juta Dolar (93592 ribu Dolar).

SIMPULAN

Hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin semakin meningkat belakangan ini. Hal ini setidaknya tergambar dari peningkatan nilai hubungan perdagangan RI-Amerika Latin selama setidaknya dua puluhan tahun terakhir.

Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia di kawasan Amerika Latin dengan pendekatan model gravitasi. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap kinerja perdagangan yaitu: GDP negara-negara Amerika Latin, negara eks jajahan

Belanda (yaitu Suriname), keberadaan KBRI dan kedubes Amerika Latin di Indonesia, serta jumlah MoU berpengaruh positif terhadap kinerja perdagangan bilateral. Dari hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan dugaan awal pernyataan Kementerian Luar Negeri RI bahwa jarak geografis menjadi salah satu faktor hambatan dalam meningkatkan hubungan perdagangan RI-Amerika Latin menjadi kurang tepat. Sebaliknya, faktor kedekatan historis dan emosional tampak berpengaruh positif terhadap hubungan perdagangan RI-Amerika Latin. Hal ini dapat terlihat dari Suriname, sebagai negara eks jajahan Belanda berpengaruh positif terhadap hubungan perdagangan RI-Suriname. Selain itu, keberadaan KBRI di negara-negara Amerika Latin dan Kedubes Amerika Latin di Indonesia berpengaruh positif terhadap kinerja hubungan perdagangan RI-Amerika Latin. Maka dari itu, dalam salah satu saran kebijakan diplomasi ekonomi disarankan kiranya Pemerintah Indonesia (c.q. Kementerian Luar Negeri RI) dapat terus meningkatkan jumlah perwakilan RI di kawasan Amerika Latin dengan membuka KBRI di negara-negara Amerika Latin yang potensial namun

belum terdapat KBRI, serta dibukakannya KJRI maupun KRI di sejumlah negara-negara potensial Amerika Latin.

REFERENSI

- Bayne, N., & Woolcock, S., (2011), "The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations", *Ashgate*, United Kingdom.
- Bonilla, J.J. R, (2015), Interview oleh Sulthon Sjahril Sabaruddin di *El Colegio de Mexico*, 15 Oktober, Mexico City.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (1971), "Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945-1970", *Ofsett KAWAL*, Agustus, Jakarta.
- Evan, R.E., (2009), "China in Latin America: The Whats & Wherefores", *Lynne Rienner Publishers*, Boulder London.
- Hanke, J.E., Wichem, D.W., and Reitsch, A.G.,(2003), "Peramalan Bisnis", *Prenhalindo*, 7th Edition, Jakarta.
- Harruma, I., (2015), "DPR Inginan Dubes Jadi Sales", *Republika Online*, 16 September, Jakarta. Dapat diunduh pada: [m.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/09/17/nurfh2335-dpr-inginkan-dubes-jadi-sales](http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/09/17/nurfh2335-dpr-inginkan-dubes-jadi-sales)
- Handayani, N. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aliran Perdagangan dan Strategi Pengembangan Ekspor Kertas Indonesia. Minithesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- International Monetary Fund, (2015), "Regional Economic Outlook: Growth in Latin America Weakens for Fifth Year in a Row", *International Monetary Fund Survey*, 29 April. Dapat diunduh pada:<http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/CAR042915A.htm>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, (2015), "Neraca Perdagangan Indonesia dengan Peru", *Situs Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Dapat diunduh pada: <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export->

- import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=442
- Observatory Latin America – Asia Pacific, (2015), “Acuerdos y Negociaciones”, *Situs Observatory Latin America – Asia Pacific*. Dapat diunduh pada: <http://www.observatorioasiapacifico.org/OBSEExternalUI/pages/public/agreementMatrix.jsf>
- Rose, A. K., (2005), “The Foreign Service and Foreign Trade: Embassies as Export Promotion”, *NBER Working Paper Series* No. 11111, Februari, National Bureau of Economic Research, Cambridge. *Working Paper Series*, Oktober, Mexico City.
- World Integrated Trade Solutions. (2015). “Trade Database and Trade Indicators,” *World Bank*. Dapat diunduh pada: <http://wits.worldbank.org/>.

211AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Vol. 1, No. 2, September 2017

<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat>

p-ISSN: 2549-5658 e-ISSN: 2549-7243

DOI: 10.22236/agregat_vol1/is2pp195-210

Hal 195-210

DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PROVINSI ACEH

Sri Mulyati Yusriadi

Universitas Malikussaleh

Email: sri.mulyati@gmail.com, yusriadi@gmail.com

Diterima: 18 Juli 2017; Direvisi: 26 Juli 2017; Disetujui: 15 Agustus 2017

Abstract

This study aims to examine the effect of revenue-sharing on capital expenditures on the influence of revenue-sharing funds on district / municipal spending in Aceh. The population in this study is the Local Government Financial Statement obtained from the Regional Revenue Budget data in the form of data on revenue sharing, general allocation funds, and regional expenditure in 23 districts / cities in Aceh from 2013 until 2015 with a total population of 69 LKPD. By using multiple linear regression analysis method as data analysis method. The results of this study indicate that revenue sharing funds and general allocation funds have an effect simultaneously on local expenditure on District / City Government in Aceh. While partially, revenue sharing has significant effect to local expenditure, while general allocation fund also influences to district / city expenditure in Aceh.

Keywords: *Regional Expenditure, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh dari data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasi sebanyak 69 LKPD. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum.

PENDAHULUAN

NAPBD yang mencakup pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut.

Mardiasmo (2009) menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu: (a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (b) Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber. Komposisi anggaran idealnya harusnya berbalik, di mana belanja langsung bisa lebih besar.

Komposisi anggaran yang tidak ideal dapat membuat pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan pembangunan karena kurangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal dalam anggaran belanja daerah, pemerintah daerah juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Berlakunya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah), Pempus (Pemerintah Pusat) akan mentransferkan dana perimbangan kepada Pemda. Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang diperolehnya untuk membiayai belanja daerah di daerahnya.

Transfer dari Pemerintah pusat seringkali digunakan sebagai sumber pendanaan utama Pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda dilaporkan di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin

tercapainya standar pelayanan publik minimum.

Berdasarkan pada gambaran tersebut maka pemerintah daerah dimungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan melalui APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal ini berarti peran pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan melalui kebijakan APBD diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengalokasikan anggaran yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan tersebut.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi

dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain. Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak tersangka.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah).DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) (Wahyuni & Adi, 2009). Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ditetapkannya PPh Perorangan sebagai objek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelekas bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA

tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan sebagai basis pajak.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Penerimaan DBH pajak bersumber dari : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN). Sedangkan penerimaan DBH SDA bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi (Wahyuni &

Adi, 2009). Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H₁: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

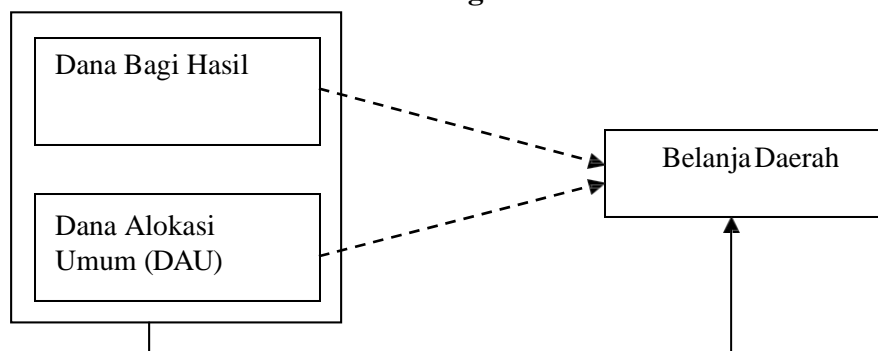
Menurut UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Selain itu, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi

dari potensi penerimaan daerah yang ada (Rahmawati, 2010). Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dari penjelasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka skema kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran



Tabel 1
Deskriptif Data Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
DBH	69	8,2	510,0	54,9	86,2
DAU	69	252,0	780,0	496,5	140,8
BD	69	343,0	1840,0	868,0	317,6

Berdasarkan tabel 1 diperoleh Anggaran Dana Bagi Hasil selama 3 tahun, nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 54,9 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 8,2 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2013 sedangkan nilai maksimum untuk Dana Bagi Hasilnya sebesar 510 Milyar Rupiah untuk

Kabupaten. Untuk Kabupaten Subulussalam tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 780 Milyar Rupiah diperoleh Kabupaten Aceh Bireuen pada tahun 2015. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan sebesar 140,8.

Anggaran Belanja Daerah pada semua Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

memperoleh rata-rata (*mean*) selama 3 tahun sebesar 868 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 343 Milyar Rupiah pada Kota Subulussalam di tahun 2013, dan nilai maksimum sebesar 1.840 Milyar Rupiah untuk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2015. Nilai standar deviasi selama 3 tahun pengamatan adalah sebesar 317,6.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi libear berganda dari pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Persamaan Regresi: $BD = -9,037 + 0,904DBH + 1,830DAU + \varepsilon$	
R	= 0,958
R ²	= 0,879

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai konstanta (a) sebesar -9,037, artinya jika Dana Bagi Hasil (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dianggap konstan, maka Belanja Daerah adalah mempunyai nilai sebesar -9,037. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode analisis linear berganda menghubungkan satu variabel depanden dengan dengan beberapa variabel independen dalam suatu model penelitian. Maka dilakukan uji signifikan terhadap nilai koefisienregresi yang diperoleh baik secara simultan maupun secara parsial.

Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil sebesar 0,904, artinya jika Dana Bagi Hasil meningkat 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 90,4%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Aceh mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan meningkat. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 1,830, jika Dana Alokasi Umum meningkat 1% maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 183%. Hal ini di sebabkan karena Dana Alokasi Umum sangat menunjang untuk anggaran Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Abdullah & Rona (2015) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya bila Dana Bagi Hasil meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah akan meningkat pula sebesar Rp. 0,904.

Hal tersebut bermakna bahwa Dana Bagi Hasil ikut meningkatkan Anggaran Belanja Daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah

membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DBH) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Artinya bila Dana Alokasi Umum meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar Rp. 1,830. Diperoleh hubungan yang positif antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah. Hal ini bermakna bahwa pengalokasian anggaran Dana Alokasi Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah lebih ditujukan untuk alokasi anggaran Belanja Daerah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syukriy & Halim (2007)

yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Sesuai juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marzalita (2014) yang menunjukkan bahwa perubahan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja barang dan jasa di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pengaruh yang dihasilkan kuat yaitu sebesar 0,879 atau 87,9% (>50%), hal tersebut juga sesuai dengan nilai derajat hubungan (korelasi) antara Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah yang diperoleh sebesar 0,938. Nilai tersebut bermakna bahwa hubungan antara Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempunyai hubungan positif, searah dan sangat kuat terhadap Belanja Daerah. Alasan terjadi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi karena faktor ekonomi, politik, dan sosial, namun pada umumnya karena faktor financial dan kebutuhan fiskal. Secara konseptual,

perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atas pengeluaran. Perubahan APBD menjadi sarana bagi legislatif dan eksekutif untuk merubah alokasi anggaran secara legal. Perilaku oportunistik legislatif dan eksekutif saat perubahan APBD dapat mengakibatkan terjadinya misalokasi anggaran belanja pemerintah. Kecenderungan Pendapatan Asli Daerah yang selalu bertambah saat perubahan anggaran, membuka peluang bagi legislatif untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi program dan kegiatan yang menjadi preferensinya (Abdullah, 2013).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dougherty, et al. (2003) dimana Perubahan anggaran dilakukan agar lebih bermanfaat dalam pelaksanaan jangka panjang dalam siklus anggaran baik sebelum maupun dimasa yang akan datang, penyesuain dilakukan dalam tahun anggaran berjalan karena adanya pertumbuhan pendapatan ekonomi yang memberi kontribusi terhadap peningkatan *surplus* terhadap penyesuaian terutama di bidang belanja modal. Hal ini juga senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2008) dimana Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil yang telah diuraikan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan terhadap Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum untuk Belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh lebih besar dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. (2003). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Simposium Nasional Akuntansi, Oktober. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Abdullah, Syukriy & Riza Rona. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. *Makalah dipresentasikan pada Konferensi Regional Akuntansi (KRA) ke-II, IAI Wilayah Jawa Timur, di Universitas Kanjuruhan, Malang, 29-30 April (2015)*.
- Ariani, Wahyuni. (2009). *Manajemen Operasi Jasa Edisi pertama* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase & Soo Geun Song. (2003). *Managerial Necessity and The Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities*. *Public Administration Review*. Vol. 63, No. 4 (Jul – Aug): 484 – 497.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyana, B, Subkan, Slamet, K. (2006). *Keuangan Daerah: Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. LPKPAP-BPPK: Jakarta.
- Rahmawati, Nur Indah. (2010). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Republik Indonesia, Undang-Undang
No.32 Tahun (2004) *tentang*
Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.
33 Tahun (2004) *tentang*
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Daerah

Republik Indonesia, Undang – Undang
Perpajakan No. 17 Tahun (2000),
tentang Pajak Penghasilan, Edisi
Kedelapan, Cetakan Pertama, Citra
Umbara, Bandung, (2000)
Republik Indonesia, Undang-
undang Nomor 25 Tahun (1999)
Tentang Desentralisasi Fiskal

Sumarni, Saptaningsih. (2008). *Pengaruh*
Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum dan Dana
Alokasi Khusus terhadap Alokasi
Belanja Modal Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.
Yogyakarta.

STRUKTUR MODAL DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Lara Monica, Muchdie, Uzair Achmadi

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: laramonica151191@gmail.com

Diterima: 11 Juli 2017; Direvisi: 15 Juli 2017; Disetujui: 4 Agustus 2017

Abstract

The purpose of this research is to analyze and determine whether there is a direct effect of capital structure (X_1) and the Investment Decision (X_2) the Value of the Company (X_3) at the company's advertising, printing and media in the Indonesian Stock Exchange. The population in this research is 14 companies. Samples are 9 companies with purposive sampling method. This type of research is quantitative. Analysis of data use path analysis with SPSS 21. Based on data analysis, the results show that the capital structure (X_1) has significant negative direct impact to investment decisions (X_2), the capital structure (X_1) has no direct impact significantly on company value (X_3), the investment decision (X_2) has significant positive direct impact to company value (X_3) and capital structure (X_1) has significant negative direct impact to company value (X_3) through investment decisions (X_2).

Keywords: *Company Value, Price to Book Value, PBV, Capital Structure, Debt to Equity Ratio, DER, Investment Decision, Earnings Per Share, EPS, Indonesian Stock Exchange*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat pengaruh langsung Struktur Modal (X_1) dan Keputusan Investasi (X_2) terhadap Nilai Perusahaan (X_3) pada perusahaan *advertising, printing* dan media di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan. Sampel penelitian sebanyak 9 perusahaan dengan metode purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis data menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan program SPSS 21. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal (X_1) berpengaruh langsung negatif signifikan terhadap keputusan investasi (X_2), struktur modal (X_1) tidak berpengaruh langsung signifikan terhadap nilai perusahaan (X_3), keputusan investasi (X_2) berpengaruh langsung positif signifikan terhadap nilai perusahaan (X_3) dan struktur modal (X_1) berpengaruh langsung negatif signifikan terhadap nilai perusahaan (X_3) melalui keputusan investasi (X_2).

Kata Kunci: Nilai Perusahaan, *Price to Book Value, PBV, Struktur Modal, Debt to Equity Ratio, DER, Keputusan Investasi, Earning Per Share, EPS, Bursa Efek Indonesia.*

PENDAHULUAN

Bagi perusahaan yang sudah *go public*, maka nilai perusahaan akan tercermin dari nilai pasar sahamnya. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan disebut juga sebagai memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham (*stockholder wealth maximation*) yang dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan harga saham biasa dari perusahaan. Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkat pula kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. (Agus Harjito & Martono, 2014).

Keputusan-keputusan keuangan yang diambil “manajer keuangan” yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Ini ditunjukkan oleh meningkatnya nilai perusahaan, atau harga saham bagi perusahaan yang *go public*. (Suad Husnan & Enny Pudjiastuti, 2006).

Dasar penilaian investasi oleh investor ditentukan oleh tingkat pengembalian investasi dan risiko investasi. Analisis struktur modal perusahaan menjadi salah satu indikator investor dalam memilih investasi yang tepat. Struktur modal terbaik adalah struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham, sehingga perusahaan yang memiliki struktur modal yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. (Suad Husnan & Enny Pudjiastuti, 2006).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh struktur modal dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, tingkat kemakmuran yang akan diterima oleh pemegang saham semakin besar. *Return* yang diterima oleh investor juga akan semakin besar. Besarnya pengembalian atas investasi tersebut dapat memicu tingkat investasi di suatu perusahaan, karena investor lebih menyukai perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi. (Suad Husnan & Enny Pudjiastuti, 2006)

Brigham & Houston (2006), menyebutkan bahwa nilai perusahaan dapat diukur dengan rasio nilai pasar

(*market value ratio*) yang berhubungan dengan harga saham perusahaan terhadap laba, arus kas, dan nilai buku per saham. Rasio nilai pasar yang digunakan untuk mengukur nilai suatu perusahaan adalah dengan menggunakan rasio *Price to Book Value* (PBV).

Price to book value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka pasar semakin percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV dihitung dengan rumus berikut (Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2008):
dimana:

$$PBV = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

Rumus 1

$$PBV = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Rumus 2

Struktur modal merupakan perimbangan sumber dana jangka panjang perusahaan yang terdiri dari hutang dan ekuitas. Modal sebuah perusahaan perlu dikaji untuk menentukan struktur modal yang optimal atau paling tidak terletak dalam satu rentang tertentu untuk setiap perusahaan, selanjutnya pemahaman konsep struktur modal akan membantu

manajer keuangan untuk mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi struktur modal optimal. (Akhmad Sakhowi, 2011). Semua struktur modal adalah baik. Tetapi kalau dengan merubah struktur modal ternyata nilai perusahaan berubah, maka akan diperoleh struktur modal yang terbaik. Struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan, atau harga saham, adalah struktur modal yang baik. (Suad Husnan, 1998).

Proksi struktur modal dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio*. Menurut Darmadji & Fakhruddin (2008), rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*-DER) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri. Sedangkan Ni Luh Putu & I Ketut Mustanda (2014), menyebutkan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitas perusahaan. Rumusnya sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

Rumus 3

Investasi pada suatu perusahaan terbagi menjadi investasi jangka pendek dan

investasi jangka Panjang (Husnan, Suad & Enny Pudjiastuti. 2006). Menurut Van Horne & Wachowicz (2005), keputusan investasi merupakan hal yang paling penting dibandingkan dengan keputusan pendanaan dan kebijakan dividen ketika perusahaan ingin menciptakan nilai perusahaan, sehingga keputusan investasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen keuangan suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang mendasar dalam proses keputusan investasi, yaitu pemahaman hubungan antara return harapan dan risiko investasi. Semakin besar return harapan suatu investasi, maka semakin besar pula risiko yang harus dipertimbangkan oleh investor. Komponen penting yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan adalah laba per lembar saham atau *earning per share* (EPS). Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. Besarnya EPS suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan.

Laba per saham atau *earning per share* (EPS) merupakan rasio yang menunjukkan pembagian laba untuk setiap saham. Semakin tinggi nilai EPS tentu

saja menyebabkan semakin besar laba dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham. EPS dihitung dengan rumus berikut (Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhruddin, 2008):

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Rumus 4

Ashari (dalam Nasution, 2013) menyebutkan bahwa Investor akan tertarik dengan banyaknya *return* investasi. *Earning per Share* (EPS) merupakan salah satu rasio untuk mengukur investasi, yang dapat diukur dengan laba bersih bagi saham yang beredar. Jadi, Rasio ini menggambarkan besarnya pengembalian modal setiap satu lembar saham.

METODE PENELITIAN

Jumlah perusahaan advertising, printing dan media yang terdaftar di BEI adalah 14 perusahaan manufaktur, dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam penentuan sampel diperoleh 9 perusahaan manufaktur sebagai sampel. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu (Suharsimi Arikunto, 2010). Kriteria yang digunakan adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014 dan

memiliki data keuangan yang lengkap selama lima tahun berturut-turut.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari subjek atau objek yang diteliti, tetapi melalui pihak lain seperti instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait, perpustakaan, arsip perseorangan dan sebagainya. (Moh. Pabundu Tika, 2005)

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan terikat. Struktur modal dan keputusan investasi merupakan variabel bebas sedangkan nilai perusahaan merupakan variabel terikat. Definisi operasional dari tiap variable yakni, Struktur modal diproyeksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitas

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

Rumus 5

Investor akan tertarik dengan banyaknya *return* investasi. *Earning per Share* (EPS) merupakan salah satu rasio untuk mengukur investasi, yang dapat diukur dengan laba bersih bagi saham yang beredar. Jadi, rasio ini menggambarkan besarnya pengembalian modal setiap satu lembar saham. Nilai saham diproyeksikan dengan rasio *Price to Book Value* yaitu perbandingan antara nilai saham menurut pasar dengan nilai buku ekuitas perusahaan. ini menggambarkan besarnya pengembalian modal setiap satu lembar saham.

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Rumus 6

$$PBV = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

Rumus 7

$$BV = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Rumus 8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik

	N	Me	Med	Mo	Std. Dev	Var	Min	Max
Nilai Perusahaan	45	3.05	2.04	.22a	3.53	12.486	0.11	14.71
Struktur Modal	45	0.84	0.68	.29a	0.67	0.457	0.04	2.6
Keputusan Investasi	45	99.55	45.03	.73a	117.3	13766	0.73	472.03

Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS versi 21

Dari data di atas diperoleh bahwa data nilai perusahaan adalah nilai maksimum 14.71 dan nilai minimum 0.11.

Nilai rata-rata sebesar 3.0558 dan simpangan baku atau standar deviasi sebesar 3.53349 serta median sebesar 2.04. Nilai varians adalah sebesar 12.486 dan modus sebesar 0.22^a. Data struktur modal adalah nilai maksimum 2.60 dan nilai minimum 0.04. Nilai rata-rata sebesar 0.8498 dan simpangan baku atau standar deviasi sebesar 0.6763 serta median sebesar 0.68. Nilai varians sebesar 0.457 dan nilai modus sebesar 0.29^a.

Data nilai keputusan investasi adalah nilai maksimum 472.03 dan nilai minimum 0.73. Nilai rata-rata sebesar 99.5533 dan simpangan baku atau standar deviasi sebesar 117.33 serta median sebesar 45.03. Nilai varians adalah sebesar 13766.394 dan nilai modus sebesar 0.73^a.

Uji Normalitas

Alat analisis yang digunakan untuk menghitung normalitas adalah dengan menggunakan teknik statistik nonparametris sehingga diperoleh variabel nilai perusahaan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa Nilai Tolerance Struktur Modal dan Keputusan Investasi yakni sebesar 0.662 lebih besar dari 0.10. Sementara itu, Nilai VIF variabel Struktur Modal dan Keputusan Investasi yakni sebesar 1.510 lebih kecil dari 10.00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai Sig Struktur Modal yaitu sebesar 0.252 lebih besar dari 0.05 (Sig > 0.05) yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel Struktur Modal. Dan nilai Sig Keputusan Investasi yaitu sebesar 0.602 lebih besar dari 0.05 (Sig > 0.05) yang artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel Keputusan Investasi.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai Durbin-Watson (DW) adalah 1.952, Nilai DW sebesar 1.952 lebih besar dari batas atas (dU) yakni 1.424 dan kurang dari $(4 - dU = 4 - 1.424 = 2.576)$.

Berdasarkan tabel pengambilan keputusan $dU < d < 4 - dU$ sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi baik positif atau negatif.

Uji Linearitas

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa nilai Sig linearitas struktur modal dan keputusan investasi sebesar 0.357 yaitu lebih dari 0.05 (Sig > 0.05), maka dapat disimpulkan terdapat linearitas struktur modal dan keputusan investasi. Nilai Sig linearitas struktur modal dan nilai perusahaan sebesar 0.363 yaitu lebih dari 0.05 (Sig > 0.05), maka dapat disimpulkan terdapat linieritas struktur modal dan nilai perusahaan.

Selanjutnya Sig linearitas keputusan invest-tasi dan nilai perusahaan sebesar 0.170 yaitu lebih dari 0.05 (Sig > 0.05) maka dapat disimpulkan terdapat linearitas keputusan investasi dan nilai perusahaan. Analisis Korelasi Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh angka korelasi antara variabel struktur modal (X_1) dengan keputusan investasi (X_2) sebesar -0.581 dengan tingkat korelasi sedang dan tanda negatif menunjukkan adanya arah yang berlawanan.

Arah yang berlawanan artinya jika struktur modal naik maka keputusan

investasi turun, atau sebaliknya jika struktur modal turun maka keputusan investasi naik.

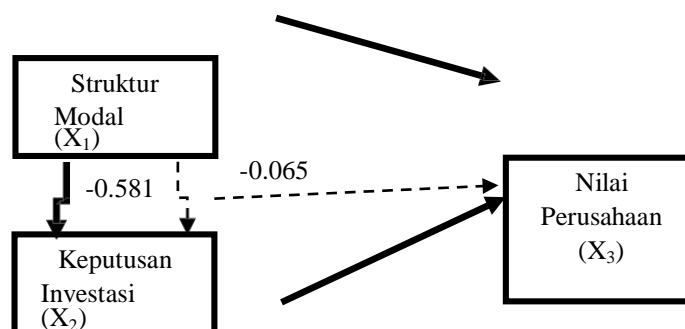
Angka korelasi antara variabel struktur modal (X_1) dengan nilai perusahaan (X_3) sebesar -0.100 dengan tingkat korelasi sangat rendah dan tanda negatif menunjukkan adanya arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan artinya jika struktur modal turun maka nilai perusahaan naik atau sebaliknya jika struktur modal naik maka nilai perusahaan turun.

Angka korelasi antara variabel keputusan investasi (X_2) dengan nilai perusahaan (X_3) sebesar 0.133 dengan tingkat korelasi sangat rendah dan tanda positif menunjukkan arah yang sama.

Arah yang sama artinya jika keputusan investasi tinggi maka nilai perusahaan juga tinggi.

Analisis Jalur (Path Analysis)

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa: Nilai p_{21} sebesar -0.581, nilai p_{31} sebesar -0.035, sedangkan p_{32} sebesar 0.112 dan $p_{32} \times p_{21} = 0.112 \times (-0.581) = -0.065$.



- a. Struktur modal (X_1) terhadap keputusan investasi (X_2) terhadap keputusan investasi (X_2) $p_{21} \geq 0.05$ 0.112
- b. Hipotesis kesatu: $p_{21} \geq 0.05$ 0.112
- c. Diperoleh p_{21} sebesar negatif 0.581, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh langsung negatif signifikan antara struktur modal (X_1) dengan keputusan investasi (X_2).
- d. Struktur modal (X_1) terhadap nilai perusahaan (X_3)
- e. Hipotesis kedua: $p_{31} < 0.05$
- f. Diperoleh p_{31} sebesar negatif 0.035, maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh langsung signifikan antara struktur modal (X_1) dengan nilai perusahaan (X_3).
- g. Keputusan investasi (X_2) terhadap nilai perusahaan (X_3)
- h. Hipotesis ketiga: $p_{32} \geq 0.05$
- i. Diperoleh p_{32} sebesar positif 0.112, maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh langsung positif signifikan antara keputusan investasi (X_2) dengan nilai perusahaan (X_3).
- j. Struktur modal (X_1) terhadap nilai perusahaan (X_3) melalui keputusan investasi (X_2)
- k. Hipotesis keempat: $p_{31} \times p_{21} \geq 0.05$
- l. Diperoleh $p_{31} \times p_{21}$ sebesar negatif 0.065, maka H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh langsung negatif signifikan antara struktur modal (X_1) terhadap nilai perusahaan (X_3) melalui keputusan investasi (X_2).

SIMPULAN

Struktur modal (X_1) berpengaruh langsung negatif signifikan terhadap keputusan investasi (X_2). Struktur modal (X_1) tidak berpengaruh langsung signifikan terhadap nilai perusahaan (X_3).

Keputusan investasi (X_2) berpengaruh langsung positif signifikan terhadap nilai perusahaan (X_3). Pada pengaruh tidak langsung struktur modal (X_1) terhadap nilai perusahaan (X_3) melalui keputusan investasi (X_2) berpengaruh langsung negatif signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Sakhowi. (2011). Manajemen Keuangan. Pekalongan :Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan
- Brigham, Eugene F dan Joel F.Houston. (2006). Fundamentals of Financial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Buku kedua.Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

- D. Agus Harjito dan Martono, SU. (2014). (Keputusan Jangka Panjang).
Manajemen Keuangan Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. (2006). Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi Kelima. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Moh. Pabundu Tika, (2005), Metode Penelitian Geografi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, Riska. (2013). Pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Return on Equity (ROE) terhadap Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Periode (2009-2012)". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.
- Ni Luh Putu Rassri Gayatri dan I Ketut Mustanda. (2014). Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividend an Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud) Bali.
- Suad Husnan. (1998). Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti. (2006). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi Keenam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suharsimi Arikunto, (2010), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta,
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin. Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab Edisi 2. (2008). Jakarta: Salemba Empat.
- Van Horne, James C dan John M. Wachowicz. (2005). Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan. Buku Pertama. Edisi Kedua belas. Jakarta: Salemba Empat

PENYEBAB WAJIB PPAJAK TIDAK PATUH

Dewi Pudji Rahayu

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

Email: dewirahayu@uhamka.ac.id

Diterima: 12 Juli 2017; Direvisi: 16 Juli 2017; Disetujui: 4 Agustus 2017

Abstract

This study aims to determine the causes of non-compliance with taxpayers. Using qualitative methods, this study was conducted by interviewing fifteen taxpayers who have not complied with tax reporting to article 21 until 31 March 2015. Non-compliance includes both not reporting and not accurately calculating their taxes. Fifteen samples. The results showed that knowledge of tax laws and transparency of tax expenditures significantly affect taxpayer voluntary compliance.

Keywords: *Taxpayer, voluntary compliance, tax knowledge, tax expenditure transparency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai lima belas pembayar pajak yang belum mematuhi pelaporan pajak pasal 21 pasal sampai dengan tanggal 31 Maret 2015. Ketidakpatuhan tersebut mencakup baik tidak melaporkan dan tidak menghitung pajak mereka secara akurat. Kelima belas sampel tersebut Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan transparansi pengeluaran pajak berpengaruh nyata terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kata Kunci: Wajib pajak, kepatuhan sukarela, pengetahuan pajak, transparansi pengeluaran pajak.

PENDAHULUAN

Kunci utama pengumpulan pajak dengan *Self Assesment System (SAS)* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Harahap, 2004). Potensi pajak di Indonesia sangatlah besar. Dan potensi yang besar tersebut bisa dikuasai oleh negara bila sistem pajak yang ada, mendukung tingkat kolektibilitas pajak. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat maka kolektibilitas pajakpun akan tinggi. Sebaliknya apabila sistem pajak tidak mendukung, maka tingkat kepatuhan pajak rendah secara otomatis tingkat kolektibilitas pajak akan rendah pula.

Melalui kepatuhan administrasi pajak dapat mengkonsentrasikan sumber dayanya secara lebih efektif dan efisien. Memang tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*). Tapi pilihan ini adalah pilihan yang terbaik dan bermartabat, dan cara ini yang banyak dilakukan di negara maju. Selain itu negara Indonesia juga perlu mendorong supaya masyarakat patuh secara sukarela sehingga tingkat penerimaan pajak juga semakin tinggi, dengan kos yang harus dikeluarkan oleh negara tidak besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Djawadi dan Fahr (2013) dengan menggunakan

laboratorium yang sudah diseting sedemikian rupa, sehingga otoritas pajak disini dibagi 2 yaitu otoritas Pajak Rendah (*Low Authority*) dan Otoritas Pajak yang lebih Tinggi (*Higher Authority*).

Penelitian ini menemukan fakta bahwa meskipun otoritas pajak rendah, bila transparansi belanja pajaknya tinggi maka kepatuhan wajib pajak tinggi. Dan semakin tinggi masyarakat mengetahui informasi tentang pengetahuan pajak terkait dengan belanja publik, maka kepatuhan WP juga akan lebih tinggi. Siahaan (2012) dalam penelitiannya pada WP yang ada di Surabaya terkait keadilan pajak dan kepatuhan pajak sukarela (*Voluntary Compliance*), menghasilkan penelitian bahwa keadilan pajak mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepatuhan pajak sukarela. Machogu dan Amayi (2013) melakukan peneliti pada pelaku UMKM dan mendapatkan hasil bahwa adanya pendidikan atau penyuluhan kepada WP sehingga WP tahu benar melaksanakan kewajiban pajaknya, maka hal tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela semakin baik.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak seluruh Wajib Pajak melaksanakan

kewajiban perpajakannya terkait dengan aspek di atas secara benar serta dilandasi oleh kesadaran dan itikad baik.

Pada tataran penerapan SAS sendiri terdapat kendala-kendala di lapangan, di antaranya ketidaktahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, keinginan untuk memanipulasi pajak, kurang pahaminya Wajib Pajak tentang apa itu pemeriksaan, kecenderungan mereka menyembunyikan data saat diperiksa, dan banyak kendala lain yang menuju pada pelanggaran pajak baik yang diperkenankan (*tax avoidance*) dan yang tidak diperkenankan (*tax evasion*). Seperti yang telah dikemukakan oleh Erick dan Fallan bahwa banyaknya kendala kepatuhan ini salah satu sebabnya karena adanya ketidaktahuan tentang peraturan pajak (Erick dan Fallan 1996 dalam Palil, 2005).

Uraian di atas menjelaskan pentingnya kepatuhan sukarela dan variabel-variabel yang bisa menstimulus Wajib Pajak untuk patuh secara sukarela. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengangkat apa penyebab ketidakpatuhan pajak. Melalui wawancara kepada beberapa wajib pajak baik yang sudah memiliki NPWP atau belum tetapi penghasilannya sudah di atas PTKP. Kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sikap Wajib Pajak yang lain. Bila sebagian besar Wajib Pajak melakukan pelanggaran pajak maka Wajib Pajak yang mengetahuinya akan mengambil kecenderungan melanggar. Demikian juga sebaliknya. Hal tersebut seperti yang ada pada penelitian Vogel (1974); Spicer dan Lundstedt 1976; Scott and Grasmick 1981; Grasmick dan Scott 1982 (dalam Davis et. al., 2003) menyebutkan bahwa seseorang yang mengetahui Wajib Pajak yang tidak patuh, maka seseorang tersebut kemungkinan akan memiliki kecenderungan mengikuti ketidakpatuhan tersebut.

Bila populasi kepatuhan yang besar dan lebih besar melebihi jumlah ketidakpatuhan maka orang akan cenderung menjadi patuh. Untuk itu, otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) harus mampu mengkondisikan iklim perpajakan di Indonesia sebaik mungkin sehingga kepatuhan pajak dicapai dalam perpajakan Indonesia. Bila iklim perpajakan sudah patuh maka kepatuhan sukarela dengan sendirinya akan terwujud. Karena suatu kebiasaan patuh yang telah tertanam (*compliance of habitation*), bisa menjadi jalan untuk mewujudkan

kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat juga diartikan sebagai tingkat sejauh mana Wajib Pajak mencatat semua *tax return* secara tepat waktu dan melaporkan utang pajaknya secara akurat berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (Mayer, 2003). Sedangkan menurut Franzoni (1999) kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu membayar jumlah dihitung.

Alm (1991) dalam Palil (2005) mendefinisikan kepatuhan sebagai pelaporan semua pendapatan dan pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim.

Di dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-213/PJ/2003 Tanggal 22 Juli 2003 yang didukung oleh SE Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.331/2003 Tanggal 22 Juli 2003 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Pajak KEP-550/PJ./2000 tentang penetapan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria patuh, disebutkan bahwa kriteria Wajib Pajak untuk dapat ditetapkan

menjadi Wajib Pajak patuh dalam rangka penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu: penyampaian SPT Masa dan Tahunan tepat waktu dan yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, serta memenuhi beberapa kriteria lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan, serta aspek kebersihan hukum pidana dan hasil pemeriksaan.

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir; dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangkawaktu

10 (sepuluh) tahun terakhir. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Hal senada juga ditemukan oleh Kassipillai, 2000 dalam Palil (2005) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting dan akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak dalam SAS. Hal serupa jugadinyatakan oleh Laurin, 1976, Kinsey dan Grasmick, (1993), dalam Palil (2005) mereka mengasumsikan bahwa pengetahuan pajak akan bertambah dengan panjangnya masa pendidikan yang dilakukan dan kursus, walaupun secara tidak langsung tidak ditemukan adanya kaitan dengan sikap Wajib Pajak. Song dan Yarbrough, (1978) dalam Palil (2005) mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa semakin tinggi pengetahuan akan peraturan pajak maka akan semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Robert et al (1991) dalam

Palil (2005) menyatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi *tax fairness*. Schisler menyebutkan tingkat pendidikan Wajib Pajak khususnya mengenai sistem pajak mempengaruhi kepatuhan pajak (Schisler, 1995).

Transparansi publik menurut Mardiasmo (2009) adalah upaya semaksimal mungkin agar seluruh kebijakan pemerintah selalu dikomunikasikan kepada rakyat. Pemerintah harus berupaya untuk selalu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dengan harapan ideal masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan negara agar dapat diawasi oleh masyarakat dan DPR (sebagai saluran aspirasi masyarakat).

Sedangkan menurut Baldrick dan Siregar (2001) yang dikutip oleh Supriyanto (2004) bahwa ada beberapa prinsip yang ada pada transparansi yaitu (1) mudah dipahami masyarakat, (2) dapat diterima masyarakat, dan (3) dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya transparansi pelaporan belanja pajak penting karena diharapkan bisa

memberikan informasi kepada Wajib Pajak supaya dapat dijadikan pertimbangan bahwa pajak yang mereka bayar tidak disalahgunakan oleh pemerintah serta jelas alokasinya dan dijadikan stimulus bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar atau dengan kata lain akan bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela.

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2009) merupakan keputusan pemerintah yang harus berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan dengan baik terhadap masyarakat atau ditransparansikan kepada publik. Pemerintah harus berupaya untuk mensosialisasikan atau menginformasikan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat nantinya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan menjadi fungsi pengawas dari kerja pemerintah. Termasuk dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam melaporkan belanja pajak yang telah dipungut selama ini. Seperti yang kita lihat pada pelaporan APBN kita, pelaporan besarnya penerimaan pajak dilaporkan pada sisi Penerimaan APBN, sedangkan belanja

pajak tidak dilaporkan secara khusus pada sisi Belanja APBN.

Setidaknya bisa dilaporkan secara independen ataukah hanya *disclosur* saja. Hal ini berbeda dengan yang ada di Amerika maupun di negara-negara bagiannya, mereka melaporkan penerimaan dan mencoba untuk mengalokasikan secara lebih khusus dan jelas pembelanjaan pajak yang dipungut oleh negara, dan mereka juga memiliki kategori program belanja pajak yang telah ditentukan seperti untuk program perbaikan transportasi, pendidikan dan kesejahteraan hidup termasuk di dalamnya masalah kesehatan pangan dan tempat tinggal. Kemudian mereka juga menyiapkan pemotongan, pengkreditan dan penundaan pajak untuk beberapa sektor penting misalnya pertanian, pendidikan, perdagangan, dan industri.

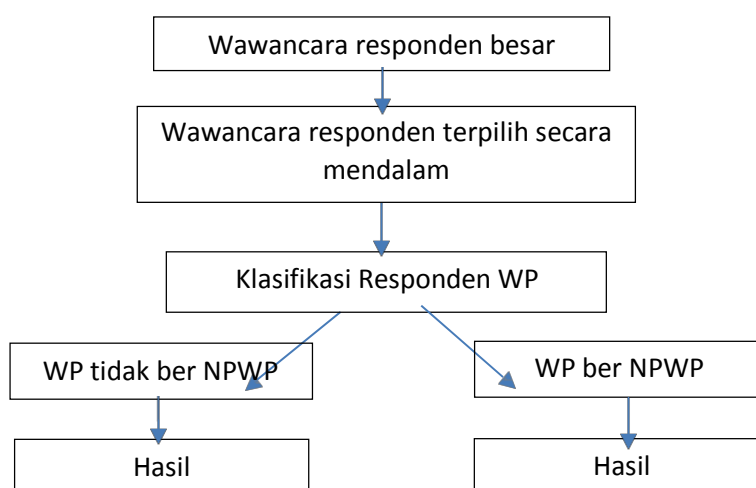
Dari situlah fungsi pajak sebagai pengontrol dapat dijalankan. Selain itu, negara bagian Amerika menggunakan pajak *employment* dan *unemployment* sebagai sponsor dari program Jaminan Sosial (*social security*), yang diperuntukkan untuk pengangguran, orang miskin, jaminan kesehatan orang tak mampu, dan untuk yang kegiatan sosial yang lain. Dari apa yang dilakukan oleh

pemerintah Amerika tersebut walaupun pajak bukan diberikan kontraprestasi langsung tapi Wajib Pajak di Amerika tahu benar bahwa pengalokasiannya jelas dan transparan, dan mereka yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan seolah-olah memiliki kemanfaatan yang tidak sia-sia. Dari situlah kesadaran sukarela masyarakat Amerika muncul (Jones, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2004) yang mencoba mendekati kaitan demokratisasi dan kepatuhan Wajib Pajak di era Reformasi tahun 1998, berusaha memasukkan variabel-variabel seperti pemahaman

demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi publik, kebebasan berusaha, kebebasan berpartisipasi dan berorganisasi politik, kondisi *full informed*, dan pemahaman perundang-undangan dengan menggunakan variabel intervening persepsi masyarakat tentang pajak, dan variabel dependennya adalah partisipasi Wajib Pajak memenuhi kewajibannya (kepatuhan).

Dari hasil penelitian tersebut variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, kondisi *full informed* dan persepsi Wajib Pajak tentang pajak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan.



Gambar : Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Pemilihan responden dalam penelitian ini adalah dosen. Dosen adalah salah satu profesi dengan pendidikan minimal adalah Strata dua. Dosen tersebut dosen yang bersedia menjadi responden, yang berasal dari beberapa kampus.

Dengan kriteria sebagai berikut Dosen tersebut adalah Wajib Pajak yang sudah ber NPWP yang tidak melaporkan pajaknya pada tahun 2014 atau Dosen yang belum ber NPWP tapi penghasilannya di atas PTKP. Data Wajib Pajak sengaja tidak dirilis secara terbuka dan dirahasiakan identitasnya karena menyangkut nama baik responden.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada responden yang telah di kriteriakan sebagaimana penjelasan di atas. Analisis kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait (Sugiyono 2012). Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga analisis dan interpretasi. Dalam penelitian ini digunakan *thick description* yang

merupakan uraian lengkap atau kutipan langsung dari wawancara mendalam yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden dengan tahapan wawancara sebagai berikut, Tahap pertama adalah tahap wawancara apakah Wajib Pajak memiliki NPWP.

Jika tidak maka ditanya berapa penghasilan rata-rata perbulan. Dari 50 orang yang diwawancara hanya 30 responden yang mau menjadi responden. Dan 10 orang memang tidak memiliki NPWP karena penghasilannya di bawah PTKP. Sedangkan sisanya 20 orang adalah 6 Wajib Pajak penghasilan memenuhi PTKP tapi belum memiliki NPWP. Dan Sisanya 13 orang memiliki NPWP. Tahap kedua wawancara secara lebih mendalam bagi 20 responden, baik yang sudah memiliki NPWP maupun belum. Dari 20 responden tersebut 7 orang belum memiliki NPWP meskipun penghasilannya di atas PTKP. Sisanya 13 orang yang ber NPWP 5 orang orang melaporkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu, 3 orang melaporkan pajak tapi dengan penghitungan yang tidak benar. Sisanya 5 orang sudah ber NPWP tapi tidak melakukan pelaporan pajak.

Tahap ketiga, bagi responden yang belum memiliki NPWP 7 orang tapi penghasilannya diatas PTKP, diberikan pengertian pentingnya memiliki NPWP dan apa hak dan kewajibannya (*treatment* 1). Dari ke 7 responden menyatakan saat itu juga berniat membuat NPWP. Kemudian diberikan konsep transparansi belanja pajak (*treatment* 2) kesediaan mereka untuk menjadi Wajib Pajak yang baik lebih besar. Sehingga tahun depan akan melaporkan SPT Tahunan dengan tepat dan benar. Tahap empat, 3 orang yang ber NPWP dan melaporkan pajaknya tapi perhitungannya tidak benar. 1 orang memang sengaja mengecilkan penghasilannya dan 2 orang salah perhitungan karena tidak mengetahui cara penghitungan yang benar, dan asal melaporkan saja. 1 orang yang sengaja

mengecilkan penghasilan saat pelaporannya diberikan pertanyaan apabila negara melaporkan belanja pajak dengan lebih transparan sesuai dengan penjelasan di atas (*treatment*).

Dia memberikan jawaban bila negara memiliki kebijakan seperti itu maka untuk tahun yang akan datang akan melaporkan jumlah pajaknya dengan benar sesuai dengan ketentuan. Sedangkan 2 orang diberikan penjelasan bagaimana cara penghitungan dan pelaporan yang benar (*treatment* 1) menyatakan akan melaporkan dan memperhitungkan pajaknya dengan benar ditahun yang akan datang. Dan saat dijelaskan konsep transparansi belanja pajak (*treatment* 2), mereka setuju dan menyatakan akan menjadi Wajib Pajak yang lebih patuh di masa yang akan datang.

Tabel 1
 Rekapitulasi Hasil Wawancara yang Memenuhi Kriteria

Wajib Pajak	N P W P		L a m a K e r j a		Melaporkan Pajak	
	P u n y a	T i d a k	> 1 0	<10	I y a	Ti d a k
Orang pribadi	9	6	1 3	2	3	12
T o t a l	1	5	1	5	1	5

Tabel 2
Hasil Wawancara Responden

No	Usia	Sudah Memiliki NPWP/Belum	Lama bekerja	Melaporkan /Tdk Melaporkan Pajak	pengetahuan tentang (treatment 1): Apakah responden			Bila negara transparan melaporkan belanja pajak (treatment 2)	Keterangan (Follow up tahun depan)
					tahu kapan melaporkan pajak	tahu cara menghitung pajak	dengan sengaja tidak melaporkan semua penghasilan		
1	36	Sudah	12 th	Melaporkan	tahu	kurang tahu diserahkan pada konsultan	konsultannya tidak melaporkan semua penghasilan	maka akan melaporkan semua jumlah pajak dengan benar	Bila cara menghitung mudah akan menghitung sendiri dan melaporkan sendiri
2	35	Sudah	12th	Melaporkan	tahu	tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar
3	36	Sudah	12 th	Tidak melaporkan	tahu	tahu		maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar	lupa melaporkan karena sibuk, tahun depan akan melaporkan

									dengan tepat waktu
4	35	Sudah	10 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu
5	45	Belum	20 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu
6	42	Sudah	18th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
7	40	Belum	18 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat	akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar

8	38	Belum	16 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
9	26	Belum	4 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
10	34	Belum	5 th	Tidak melaporkan	tidak	tidak tahu		akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung dengan benar
11	38	Sudah	18 th	Melaporkan	tahu	tidak tahu	ya	maka akan melaporkan jumlah pajak dengan benar akan melaporkan pajak dengan tepat waktu dan menghitung

									ung denga n benar
1 2	34	Sudah	10 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		maka akan melapor kan jumlah pajak dengan benar	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
1 3	42	Sudah	20 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		maka akan melapor kan jumlah pajak dengan benar	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
1 4	42	Belum	20 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu		maka akan melapor kan jumlah pajak dengan benar	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar

1 5	42	belum	20 th	Tidak melaporkan	tahu	tidak tahu	maka akan melapor kan jumlah pajak dengan benar	akan melapor kan pajak dengan tepat waktu dan menghit ung dengan benar
--------	----	-------	-------	---------------------	------	---------------	--	---

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, Tujuh responden yang tidak ber NPWP meskipun sudah memenuhi jumlah PTKP bersedia langsung membuat NPWP setelah mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak setelah ber NPWP.

Dan mereka menyatakan akan menjadi Wajib Pajak yang baik bila konsep transparansi belanja pajak sesuai yang diusulkan di atas diterapkan oleh negara Indonesia. Karena lebih terlihat efek dan imbas dari pajak yang mereka bayarkan. Sedangkan 1 Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya dengan sengaja mengecilkan pajaknya setelah mendapatkan penjelasan terkait konsep transparansi belanja pajak di atas menyatakan setuju dengan konsep itu dan bila memang transparansi belanja pajak dilakukan maka responden tersebut akan melaporkan dengan benar penghasilan

yang mereka peroleh. 2 Wajib Pajak yang lain akan menghitung dengan benar terlebih mendengar konsep transparansi belanja pajak di atas. Enam Wajib Pajak yang baik sengaja maupun tidak, tidak melaporkan pajaknya menyatakan saat ini tahu tentang aturan pelaporan pajak yang benar. Dan menyatakan akan melaporkan pajaknya dengan benar juga menyatakan setuju dan sepakat dengan konsep transparansi belanja pajak.

SIMPULAN

Dari data wawancara dan hasil yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, Pengetahuan tentang peraturan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak serta bagaimana cara menghitung juga kapan harus melaporkan SPT sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, terutama kepatuhan secara sukarela.

Konsep transparansi belanja pajak yang ditawarkan di atas membuat motivasi Wajib Pajak untuk patuh secara sukarela meningkat.

Bentuk transparansi belanja pajak yang diulas di depan, dalam perspektif Amerika belum tentu bisa dikembangkan di Indonesia, untuk itu perlu studi yang lebih lanjut untuk memahami dan mengadaptasikan hal tersebut supaya diterapkan di Indonesia. Perlu adanya tindak lanjut atau pendalaman studi tentang transparansi belanja pajak yang bisa diterapkan di Indonesia karena apa yang dicontohkan di Amerika belum tentu bisa diaplikasikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Da vis, Jon S., Hecht, Gary Dan Perkins,

Jon D. Social Behaviors, Enforcement, And Tax Compliance Dynamics. *The Accounting Review*. Vol 78,1. Hal. 39-69, Januari (2003).

Djawadi, Behnud M Dan Fahr, Rene. The Impact Of Tax Knowledge Ang Budget Spending Influence On Tax Compliance. *Discussion Paper No 7255*. IZA University Of Paderborn. Germany, February (2013)

Franzoni, A. Luigi. *Tax Evasion And Tax Compliance*. University Of Bologna, Italy, (1999).

Harahap, A. Asri. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integrita Dinamika Press, (2004).

Jones, Sally M. *Principles Of Taxasion : For Bussiness And Investment Palnning*. New York: Mcgraw Hill, (2003).

Machogu C.G Dan Amayi Jairus B. The Effect Of Tax Payer Education On Voluntary Tax Compliance, Among SMES In Mwanza City Tanzania. *International Journal Of Marketing, Financial Service & Mangement Reaseach*. Vol 2 No 8, August (2013).

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, (2009).

Mayer, Marda Br. S. Pemeriksaan Pajak Sebagai Tindakan Pengawasan Atas Pelaksanaan Sistem Self Assessment Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus: KPP Medan Timur). Unpublished *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2003).

- Palil, M Rizal. Does Tax Knowledge Matter IN Self Assessment System? Evidence From Malaysia Tax Administrative. *The Journal Of American Academy Of Bussiness*. Cambrige. No. 2. Maret, (2005).
- , Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 13/PJ.331/2003 Tentang Tata Cara Penentuan Wajib Pajak Patuh Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Schisler, Dan L. Equity, Aggressiveness, Consensus: A Comparison Of Tax Payers And Tax Preparers. *Accounting Horizons*. Vol 9. No 4. Desember. Hal. 76-87, (1995).
- Siahaan, Fadjar OP. The Influence Of Tax Fairness An Communicatioan On Voluntary Compliance: Trust As An Intervening Variable. *Internasional Jurnal Of Bussiness* Vol 3 No 21. November (2012).
- Sugiyono (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Agus. Partisipasi Wajib Pajak Sebagai Barometer Kekuatan Negara Demokrasi: Studi Empiris Persepsi Masyarakat Wajib Pajak Dan Evaluasi Partisipasi Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Tahun (1998). Unpublished *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2004)

KAJIAN PERKEMBANGAN PENELITIAN PEMASARAN FILM

Nuryadi Wijiharjono

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Email: nurwiha@gmail.com

Diterima: 31 Juli 2017; Direvisi: 7 Agustus 2017; Disetujui: 21 Agustus 2017

Abstract

The purpose of this study is to present the most likely conceptual scheme in film marketing research. Based on the study of several leading international journals, many factors are interrelated in film consumption so that the use of quantitative research alone is not sufficient in explaining the phenomenon of film consumption. Factors such as personal involvement with narrative and film characters are worthy of research. Some theories used by journal article writers reviewed in this paper are consumer behavior theory, marketing theory, cognitive theory, communication theory, group dynamics theory, and existentialist phenomenologies. As much. Analysis method on the five articles (quantitative) using regression statistic tool. The data used in the five articles (quantitative) is secondary data. Only on qualitative (phenomenological) approaches that use primary data, directly from the consumer experience.

Keywords: *Film Consumption; Actor; Genre; Award; Release Strategy; Film Critics; Service-Innovations.*

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk mengemukakan skema konseptual yang paling mungkin dalam penelitian pemasaran film. Berdasarkan telaah atas beberapa jurnal internasional terkemuka, banyak faktor yang saling berhubungan dalam konsumsi film sehingga penggunaan penelitian kuantitatif saja kurang mencukupi dalam menjelaskan fenomena konsumsi film. Faktor-faktor seperti keterlibatan secara personal dengan narasi dan karakter film layak untuk diteliti. Beberapa teori yang digunakan oleh para penulis artikel jurnal yang ditelaah dalam tulisan ini, adalah teori perilaku konsumen, teori pemasaran, teori kognitif, teori komunikasi, teori dinamika kelompok, dan fenomenologi-eksistensial. Sebanyak. Metode analisis pada kelima artikel (kuantitatif) menggunakan alat statistik regresi. Data yang digunakan pada kelima artikel (kuantitatif) adalah data sekunder. Hanya pada pendekatan kualitatif (fenomenologis) yang menggunakan data primer, langsung dari pengalaman konsumen.

Kata Kunci: *Konsumsi Film; Aktor; Genre; Award; Strategi Rilis; Kritik Film; Service-Innovations.*

PENDAHULUAN

Beberapa waktu lalu dua ormas Islam terkemuka di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU), terlibat dalam produksi film layar lebar. Judul dan cerita filmnya pun diambil dari tokoh sentral kedua ormas tersebut, “Sang Pencerah” dan “Sang Kiai”. Kedua Pahlawan Nasional yang menjadi tokoh dalam film tersebut, yakni KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Ash’ari, keduanya merupakan sahabat karib dalam menuntut ilmu dan dalam perjuangan kemerdekaan.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila penontonnya datang dari berbagai kalangan, termasuk presiden dan tokoh nasional lainnya. Terlepas dari maksud dan tujuan atas produksi kedua film tersebut, penting bagi insan universitas untuk melakukan kajian secara ilmiah. Sebagai karya budaya kreatif, film bukan hanya sekedar karya seni, melainkan juga sebuah produk industri yang kompleks yang melibatkan banyak kepentingan.

Harus diakui memang, semenjak diperkenalkan konsep industri kreatif (DCMS, 1998), kajian tentang industri perfilman, khususnya film-film Barat, semakin menarik minat. Hal ini tentu

menginspirasi kita untuk meneliti industri perfilman nasional, di tengah-tengah keterpurukan pengusaha bioskop. Harus diakui, mengerjakan sebuah proyek film untuk berakhir sukses tidaklah mudah. Tetapi kesulitan tersebut dapat diatasi dengan cara mengelola strategi portofolio secara bertahap dan fokus.

Portofolio industri perfilman yang dimaksud tersebut adalah: tipe film (*genre*), alur cerita, batasan usia, dan kekuatan bintang film. Secara umum manajemen portofolio film didasarkan pada struktur pengorganisasian untuk mengarahkan peningkatan kinerja. Manajemen portofolio film diharapkan dapat memastikan produk, mengurangi biaya, dan mengatasi risiko (Eliashberg *et al*, 2006).

Dalam industri perfilman, tahap produksi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi satu buah (*one copy/one print*) film. Sedangkan distribusi esensinya adalah seluruh fungsi interaksi distributor dengan para pelanggan (*customers*) dan audiens. Eksibisi merujuk pada aktivitas pertunjukan melalui jaringan bioskop atau situs individual (Eliashberg *et al*, 2006).

Sukses pada tahap produksi film bergantung pada bakat, uang, manajemen, teknologi, kreativitas, dan keberuntungan. Sedangkan pasca produksi, yakni utamanya terkait dengan perencanaan pemasaran dan distribusi (Young *et al*, 2008). Di samping itu, daya tarik yang luas terhadap penonton, perencanaan pemasaran dan distribusi, biaya pemasaran turut memengaruhi sukses film di pasar (Young *et al*, 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis film (*genre*), kekuatan bintang film (*star power*), kritik film (*critical review*) terhadap kinerja pasar industri perfilman (Desai dan Basuroy, 2005). Kritik film memang memiliki pengaruh, tetapi tidak signifikan pada konsumsi film (Terry dan Armond, 2008).

Orientasi komersial melalui kritik dan perbincangan konsumen dapat mengarahkan kinerja pasar. Evaluasi populer konsumen juga membawa pengaruh bagi pengakuan industri. Penilaian artistik dan penilaian komersial adalah ekspresi dari apresiasi penikmat film. Jangan lupa bahwa penghargaan dari kalangan perfilman juga meningkatkan pengakuan untuk industri

tersebut, dan ini merupakan kontribusi penting terhadap kinerja pasar film (Holbrook dan Addis, 2008). Terdapat dua model sukses pemasaran film. Pertama berkaitan dengan kritik seni dan evaluasi film yang diakui. Kedua, berkaitan dengan aspek komersial dan kinerja pasar (Holbrook dan Michela 2008). Salah satu elemen penting yang memengaruhi suksesnya film di pasar adalah strategi rilis, di mana untuk pertama kalinya film tersebut dipromosikan (Elberse dan Anand (2007).

Di samping itu, kekuatan aktor atau bintang film juga ikut mendongkrak pendapatan perusahaan industri film, sebagaimana diindikasikan pada naiknya harga saham industri perfilman di bursa (Elberse, 2007).

Keaktoran seorang bintang film dapat dilihat dari sejumlah penghargaan yang pernah diterimanya (*starartistic history*). Di samping itu keaktoran dapat pula dilihat dari seberapa besar honor yang ia terima (*star economic history*). Tetapi penting diketahui bahwa produksi film adalah sebuah proses kreatif oleh sebuah tim. Jadi, kesuksesannya lebih banyak berhubungan dengan kerja kelompok (Elberse, 2007). Karir seorang artis lebih banyak ditentukan

oleh kreativitas individu (Bridgstock, 2005). Sebab, pekerja seni adalah seorang seniman sekaligus intrepeneur (Eikhof dan Haunschild, 2006). Berkaitan dengan distribusi film, kesimpulan kajian empirik Hennig-Thurau *at al.* (2007) adalah bahwa studio yang memproduksi film dapat menaikkan pendapatannya sampai 16,2 % melalui model yang diajukan para peneliti, yakni model distribusi pasokan sekuensial. Para penulis ini juga menemukan bahwa rilis sebuah film secara simultan pada bioskop, rental video dapat memaksimalkan pendapatan studio film di Amerika Serikat, tetapi di tempat lain justru disumbang dari jalur bioskop (Hennig-Thurau, *et al.* 2007). *Buyers* harus berkolaborasi dengan *suppliers* untuk meminimalkan masalah risiko dan ketidakpastian dalam distribusi industri perfilman (Watson, 2004).

Domestic box office memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pendapatan rental film. Tetapi *foreign box office* tidak berpengaruh signifikan. Secara umum, kinerja pasar asing tidak berkorelasi secara signifikan dengan pasar rental domestik. Faktor utama yang menentukan keuntungan rental video film adalah: *domestic box office*

performance, academy award nominations, sequels, movies in the children genre, and the number of theaters showing the film during the opening week of wide release (Terry dan Armond, 2008). Dalam pasar video film, superstar berpengaruh penting pada penjualan video. Tetapi dengan banyak variasi di mana pada waktu yang bersamaan judul-judul *non-selling* juga mengalami peningkatan secara substansial. Di samping itu, terkait dengan distribusi video, *ritel online* berdampak pada distribusi penjualan video rumahan karena lebih murah biaya transaksinya. Poin pentingnya adalah bahwa lingkungan bisnis telah berubah dan membawa tantangan yang signifikan dalam pemasaran. Model promosi yang dilakukan oleh Amazon misalnya, merupakan contoh bentuk komunikasi yang sesuai karena konsumen tetap tinggal di tempat dari mana mereka dapat memesan produknya. Pendeknya, distribusi model klasik merupakan jalur distribusi yang panjang atau *long-tail* (Elberse dan Oberholzer, 2008). Advertensi film berpengaruh tidak langsung terhadap harga saham studio film di pasar modal (Joshi dan Hanssens, 2008). Advertensi juga memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap ekspektasi pasar, tetapi dampak advertensi adalah rendah untuk film berkualitas rendah (Elberse dan Bharat, 2007). Di samping itu, untuk film-film *box office*, advertensi berpengaruh baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Bagaimanapun, penilaian konsumen dipengaruhi oleh advertensi, hal yang sama terjadi juga pada sukses film (Hennig-Thurau, 2006). Penting dipahami bahwa menikmati sebuah karya film adalah sebuah pengalaman hidup individu. Keterlibatan konsumen dengan karakter narasi film dapat memperdalam keterlibatan mereka, khususnya bagi penikmat film. Secara alamiah keterlibatan konsumen film bergantung pada usia, gender, tetapi juga pada motivasi dan kepentingan pribadi (Batat dan Wohlfeil, 2009).

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Data Film Box Office (Desember 1990-1993), dengan sampel

sebanyak 172 film, dengan jumlah kritik/review sebanyak 2.104 buah. Sedangkan metode analisis menggunakan cara regresi terhadap prosentase jumlah kritik positif, kritik negatif, dan gabungan dari keduanya (positif-negatif).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal pertama dalam kajian penelitian ini melihat pentingnya kritik dalam industri hiburan, khususnya film. Dalam industri hiburan, kritik atau *review* terhadap sebuah film akan berpengaruh terhadap sukses film tersebut di pasar, sebagaimana ditunjukkan oleh Jehoshua Eliashberg dan Steven M Shugan (1997).

Penelitian tersebut menggunakan Teori Kritik. Menurut teori kritik, kritik berpengaruh terhadap siklus industri perfilman (Burzynski dan Bayer, 1977). Kritik berpengaruh pada pilihan konsumen untuk menonton film (Palmgreen *et al*, 1988).

TABLE 2
Motion Pictures and Critic Summary Statistics

Variable	Median	Mean	Standard Deviation
Film life in weeks	15.0	13.8	2.6
Screens (first week)	1122.5	929.0	870.2
Box office (first week)	\$3,659,366.5	\$7,052,148.0	\$9,689,897.0
Cumulative box office	\$28,467,405.5	\$41,300,989.1	\$4,422,290.3
Total reviews per film	24.0	29.6	19.7
Percentage of positive reviews	47.3%	47.0%	23.7%
Percentage of negative reviews	20.0%	24.9%	19.6%
Percentage of mixed reviews	27.1%	28.1%	13.8%

Number of Observations = 56

Hasil analisis menunjukkan bahwa kritik film hanya memberikan prediksi, tetapi tidak dapat dipastikan hasilnya. Kritik yang positif berpengaruh secara signifikan terhadap sukses film baik mingguan maupun keseluruhan. Sedangkan kritik yang negatif tidak signifikan berpengaruh secara mingguan, tetapi hanya berpengaruh secara kumulatif.

TABLE 3
Pearson Correlation Matrix

	Percentage of Positive Reviews	Percentage of Negative Reviews	Percentage of Mixed Reviews	Total Reviews
Percentage of positive reviews	1.000 (.000)			Pearson Correlations (Significance Level)
Percentage of negative reviews	-.814 (.000)	1.000 (.000)		
Percentage of mixed reviews	-.559 (.000)	-.027 (.845)	1.000 (.000)	
Total reviews	.025 (.855)	-.020 (.886)	-.015 (.912)	1.000 (.000)

Bartlett Chi-Square Statistic: 1622.262
Degrees of Freedom = 6 (.000)
Number of Observations = 56

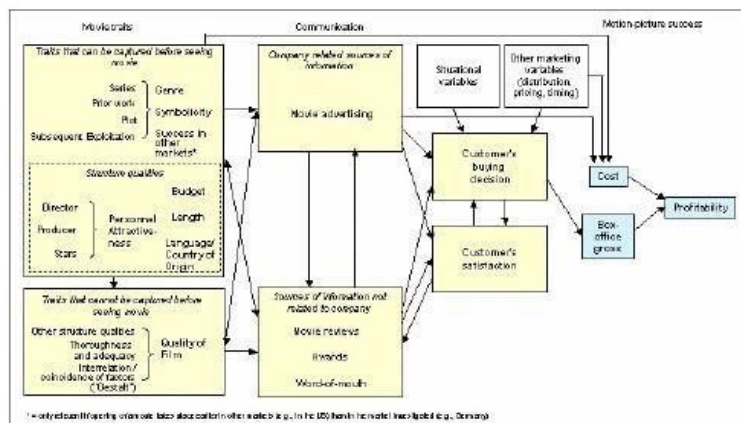
Jadi, dapat disimpulkan bahwa baik kritik yang positif maupun yang negatif keduanya berpengaruh signifikan secara kumulatif.

Dengan demikian temuan ini lebih mendukung teori bahwa kritik/review film merupakan prediktor daripada sebagai pengaruh langsung. Menurut peneliti ini terdapat faktor lain seperti *release timing*, *trailers*, dan *advertensi*. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan penelitian yang sama tetapi dengan genre film yang

lebih spesifik, bukan pada sejumlah film dengan genre yang beragam. Jurnal kedua, mengkaji tentang faktor-faktor yang menentukan sukses inovasi pelayanan dalam kasus pemasaran film (2011). Meskipun artikel ini bukan merupakan penelitian empirik, tetapi *framework* dan proposisi yang diajukan oleh para penulis artikel ini menarik untuk dikaji. Artikel ini menempatkan inovasi pelayanan (*service innovations*) sebagai variabel yang

menentukan sukses film. Para penulis menawarkan *framework* inovasi pelayanan artikel ini (Thorsten Hennig, T., *et al.* 2001) dalam pemasaran film sebagai berikut:

FIGURE 2
A Framework for Motion Pictures' Success



Berdasarkan kerangka di atas, para penulis artikel ini mengajukan proposisi 11 proposisi. Kata kunci dari proposisi yang diajukan adalah: *Genre*/jenis film; Simbol; Box office; Popularitas direktur, Popularitas produser, Besaran bujet/anggaran; Kualitas estetik; Advertising, Pandangan para ahli (*experties*); Penghargaan (*award*); dan komunikasi dari “mulut ke mulut” (*word-of-mouth*).

Kesimpulan dari kajian artikel ini adalah bahwa sukses pemasaran film dipengaruhi oleh elemen kunci di atas. Dengan kata lain, bagaimana elemen-elemen kunci tersebut didayagunakan secara inovatif dalam

industri film. Penulis artikel ini mengakui bahwa karya film merupakan karya yang memerlukan inovasi yang tinggi, baik dalam produksi maupun distribusi.

Oleh karena itu, implikasi dari artikel ini, sebagaimana dikemukakan oleh para penulisnya, dalam praktik pemasaran film, artikel ini bukanlah segalanya. Artinya bukanlah “golden formula” yang mampu menjamin sukses film. Sebab, pilihan konsumen dipengaruhi juga oleh persepsi dan jaringan manajemen bioskop (distribusi). Karena itu, inovasi pelayanan menjadi penting dalam pemasaran film.

Jurnal ketiga dalam kajian ini menggunakan model ekonometrik, artikel ini bertujuan melakukan kajian pengenalan produk baru (film) pada pasar domestik dan global.

Dengan menggunakan pendekatan dinamik penawaran-permintaan ada 2 pertanyaan pokok yang diajukan: Apa faktor determinan yang mempengaruhi perilaku pengelola pameran/pemutaran film perdana? Apa faktor determinan yang mempengaruhi pengunjung (*audiencies*) terhadap sebuah film?

Penelitian didasarkan pada teori bahwa interaksi perilaku konsumen dan ritel adalah terbatas (Jones dan Mason, 1990). Karena itu, perlu dilakukan investigasi terhadap dinamika antara permintaan dan penawaran dalam konteks industri film (Ritz, 1991). Hasil penelitian ini adalah bahwa pembukaan pemutaran film perdana di AS dan di luar negeri (luar AS) berpengaruh terhadap ekspektasi film tersebut. Iklan memegang peranan penting dalam dan menjadi prediktor kunci dalam penerimaan atau penghasilan dari pembukaan pemutaran film perdana. Kompetisi pendapatan film ditentukan oleh gagasan pengalaman dan film-fil baru lain yang

sedang dirilis. Anggaran dan kekuatan bintang film hanya berpengaruh kecil terhadap pendapatan film. Implikasi terhadap aspek manajerial adalah bahwa untuk distributor film, kunci suksesnya ada pada bauran pemasaran (*marketing mix*).

Sebagai rekomendasi, alokasi sumberdaya untuk strategi marketing, khususnya untuk pasar luar negeri, perlu ditingkatkan. Di samping itu, iklan merupakan instrument penting dalam strategi tersebut.

Khusus untuk pasar internasional, diperlukan strategi marketing secara berkelanjutan dan simultan.

Jurnal keempat dalam kajian ini adalah mengenai peran aktor bintang film dalam memengaruhi sukses film di pasar. Penting dikemukakan di sini, penulis artikel ini melakukan pengujian ulang terhadap hubungan antara keterlibatan aktor bintang film (*star*) dan pendapatan (*revenues*) dalam suatu penelitian, dan mengembangkan temuan-temuan yang menentukan dan saling berhubungan. Dalam melakukan penelitiannya, penulis artikel ini menggunakan kajian kejadian (*event study*). Sebelum secara nyata menguji hipotesisnya di pasar riil industri film, yakni perusahaan-perusahaan film yang

terdaftar pada NYSE (*New York Stock Exchange*), ia melakukan simulasi terlebih dahulu berdasarkan permainan pada HSX (*Hollywood Stock Exchange*), sebuah situs permainan yang menggambarkan pasar industri film (*multiple game*) secara online. Terdapat pandangan yang beragam mengenai kekuatan bintang film dengan pendapatan industri film. Ada yang mengemukakan bahwa “bintang-bintang film merupakan lokomotif di balik industri besar Hollywood (Bing 2002).

Sebaliknya, ada pula pandangan yang meragukan mengenai pengaruh kekuatan seorang aktor. Pandangan ini melihat bahwa bukan aktornya yang membuat sukses sebuah film, melainkan karena filmnya itu sendiri (Ackman 2002). Sebab, film merupakan hasil dari kerja dari beberapa aktor dan pekerja lain yang terlibat. Penelitian sebelumnya telah mengabaikan pengaruh individu dan saling ketergantungan antar aktor bintang film. Terdapat sinyal bahwa keraguan tentang tingkat pengembalian investasi pada industri perfilman menyebabkan perlunya pengaturan kontrak terkait dengan bakat keaktoran. Keterlibatan aktor atau bintang

film dalam memproduksi film serta keberhasilan film itu sendiri menarik untuk dikaji. Pertanyaan sentralnya adalah, apakah kekuatan aktor bintang film mampu mempengaruhi suksesnya sebuah film? Mengingat bayaran seorang aktor mencapai jutaan dolar, apakah keterlibatan aktor bintang film penting untuk keberhasilan sebuah film? Artikel ini mau menjelaskan perdebatan mengenai peranan aktor bintang film terhadap tingkat pengembalian investasi atau pendapatan perusahaan industri perfilman (*Hollywood*) berdasarkan penelitian (*event study*).

Beberapa penelitian terkait antara lain telah mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara aktor bintang film dengan pendapatan pada perusahaan film. Namun belum mendeteksi hubungan antara bakat keaktoran dengan pendapatan (Austin 1989; De Vany dan Walls 1999; Litman 1993; Litman dan Ahn 1998; Ravid 1999). Tetapi peneliti lain telah menemukan bukti adanya keterkaitan antara pendapatan secara akumulatif dengan bakat keaktoran yang terlibat dalam film tersebut (Ainslie, Dreze, dan Zulryden (2005); Albert 1998; Chatterjee Basuroy dan Ravid (2003);

Elberse dan Eliashberg (2003); Faulkner dan Anderson (1987); Litman dan Kohl (1989); Neelamegham dan Chintagunta (1999); Prag dan Kasavant (1994); Sawhney dan Eliashberg 1996; Sochay (1994); Wallace, Seigerman dan Hilbrook 1993). Tziner dan Eden (1985), mempelajari dinamika kelompok pada kru militer dimana produktivitas kelompok secara positif terkait dengan kemampuan anggota kelompok. Groysberg, Polzer, dan Elfenbein (2006) memeriksa analisis ekuitas di Wall Street dan menemukan bukti bahwa individu yang berkinerja tinggi bermanfaat bagi anggota kelompoknya. Artinya, individu berkinerja tinggi semacam itu bila ditempatkan pada konteks industri film dapat dianalogkan sebagai seorang aktor bintang film. Karena produksi film juga melibatkan kerja banyak pihak semacam dinamika kelompok.

Mengikuti Albert (1998), seorang aktor dapat disebut sebagai bintang karena beberapa alasan berikut ini: diakui keterampilannya, kepribadian yang menarik, mengundang banyak publisitas gratis, memiliki kemampuan berinvestasi, atau juga bisa karena keberuntungan. Oleh karena itu, di antara para peneliti juga

berbeda pandangan dalam mengukur kebinatangan seorang aktor film. Ada yang hanya berdasarkan penilaian sebuah majalah atau berdasarkan survey. Misalnya Sawhney dan Eliashberg (1996), mereka berdua menggunakan *dummy* yang didasarkan pada daftar bintang yang telah ditandai pada majalah *Variety*. Peneliti lainnya, seperti Elberse dan Eliashberg (2003) serta Ainslie, Dreze, dan Zulfryden (2005) mengukur kekuatan seorang bintang berdasarkan data survey dari *The Hollywood Report.Pertama*, dinamika kelompok.

Kerangka teori ini didasarkan pada teori dinamika kelompok di mana produktivitas kelompok secara positif terkait dengan kemampuan anggota kelompok (Tziner dan Eden 1985),. Kemudian, kemampuan anggota kelompok ternyata berhubungan dengan---dan dipengaruhi oleh---kinerja individunya, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Groysberg, Polzer, dan Elfenbein (2006) yang memeriksa analisis ekuitas di *Wall Street* dan menemukan bukti bahwa individu yang berkinerja tinggi bermanfaat bagi anggota kelompoknya. Artinya, individu berkinerja tinggi semacam itu bila ditempatkan pada konteks industri film

dapat dianalogkan sebagai seorang aktor bintang film. Karena produksi film juga melibatkan kerja banyak pihak semacam dinamika kelompok. *Kedua*, kriteria kebhintangan seorang aktor film. Ravid (1999) mengemukakan bahwa pengelompokan bintang film berdasarkan antara lain: (1) Apakah mereka telah dinominasikan untuk atau telah memenangkan Academy Award; (2) Apakah mereka pernah terlibat dalam film-film laris pada tahun-tahun sebelumnya.

Pandangan Ravid ini terkait dengan dua macam reputasi yang menjadi sumber kekuatan seorang bintang yakni, pertama reputasi ekonomi yang berasal dari kesuksesan mereka dalam melahirkan film-film berkategori *box office*; dan kedua adalah reputasi artistik yang berasal dari pengakuan para kritikus film maupun kawan sejawat seprofesi (Delmestri, Montanari, dan Usai 2005). Studi lain menunjukkan bahwa riwayat sang bintang dalam melahirkan film-film *box office* telah dijadikan salah satu indikator untuk melihat potensi film-filmnya ke depan (misal, Lampel dan Shamsie 2003; Litman dan Kohl 1989; Ravid 1999; Sochay 1994).

Reputasi artistik dalam industri film terutama terungkap melalui penghargaan ataupun nominasi, apresiasi penonton, pengakuan media atau publik lainnya (Wallace, Seigerman, dan Holbrook 1993). Kriteria semacam ini juga bisa dijadikan prediktor masa mendatang terhadap bintang film serta filmnya yang kemungkinan berkategori *box office*.

Ketiga, kedua bentuk reputasi (ekonomi dan artistik) paralel dengan “dimensi status” dalam teori dinamika kelompok, yakni, bagaimana dan berapa banyak seorang bintang film memperoleh penghargaan, pengaruh, serta pengakuan dari kawan sejawat seprofesi. (Anderson et al. 2001).

Status merupakan bagian takterpisahkan dari komposisi sebuah tim. (West dan Allen 1997), tetapi jarang diperhatikan sebagai prediktor dalam menilai kinerja sebuah tim (Groysberg, Polzer, dan Elfenbein 2006). Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti yang juga penulis artikel ini mau menggunakan “produktivitas kelompok” dan “dimensi status” yang ia ambil dari teori dinamika kelompok. Dalam kasus ini, produktivitas kelompok” ia proksikan dengan “pendapatan perusahaan”

(*revenues*), sedangkan “dimensi status” ia proksikan menjadi “kekuatan aktor bintang film” (*the power of stars*). Selanjutnya, kekuatan status keaktoran sebagai bintang film ditentukan oleh dua reputasi, yakni reputasi ekonomi dan reputasi artistik. Reputasi ekonomi berasal dari kesuksesan mereka dalam melahirkan film-film berkategori *box office*. Sedangkan reputasi artistik berasal dari pengakuan para kritikus film maupun kawan sejawat seprofesi.

Peneliti yang juga penulis artikel ini, dalam melakukan penelitian awal melalui “simulasi” bermaksud menghitung pendapatan perusahaan atau studio film yang ia sebut sebagai CAR (*cumulative abnormal return*). CAR inilah yang ia maksudkan sebagai variabel terikat dalam analisis silang (*cross-sectional analysis*). Sedangkan variabel bebas (kekuatan aktor bintang film) ia gambarkan berdasarkan pasar HSX *MovieStock* dan *StarBond* berikut.

Star Economic History, untuk mengungkapkan riwayat nilai ekonomi seorang bintang film pada saat diumumkankannya *casting* atau partisipanya terhadap sebuah film. Jika terdapat

beberapa bintang film maka yang digunakan adalah nilai rata-ratanya.

Star Artistic History, untuk mengukur riwayat kinerja artistiknya sampai saat *casting* diumumkan berdasarkan jumlah penghargaan yang diperolehnya (*Oscar* atau *Golden Globes*). *Cast Count*, untuk mengukur jumlah anggota bintang lainnya yang terlibat dalam film tersebut. Pengumuman *casting* yang direspon positif dikurangi dengan pengumuman yang direspon negatif.

Cast Economic History, untuk memperoleh riwayat nilai ekonomi anggota bintang film lain pada waktu yang sama di mana *casting* diumumkan berdasarkan rata-rata catatan 5 buah film *box office* terakhir.

Cast Artistic History, untuk mengungkapkan peran artistik anggota bintang film lain dengan cara membagi jumlah nominasi penghargaan *Golden Globe* dan *Oscar* yang dimenangkan pada saat diumumkan.

Penulis artikel ini pertama-tama mau menguji kedua dimensi (reputasi ekonomi dan reputasi artistik seorang aktor bintang film). Kemudian penulis melanjutkan hipotesisnya untuk menilai peran bintang film lainnya dalam film tersebut karena

produksi film adalah kompleks yang melibatkan banyak pihak bukan hasil kerja seorang aktor saja. Maka, hipotesis alternatif yang ia ajukan adalah sebagai berikut:

H1: Dampak positif seorang bintang film terhadap pendapatan sebuah film *box office* bergantung pada; reputasi ekonomi bintang film yang direfleksikan oleh riwayat film *box office*-nya; dan reputasi artistik bintang film dicerminkan oleh dirinya dalam memperoleh penghargaan atau nominasi penghargaan (*award*).

H2: Dampak positif seorang bintang film terhadap pendapatan film *box office* bergantung pada; jumlah peran bintang film lainnya dalam film tersebut; reputasi ekonomi bintang film lainnya pada film tersebut; dan reputasi artistik bintang film lainnya pada film tersebut.

Melalui pendekatan *Event Study* (kajian kejadian), model yang digunakan oleh penulis artikel ini adalah persamaan regresi linear, sebagaimana ditunjukkan dengan model berikut:

$$AR_{it} = R_{it} - E(R_{it}),$$

Dimana:

AR_{it} adalah abnormal return, R_{it} adalah *actual return*, dan $E(R_{it})$ adalah *normal return*. Dalam melakukan *Cross-Sectional Analysis*, di mana CAR_i (τ_1, τ_2), merupakan variabel terikat (*dependent variable*), penulis artikel ini menggunakan model berikut:

$$CAR_i = \alpha + \beta_1 A_i S_i + e_i$$

Dimana:

CAR merupakan abnormal return kumulatif (*cumulative abnormal return*).

$$R_{it} = \mu_i + \lambda_i R_{mt} + \delta_{it}, \text{ dengan} \\ E[\delta_{it}] = 0, \text{ Var} [\delta_{it}] = \delta^2 AR_i$$

Dimana:

R_{it} adalah *return* laba perolehan dari sekuritas studio film, dan R_{mt} laba perolehan dari portofolio pasar, yang dinilai berdasarkan indeks Standard & Poor's 500.

Sumber data untuk simulasi adalah HSX, sebuah pasar online yang difokuskan pada industri film. Meskipun HSX bukan pasar nyata, tetapi simulasinya mampu menghasilkan prediksi yang mendekati akurat, misalnya prediksinya tentang beberapa film yang bakal masuk *box office*. Penulis artikel ini melakukan validasi prediktif HSX setelah mendeskripsikan datanya secara rinci. Kerangka sampel

untuk penelitian ini terdiri dari semua pengumuman peran resmi yang muncul di pasar HSX. Rekap laporan antara Nopember 2001 dan Januari 2005. Sedangkan data riel diperoleh dari pasar saham untuk perusahaan-perusahaan film atau studio film yang tercatat di NYSE dari Januari 2001 sampai Desember 2004, dan terutama untuk beberapa studio film yang data dan informasinya telah dimiliki oleh penulis artikel ini karena tidak semua informasi bisa diakses. Untuk mengukur dinamika pasar secara keseluruhan, penulis artikel ini menggunakan data Indeks *Standard & Poor's 500* untuk periode Januari 2001 sampai Desember 2004.

Pendekatan penelitian menggunakan *event study*, di mana data diperoleh dari observasi terhadap peristiwa yang sedang berlangsung, dalam kasus ini adalah data pasar saham untuk mempelajari dampak bintang film terhadap pendapatan (*revenues*) atau kinerja keuangan perusahaan film. Diingatkan oleh Ravid (1999), pendekatan semacam ini bisa tidak menguntungkan bagi peneliti.

Karena sulitnya mengukur waktu pengumuman *casting*, ini yang yang

pertama. Kedua, pengumuman akan diproduksinya sebuah film mungkin tidak signifikan terhadap perubahan harga saham studio film, apalagi bila perusahaan tersebut merupakan bagian dari media milik konglomerat. Tetapi, penulis artikel ini berargumen bahwa dengan simulasi berdasarkan data HSX bisa mengurangi kemungkinan kerugian seperti itu. Pendeknya, penulis artikel ini mengaku melakukan modifikasi berdasar data HSX agar bias dapat dihindari, disamping juga melakukan verifikasi secara manual serta pencarian informasi secara ekstensif baik offline maupun online.

Penelitian yang ditulis dalam artikel ini menggunakan olah statistik: Korelasi, Regresi, dan *Cross-Sectional Regression Analysis*. Sedangkan untuk memverifikasi tingkat signifikansi, peneliti ini menggunakan Statistik uji-t (*t-test*) dan uji-F (*F-test*).

Tahap Event Study pada Simulasi HSX, Pertama, pada tahap uji simulasi HSX, peneliti yang juga penulis artikel ini berharap pengumuman *casting* (berita tentang seorang aktor bintang film yang akan bermain dalam sebuah produksi film) akan berdampak pada harga HSX. Melalui

kajian kejadian (*event study*) berdasarkan data HSX (lihat, Tabel 2 dalam artikel, hal 113), ditemukan bahwa selama dua minggu sebelum dan tiga minggu setelah diumumkannya *casting* terdapat respon terhadap pengumuman tersebut sebanyak 1222 positif dan sebanyak 36 negatif. Nilai positif artinya berita tersebut akan meningkatkan harapan terhadap pendapatan perusahaan (CAR) yang tercermin pada harga pasar HSX, dan demikian pula sebaliknya jika bernilai negatif.

Pengamatan melalui simulasi dengan HSX juga menghasilkan kenaikan rata-rata CAR di dekat hari pengumuman. Ketika berita *casting* dipublikasikan, harga HSX meningkat rata-rata hampir H\$3. Mengingat setiap Hollywood Dollars (H\$) senilai \$1 juta pendapatan untuk film-film *box office* selama empat minggu pertama merilis film, maka seorang aktor bintang film rata-rata bernilai \$ 3 juta.

Kedua, laba rata-rata mulai bergerak ke arah yang diharapkan pada hari -5. Artinya, pelaku pasar mulai menanggapi berita *casting* sebelum diumumkan. Skenario ini sesuai dengan asumsi yang mendasari konsep “jendela peristiwa” (*event window*),

di mana kapan pertama berita *casting* dibuat tidak selalu hari itu pula dipublikasikan di situs HSX. Ini berarti pelaku pasar sudah menyerap informasi sebelum diumumkan di HSX. Meskipun tentu ada pelaku pasar lainnya yang kurang menyadari akan hal ini. Hal ini hanya mau menunjukkan bahwa pada saat peluncuran film, pasar diharapkan akan dalam rencana proyek film cepat menanggapi. Respon pasar terhadap pengumuman *casting* semacam inilah yang akan turut mendongkrak suksesnya sebuah film.

Ketiga, pada uji-t sampel ditemukan bahwa perbedaan CAR dalam pengumuman positif dan negatif secara statistik signifikan pada tingkat 1 %. Dengan kata lain, temuan ini mendukung gagasan bahwa partisipasi aktor bintang film memang berpengaruh terhadap film-film *box office*. Terbukti pula, nilai positif pada peringkat tertinggi atas pengumuman diisi oleh aktor-aktor bintang film papan atas (lihat, Tabel 3, dalam artikel, hal 115). Misalnya Tom Cruise ketika diumumkan bergabung, dan sebaliknya ketika dia keluar. Bandingkan dengan bintang baru seperti Natalie Portman yang tidak bisa mengerek harga

pasar setingkat Nicole Kidman dalam rencana produksi film yang sama. Keempat, analisis *cross-sectional* selama tujuh hari di mana CAR sebagai variabel terikat dan pengumuman *casting* serta bakat keaktoran bintang film sebagai variabel bebas (lihat, Tabel 4 dalam artikel, hal 116),

menghasilkan:

Perkiraan untuk Model 1, menunjukkan bahwa *Star Economic History* berhubungan positif terhadap CAR, semakin tinggi riwayat seorang aktor dalam melahirkan film *box office*, semakin besar pula dampaknya terhadap pendapatan yang diharapkan untuk film yang dibintanginya mendatang. Hasil ini mendukung H_1 , dengan koefisien sebesar 0,04. Hal yang sama berlaku pula untuk *Star Artistic History*, dimana pengakuan kawan sejawat dan penghargaan Oscar atau Golden Globe pada sebuah film berpengaruh terhadap nilai pendapatan yang diharapkan dengan koefisien sebesar 0,421. Meskipun harus dicatat di sini bahwa koefisien determinasi (R kuadrat) hanya sebesar 0,22. Artinya, model ini hanya mampu menjelaskan 22 % dari keragaman CAR. Dengan perkataan lain, terdapat faktor-faktor lain sebesar 78 % di luar

model tersebut. Sedangkan pengujian variabel bebas dalam model ini secara bersama sama melalui uji-F menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,01. Model 2 mencakup tiga variabel bebas (*Cast Count*, *Cast Economic History*, dan *Cast Artistic History*) yang mencerminkan karakteristik pemain. Dengan *R-square*, signifikansinya lebih tinggi daripada Model 1, yakni 0,27 pada taraf nyata $\alpha = 0,05$. Hasil ini mendukung H_2 , bahwa dampak positif seorang bintang film terhadap pendapatan film *box office* bergantung pada: (a) jumlah peran bintang film lainnya dalam film akan tersebut; (b) reputasi ekonomi bintang film lainnya pada film tersebut; dan (c) reputasi artistik bintang film lainnya pada film tersebut.

Model 3, menunjukkan hasil observasi yang lebih bermakna yang mencakup interaksi variabel antar bebas. Interaksi term *Star Economic History X Cast Economic History* adalah positif dan memiliki signifikansi yang tinggi. Artinya, catatan riwayat peran seorang aktor bintang film merupakan kekuatan yang menjadikan filmnya sukses masuk kategori *box office*. Adapun interaksi antara term *Star Artistik*

History X Cast Artistic History adalah juga positif pada tingkat signifikansi 5 %. Hal ini mengindikasikan adanya pengakuan peran keartistikannya atau merupakan pengaruh dari kekuatan reputasi artistiknya. Kedua temuan ini (interaksi term *Economic History X Cast Economic History*; dan interaksi *Star Artistik History X Cast Artistic History*) merupakan gagasan dalam merekrut aktor bintang film untuk menaikkan pendapatan atau fungsi produksi lainnya. Dengan penyesuaian *R-square* pada 0,28 Model 3 menunjukkan penjelasan varians yang paling tinggi.

Tahap Event Study pada Pasar Modal NYSE, masih mendasarkan pada temuan yang sama mengenai hubungan antara keterlibatan bintang dan profitabilitas film, di mana terbukti tidak ditemukan kejadian hubungan (Ravid 1999), maka penulis artikel ini melanjutkan penelitiannya dengan berfokus pada perbedaan metric dan menguji dampak keterlibatan aktor bintang film terhadap penilaian keuangan studio yang memproduksi dan mendistribusikan film.

Melalui cara yang sama, yakni pendekatan *Event Study* berdasarkan data

pada perusahaan atau studio film yang tercatat pada perdagangan pasar modal NYSE serta indeks Standard & Poor's 500. Hasilnya, dengan menggunakan rata-rata pendapatan laba konstan, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan terhadap CAR, positif maupun negatif di mana $M = 0,27$ atau 27 % ; $t = 0,67$, $p > 0,10$; dan $M = -11$; $t = -0,71$, $p > 0,10$. Hal yang sama terjadi dalam *market model* (M), di mana $M = -1,03$; $t = -12$, $p > 0,10$; $M = -0,56$; $t = 0,81$, $p > 0,10$, dan $t = 0,09$, $p > 0,10$. Dengan demikian, secara keseluruhan tidak ada alasan untuk menolak H_0 , (berarti, menerima hipotesis null). Atau dengan kata lain, H_1 ditolak.

Pertama, hanya sedikit aktor bintang film yang berpengaruh terhadap sukses sebuah film, khususnya yang mampu menciptakan penghasilan film jutaan dolar. *Kedua*, tidak ditemukan dampak penting dari bintang-bintang utama secara ekonomi maupun secara artistik, juga tidak ditemukan dampak dari peran anggota bintang film lainnya. *Ketiga*, meskipun aktor bintang film bisa mempengaruhi tingkat pendapatan film, tetapi gagal menemukan bukti yang mampu mendukung

gagasan bahwa aktor bintang film juga mampu mengarahkan (*drive*) penilaian studio film atau perusahaan media yang dimiliki oleh konglomerat. Jurnal kelima adalah penelitian mengenai efektivitas periklanan pre-rilis untuk film.

Penelitian tersebut bertujuan mengkaji pengaruh periklanan terhadap ekspektasi pendapatan industri film. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa iklan berpengaruh positif terhadap pendapatan sebuah film (Ainslie et al, 2005; Basuroy et al 2006). Berdasarkan teori bahwa ekspektasi sebuah film semakin populer jika lebih banyak beriklan (Einav, 2007). Data dari simulasi HSX (*Hollywood Stock Exchange*). Data diolah berdasar model panel dengan teknik regresi dengan pendekatan simulasi. Hasilnya adalah: Pertama, Perubahan dalam periklanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspektasi sebelum rilis film. Kedua, kualitas periklanan berdampak positif terhadap pendapatan film. Implikasi penelitian tersebut adalah: Pertama, perlunya penambahan alokasi anggaran periklanan film melalui televisi. Kedua, dalam konteks kompetisi, yang paling penting adalah memahami bagaimana

lingkungan kompetisi dan bagaimana beriklan secara tepat.

Jurnal keenam, dalam kajian ini adalah mengenai penelitian kualitatif. Banyak alasan mengapa konsumen menikmati dalam menonton film. Jenis penelitian yang ditulis oleh Wided Batat dan Markus Wohlfeil pada artikel ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan filsafat fenomenologi-eksistensial. Banyak faktor yang saling berhubungan mengapa konsumen menikmati film. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah keterlibatan secara personal dengan narasi dan karakter film. Faktor semacam itu yang dikaji dalam Teori Transportasi Naratif (Gerring 1993, Green dan Brock 2000). Pengalaman hidup, emosi dan imajinasi juga berpengaruh (Green et al, 2004). Intinya adalah bagaimana menghubungkan pengalaman hidup personal dengan film (Ellis 1991; Wallendorf and Brucks 1993).

Metode yang digunakan untuk memahami konsumsi film secara komprehensif difokuskan pada pengalaman kesadaran aktual sehari-hari (Merleau-Ponty 1962; Thompson et al. 1989). Caranya adalah dengan mendeduksikan dan menggambarkan pengalaman

tersebut. Kemudian, dibandingkan dan ditafsirkan (Gould 2006; Patterson et al. 1998). Kesimpulannya, kenikmatan menonton film bergantung pada keterlibatan personal dengan narasi dan karakter film. Di samping juga bergantung pada usia dan gender. Kajian ini menemukan kejelasan bahwa menikmati film harus dipahami sebagai pengalaman pribadi dalam berkonsumsi. Implikasi secara manajerial adalah bahwa konsumen ingin menikmati film secara personal dengan tantangan dan rangsangan emosi yang bervariasi.

Jurnal ketujuh mengenai penjadwalan (*scheduling*) film bioskop. Dalam pemasaran film, sebagaimana telah disinggung oleh para peneliti terdahulu (misalnya,

Hennig-Thurau *et al.*, 2001), bahwa manajemen distribusi, terutama jaringan bioskop turut memengaruhi sukses film.

Jadwal pemutaran film di bioskop dirancang untuk setiap minggu. Belakangan ini bioskop didesain secara *multiplex* atau *cinplex*, di mana satu bioskop dibagi menjadi beberapa layar (*screens*).

Berdasarkan hal inilah maka penjadwalan atas film yang sama menjadi persoalan penting. Penulis artikel ini mengkaji pemasaran film dengan mendasarkan pada riset operasi (*operation research*) terhadap penjadwalan tayangan film bioskop. Para penulis mengajukan model sebagai berikut:

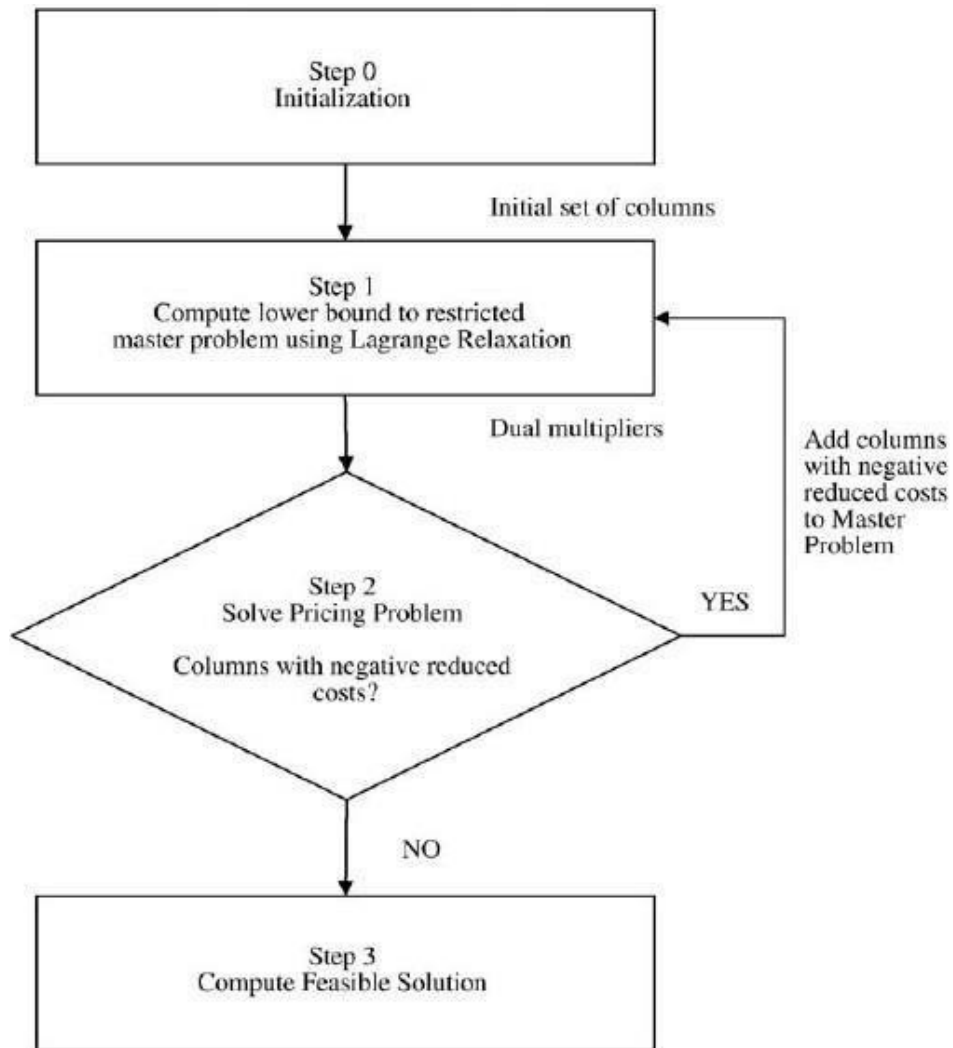


Fig. 2. Schematic picture of the algorithm.

Hasil pengujian model, sebagaimana terdapat pada Tabel 3 berikut, adalah: Pertama, model *SilverScheduler* menunjukkan peningkatan 10,83 % penonton. Korelasi antara aktual dengan peramalan sebesar 0,65 yang berarti kurang

sempurna. Kedua, dengan pemograman model *SilverScheduler* penjadwalan pemutaran film bioskop lebih efisien dibandingkan penjadwalan secara manual (*Pathe schedule*).

Table 3
 Comparison of the schedules of Pathé and SilverScheduler over all 14 weeks.

Week in 2005	Actual ticket sales	Ticket sales predicted by Eqs. (8) and (9)				
		Pathé schedule		SilverScheduler		
		Movie showings	Ticket sales	Movie showings	Ticket sales	Improvement (%)
Mar 03–Mar 09	16,757	394	18,316	423	22,930	25.2
Mar 10–Mar 16	16,167	396	13,903	397	16,379	17.8
Mar 17–Mar 23	14,367	415	15,229	418	16,069	5.5
Mar 24–Mar 30	18,221	424	22,292	414	24,053	7.9
Apr 07–Apr 13	13,258	410	14,378	418	15,531	8.0
Apr 14–Apr 20	13,249	414	12,166	432	13,240	8.8
Apr 21–Apr 27	10,017	429	15,370	434	16,614	8.1
Apr 28–May 04	10,866	416	13,675	404	14,138	3.4
May 05–May 11	17,729	439	9977	412	10,502	5.3
May 19–May 25	16,776	412	9257	425	10,887	17.6
May 26–Jun 01	13,495	406	9675	385	10,099	4.4
Jun 02–Jun 08	16,528	418	11,305	407	11,639	3.0
Jun 30–Jul 06	24,106 ^a	409	13,800	419	15,654	13.4
Jul 14–Jul 20	16,348	419	15,086	443	17,763	17.7
Total	217,884	5801	194,429	5831	215,498	10.8

^a Week with sales promotion (not in model).

Dari hasil penelitian ini, penulis artikel ini menyimpulkan bahwa perlunya mengembangkan model penjadwalan pemutaran film bioskop. Dari pengujian model penjadwalan (*SilverScheduler*) berdasarkan optimalisasi, dihasilkan bahwa rata-rata kinerjanya adalah baik (1,57%) daripada dijadwal secara manual. Dari model yang diujikan juga menunjukkan bahwa secara umum jumlah penonton lebih banyak atau meningkat sebanyak 11 % daripada jadwal manual. Jadi, dari pengajuan permodelan yang diajukan oleh peneliti ini dapat dijadikan alat atau *tool* untuk mendukung pengambilan keputusan, terutama dalam penjadwalan pemutaran film bioskop.

SIMPULAN

Masalah yang diteliti dari tujuh jurnal, sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah

masalah konsumsi film. Yang menarik, penelitian tersebut bukan dikaji berdasarkan perspektif seni, melainkan dari perspektif ekonomi bisnis, terutama dalam bidang pemasaran. Teori yang digunakan adalah teori perilaku konsumen, teori pemasaran, teori kognitif, teori komunikasi, teori dinamika kelompok, dan fenomenologi-eksistensial. Sebanyak lima artikel merupakan penelitian kuantitatif. Sedangkan satu artikel merupakan proposisi teoretis. Sisanya, yakni hanya satu artikel (pendekatan fenomenologis) merupakan penelitian kualitatif.

Ketiga, dari kajian artikel penelitian terdapat perkembangan variabel yang digunakan. Artikel pertama berfokus pada kritik film. Artinya apakah kritik film berpengaruh pada sukses film. Artikel

kedua, berfokus pada inovasi pelayanan. Di sini kata kunci yang digunakan adalah komunikasi.

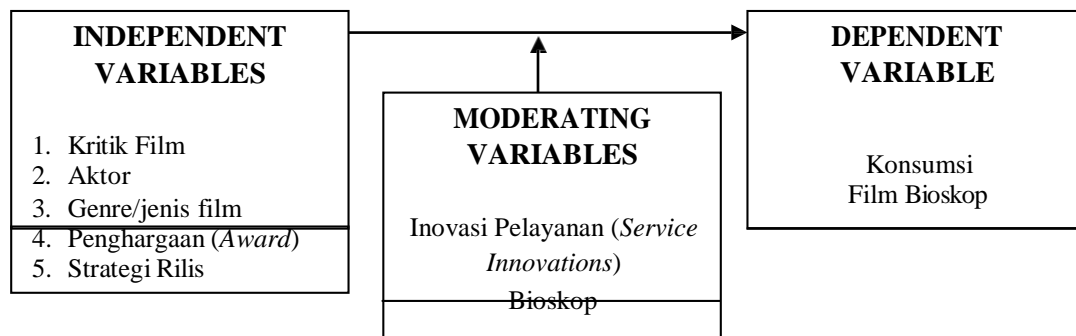
Bentuk komunikasi dianggap sebagai *quasi-search-qualities*. Artinya, kualitas yang “setengah” dicari oleh konsumen film. Maksudnya variabel tersebut hanya menjadi *moderating variable* dari konsumsi film. Karena pada konsumsi film, yang dicari bukan bentuk komunikasinya atau inovasi pelayanannya melainkan adalah variabel lain, yakni: aktor (*star power*), genre/jenis film, klasifikasi usia, strategi rilis, penghargaan (*award*), dan kritik film. *Keempat*, metode analisis pada kelima artikel (kuantitatif) menggunakan alat statistik regresi. Hanya satu artikel yang

menggunakan pendekatan ekonometrik. Sedangkan satu buah sisanya menggunakan metode hermeunetik atau penafsiran.

Kelima, data yang digunakan pada kelima artikel (kuantitatif) adalah data sekunder. Hanya pada pendekatan kualitatif (fenomenologis) yang menggunakan data primer, langsung dari pengalaman konsumen.

Pertama, berdasarkan telaah atas penjelasan teori dan variabel yang digunakan, maka dalam kajian industri perfilman terutama aspek exhibisi di bioskop (konsumsi film bioskop), maka dapat diajukan rancangan gambar/skema konseptual penelitian demikian:

Gambar rancangan skema penelitian:



Kedua, karena banyak faktor yang saling berhubungan dalam konsumsi film, sebagaimaa diperlihatkan pada ketujuh jurnal di atas, maka pendekatan kuantitatif

saja kurang mencukupi dalam menjelaskan fenomena konsumsi film. Faktor-faktor seperti keterlibatan secara personal dengan

narasi dan karakter film (Gerring 1993, Green dan Brock 2000).

Pengalaman hidup, emosi dan imajinasi juga berpengaruh (Green *at al*, 2004). Intinya adalah bagaimana menghubungkan pengalaman hidup personal dengan film (Ellis1991; Wallendorf and Brucks 1993), dapat terungkap dalam penelitian. Oleh

karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methode*) dalam kajian pemasaran film.

Ketiga, dari kajian penelitian di atas, tampaknya perkembangan teknologi informasi (digital) belum di teliti. Padahal perkembangan teknologi digital dapat mengancam pemasaran film konvensional melalui bioskop. Bila kita bandingkan dengan film nasional, penelitian terhadap perilaku konsumsi film menarik untuk dilakukan. Mengapa? Karena pasar film di negeri ini, sebagaimana sektor strategis pada perekonomian nasional, didominasi oleh film-film impor terutama film Hollywood. Padahal film merupakan produk yang strategis karena memiliki jangkauan pengaruh yang luas terhadap

kehidupan sosial-budaya, khususnya bagi generasi muda.

REFERENSI

- Batat, W. dan Markus Wohlfeil. (2009). Getting lost "Into the Wild": Understanding consumers' movie enjoyment through a narrative transportation approach. *Advances in Consumer Research* 36: 372-377.
- Bridgstock, Ruth S. (2005). Australian artists, starving and wellnourished: What can we learn from the prototypical protean career? *Australian Journal of Career Development* 41 (3).
- Eikhof., D.R., dan A.Haunschild. (2006). Lifestyle meets market: Bohemian entrepreneurs in creative industries. *Creativity and Innovation Management* 15 (3): 234-241.
- Elberse, A. (2007). The power of stars: Do star actors drive the success of movies? *Journal of Marketing* 71 (Oktober): 102-120.
- Elberse, A., dan Bharat Anand. (2007). The effectiveness of pre-release

- advertising for motion pictures: An empirical investigation using a simulated market. *Information Economics and Policy* 19: 319–343.
- Elberse, A., dan F. Oberholzer-Gee. (2008). Superstars and underdogs: An examination of the long-tail phenomenon in video sales. Working Paper 07-015. Cambridge, MA: Harvard Business School.
- Elberse, A., dan Jehoshua Eliashberg. (2003). Demand and supply dynamics for sequentially released products in international markets: The case of motion pictures. *Marketing Science* 22 (3): 329-354.
- Eliashberg, J. dan Steven M Shugan. (1997). Film critics: Influencers or predictors? *Journal of Marketing* 61 (2): 68-78.
- Eliashberg, J., A. Elberse, dan M.A.M.M Leenders. (2006). The motion picture industry: Critical issues in practice current research, and new research direction. *Marketing Science* 25 (6): 638-661.
- Eliashberg, J., dan Steven M Shugan. 1997. Film critics: Influencers or predictors? *Journal of Marketing* 61 (2): 68-78.
- Eliashberg, J., et al. (2009). Demand-driven scheduling of movies in multiplex. *International Journal of Research in Marketing* 26: 75-88.
- Thorsten Hennig, T., et al. (2001). An Investigation into the factors determining the success of service innovation: The case of motion pictures. *Academy of Marketing Science Review* 6: 1-23.
- Hennig-Thurau, T., et al. (2006). Determinants of motion picture box office and profitability: An interrelationship approach. Accepted for publication in *Review of Managerial Science*. Hennig-Thurau, T., V.H. Sattler, F.H. Eggers dan M.B. Houston. (2007). The last picture show? Timing and order of movie distribution channels. *Journal of Marketing*. 71 (Oktober): 63-83.
- Holbrook, M.B., dan M. Addis. (2008). Art versus commerce in the movie

industry: a two-path model of motion-picture success. *Journal of Cultural Economics* 32: 87-107.

Joshi, A.M., dan Dominique M. Hanssens. (2009). Movie advertising and the stock market valuation of studios: A case of “great expectations”? *Marketing Science* 28 (2): 239–250.

Thorsten Hennig-Thurau, Gianfranco Walsh, dan Oliver Wruck. 2001. An Investigation into the factors determining the success of service innovation: The case of motion pictures. *Academy of Marketing Science Review* 6: 1-23.

Anita Elberse dan Jehoshua Eliashberg. (2003). Demand and supply dynamics for sequentially released products in international markets: The case of motion pictures. *Marketing Science* 22 (3): 329-354

AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Vol. 1, No. 2, September 2017
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat>
p-ISSN: 2549-5658 e-ISSN: 2549-7243
DOI: 10.22236/agregat_vol1/is2pp247-271
Hal 247-271

Pernyataan Pengalihan Hak Cipta

Nama Penulis Utama :

.....
Alamat Penulis :

Telp/Fax :

Email :

Nama Penulis :

Judul Artikel :

-
1. Kami mengirimkan artikel pada Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, kami memastikan bahwa artikel yang kami kirimkan belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau sedang dalam proses penelaahan pada jurnal lain atau mengandung materi yang melanggar hak cipta kepada orang atau entitas lain.
 2. Kami menyetujui untuk mengalihkan hak cipta kepada Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis sebagai penerbit artikel ini dengan judul artikel yang tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini kami buat, apabila terjadi pelanggaran hak cipta terkait artikel ini, maka kami siap untuk menerima sanksi sesuai prosedur yang berlaku.

Tanggal:.....

Tanda Tangan

.....

(Jika ada lebih dari satu penulis, cukup penulis pertama yang menandatangani)

PETUNJUK PENULISAN

1. PETUNJUK UMUM

- a. Naskah merupakan ringkasan hasil
- b. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format word yang sudah jadi dan siap cetak sesuai dengan template yang disediakan. Template tentang tata cara penulisan artikel dapat diunduh di laman
- c. Ukuran file word naskah maksimal 5MB.
- d. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Time New Roman font 12. Panjang naskah sekitar 15–20 halaman dan diketik 1,5spasi.
- e. Naskah dalam format pdf diunggah ke laman
- f. Seting halaman adalah 2 kolom dengan equal with coloumn dan jarak antar kolom 5 mm, sedangkan Judul, Identitas Penulis, dan Abstract ditulis dalam 1 kolom.
- g. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (margin) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, sedang kanan adalah 2,0 cm.
- h. Naskah merupakan ringkasan hasil
- i. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format word yang sudah jadi dan siap cetak sesuai dengan template yang disediakan. Template tentang tata cara penulisan artikel dapat diunduh di laman
- j. Ukuran file word naskah maksimal 5MB.
- k. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Time New Roman font 11. Panjang naskah sekitar 15–20 halaman dan diketik 1,5spasi.
- l. Naskah dalam format pdf diunggah ke laman
- m. Seting halaman adalah 2 kolom dengan equal with coloumn dan jarak antar kolom 5 mm, sedangkan Judul, Identitas Penulis, dan Abstract ditulis dalam 1 kolom.
- n. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi (margin) adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah dan kiri, sedang kanan adalah 2,0 cm.

2. SISTIMATIKA PENULISAN

- a. Bagian awal : judul, nama penulis, abstraksi.
- b. Bagian utama : berisi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan dan saran (jika ada).
- c. Bagian akhir : ucapan terima kasih (jika ada), keterangan simbol (jika ada), dan daftar pustaka.

3. JUDUL DAN NAMAPENULIS

- a. Judul dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (bold) dengan jenis huruf Times New Roman font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15.
- b. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata "oleh", urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya.
- c. Nama perguruan tinggi dan alamat surel (email) semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman font 11.

4. ABSTRACT

- a. Abstract ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan/latar belakang, cara pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstract dicetak tebal (bold).
- b. Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi.
- c. Jenis huruf abstract adalah Times New Roman font 11, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraph, dan ditulis tanpa menjorok (indent) pada awal kalimat.
- d. Abstract dilengkapi dengan Keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata Keywords dicetak tebal (bold).

5. ATURAN UMUM PENULISAN NASKAH

Setiap sub judul ditulis dengan huruf Times New Roman font 11 dan dicetak tebal (bold).

- a. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent-first line 0,75 cm, antar alinea tidak diberi spasi.
- b. Kata asing ditulis dengan huruf miring.
- c. Semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari sepuluh harus dieja.
- d. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas, dan diberi nomor urut.

6. REFERENSI

Penulisan pustaka menggunakan sistem Apa Style. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutakhiran referensi sangat diutamakan. Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain.

A. Buku

[1] Penulis 1, Penulis 2 dst. (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul Buku cetak miring. Edisi, Penerbit. Tempat Publikasi.

Contoh:

O'Brien, J.A. dan J.M. Marakas. (2011). Management Information Systems. Edisi 10. McGraw-Hill. New York-USA.

B. Artikel Jurnal

[2] Penulis 1, Penulis 2 dan seterusnya, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. Nama Jurnal Cetak Miring. Vol. Nomor. Rentang Halaman.

Contoh:

Cartlidge, J. (2012). Crossing boundaries: Using fact and fiction in adult learning. The Journal of Artistic and Creative Education. 6 (1): 94-111.

C. Prosiding Seminar/Konferensi

[3] Penulis 1, Penulis 2 dst, (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul artikel. Nama Konferensi. Tanggal, Bulan dan Tahun, Kota, Negara. Halaman.

Contoh:

Michael, R. (2011). Integrating innovation into enterprise architecture management. Proceeding on Tenth International Conference on Wirtschaftsinformatik. 16-18 February (2011), Zurich, Swis. Hal. 776-786.

D. Tesis atau Disertasi

[4] Penulis (Nama belakang, nama depan disingkat). Tahun publikasi. Judul. Skripsi, Tesis, atau Disertasi. Universitas.

Contoh:

Soegandhi. (2009). Aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Joyonegoro, Surabaya.

E. Sumber Rujukan dari Website

[5] Penulis. Tahun. Judul. Alamat Uniform Resources Locator (URL). Tanggal Diakses.

Contoh:

Ahmed, S. dan A. Zlate. (2013) Capital flows to emerging market economies: A brave new world?. <http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf>. Diakses tanggal 18 Juni 2013.

Petunjuk Penulisan, silahkan download disini

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jl. Raya Bogor KM. 23, No. 99. Flyover Pasar Rebo Jakarta Timur 13830
Telp : 021 - 87796977, Fax : 021 - 87796977
Email : agregat@uhamka.ac.id
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/agregat/index>

